



Belajar Merawat **INDONESIA**

"Karena gelegak semangat para aktivis mahasiswa ini yang luar biasa, maka bertaburanlah berbagai gagasan dan pemikiran mereka tentang Indonesia. Seluruhnya mencerminkan gairah untuk melakukan perubahan dan perbaikan bangsa."

Ahmad Juwaini (Direktur Eksekutif Dompot Dhuafa)

"Kita percaya Indonesia akan terus maju, tetapi memerlukan perawat-perawat yang lebih baik. Dan perawat-perawat yang lebih unggul adalah seperti generasi muda yang ada sekarang!"

Dahlan Iskan (CEO Jawa Pos)

BAKTI NUSA
BEASISWA AKTIVIS NUSANTARA



**DOMPET
DHUAFa**
REASITUDI INDONESIA



Belajar Merawat **INDONESIA**

M. Adi Nugroho, Laras Susanti,
Purnawati Hustina Rachman, dkk.



Belajar Merawat INDONESIA

M. Adi Nugroho, Laras Susanti,
Purnawati Hustina Rachman, dkk.

BAKTI NUSA
BEASISWA AKTIVIS NUSANTARA



**DOMPET
DHUAFa**
BEASISWA INDONESIA

Belajar Merawat Indonesia



Belajar Merawat Indonesia

©LPI-DD, 2012

ISBN: 978-602-19578-1-3

Penyunting: Yusuf Maulana

Pemeriksa Aksara: Ab. Rihab

Penata Letak: Turiyanto

Perwajahan Sampul: Romadhan Hanafi

Hak Cipta dilindungi undang-undang

All Rights reserve

Cetakan II, April 2012

Diterbitkan oleh

Divisi Pendidikan Dompot Dhuafa

Jalan Raya Parung KM 42 Desa Jampang Kecamatan Kemang

Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16310

Telp. (0251) 8610817, 8610818, 8612044

Faks. (0251) 8615016

Website: www.lpi-dd.net

E-mail: lpi@lpi-dd.net



“Idealisme pemuda harus tetap terjaga. Tidak hanya saat menjadi mahasiswa tapi hingga saat berkarya untuk bangsa.”

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.S.
(Menteri Pertanian periode 2004-2009)

“Kalau kita ingin membangun bangsa yang berbasis ilmu pengetahuan, tentu saja tidak ada cara lain dalam pendekatannya kecuali penciptaan ilmu (*knowledge creation*). Salah satu bentuk penciptaan ilmu adalah buku. Buku *Belajar Merawat Indonesia* adalah salah satunya. Kita harus percaya, meskipun banyak kesulitan, kita harus optimis bahwa generasi nanti akan lebih cerdas dari saat ini.”

Prof. Ir. Sudjarwadi, ST., M.Eng., Ph.D.;
(Rektor UGM periode 2007-2012)

“*Belajar Merawat Indonesia* adalah judul yang provokatif tapi cukup enak untuk dimaknai.”

Herry Zudianto
(Walikota Berprestasi Kota Yogyakarta
periode 2001-2006 dan 2006-2011)

“Yang menciptakan judul *Belajar Merawat Indonesia* harus mendapatkan Rekor MURI, karena dengan membaca judul buku tersebut sudah bisa menyentuh dan terbayangkan apa yang ada di dalamnya.”

Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.
(Dekan Fakultas Hukum UGM)



“Menulis bisa menjadi salah satu sarana berjuang bagi aktivis mahasiswa saat ini. Buku *Belajar Merawat Indonesia* berisi gagasan luar biasa mahasiswa.”

Muhammad Hariman Bahtiar, M.Si.
**(Direktur Center for Leadership &
Youth Entrepreneurship Studies)**

“*Belajar Merawat Indonesia* sejatinya mengajak kita memulai tindakan konkret. Mari merawat Indonesia!”

Drs. Harmawan, M.Lib.
(Direktur Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret)

“Beasiswa Aktivis adalah program yang berani, kreatif, dan produktif. Buku *Belajar Merawat Indonesia* menjadi buktinya!”

Arwani Denny
**(Kepala Staf Komando Nasional
Menwa Indonesia periode 2006–2009)**

“Menjadi aktivis adalah pilihan hidup untuk berjuang dan menjadi pribadi istimewa. Jalan Cinta Para Pejuang dalam buku ini menggambarkan keistimewaan itu.”

M. Ikhlas Thamrin
(Tokoh Pemuda Solo)



DAFTAR ISI

Mencetak Presiden Baru.....	xi
Ikhtiar Mendampingi SDM Muda Calon Pemimpin Negeri.....	xiii
Menagih Kiprah Mahasiswa.....	1
Peran Mahasiswa dalam Membangun Peradaban Bangsa	2
‘Vivere Pericoloso’, dan Keberanian (Calon) Pemimpin	10
Membangun Karakter dari Kampus.....	16
Menyiapkan Mahasiswa Berkarakter dan Beradab..	18
Kepribadian Diri, Kepemimpinan, dan Kemajuan Organisasi	23
Menerpa Diri Lewat Komunitas.....	28
Ruang Belajar.....	32
Jalan Cinta para Aktivis	36
Sumpah Pemuda Islam Antikorupsi.....	40
Awan Hitam Perubahan.....	43
Reformasi yang (Belum) Usai	44
Anarkisme dan Konflik Horizontal	48
Menyoal Karakter Bangsa.....	51
Mengkhianati Republik	54
Wakil Rakyat Minim Kinerja.....	58
Perselingkuhan Korup	63
Masih Mengorupsi Pendidikan?.....	67
Sekolah Hanya untuk Orang Berduit?.....	71
Generasi Muda dan Korupsi Waktu	73



Becermin pada Geliat di Luar.....	77
Pemerintahan Terbuka di Amerika	78
Setelah Revolusi Mesir Bergulir.....	85
Me(Mesir)kan Pemberantasan Korupsi.....	90
Krisis Libya dan Strategi Keamanan Kita	93
Memperbaiki Pendidikan dan Kesejahteraan lewat ASEAN.....	97
Memimpikan Indonesia Baru.....	101
Membangkitkan Manusia Indonesia	102
Melihat Peranan Penting Perempuan	105
Satu untuk Sebuah Keragaman	108
Berinvestasi lewat Pendidikan	112
‘Positive Learning’, dan Problem Pendidikan Tinggi	116
Menghancurkan Budaya Korupsi.....	122
Media dan Kebangkitan Bangsa.....	127
Membenahi Museum, Membenahi Indonesia.....	132
Perubahan ala ‘Green Concept’	137
Membangun Desa Berbasis Pemberdayaan Warga ..	140
Berdikari bersama Sosial Wirausaha	141
Industri dan Penguatan Karakter Bangsa	144
Memajukan Industri Strategis Kita	147
Budaya Cinta Produk Dalam Negeri	150
Kewirausahaan Mahasiswa, dan Daya Saing Bangsa	152
Menggagas Asosiasi Pengusaha Muda	160
Menjadi Pemain Utama Ekonomi	164
Menjadi Wirausahawan Sosial.....	169
Wirausaha sebagai Ekspresi Nasionalisme.....	173



Mengabdikan Kompetensi.....	179
Membangun Basis Ketahanan Pangan Nasional	180
Keamanan dan Ketahanan Pangan Asal Hewan	187
Anemia, dan Biskuit Sehat dari Pangan Lokal	197
Mengelola Pulau Kecil Terluar dengan Pendekatan Ekologi.....	202
Pemanfaatan Mikroalga sebagai Sumber Energi Alternatif	225
Mencintai Alam, Mencintai Indonesia.....	229
Mengelola Sungai Jakarta.....	236
Memetik Inspirasi Hidup.....	243
Menghormati Pahlawan.....	244
Tukijo, Sang Pelawan Rezim Modal.....	249
Mencari Ulama Pejuang Indonesia	254
Belajar dari Iskandar Muda.....	257
Filosofi Sebutir Nasi	263
Dedikasi Emak	266
Semua Mampu Merawat, Tetapi Tidak Semua Mau ..	268
Tentang Penulis	271
Profil Beasiswa Aktivistis Nusantara (BAKTI NUSA)	
Dompet Dhuafa.....	278





MENCETAK PRESIDEN BARU

Ahmad Juwaini

(Direktur Eksekutif Dompot Dhuafa)

MASA MUDA adalah masa ketika kesempatan menjadi apa pun masih sangat terbuka. Ada rentang waktu yang cukup untuk mengubah pemuda menjadi apa pun yang dikehendaki. Pemuda boleh bercita-cita menjadi apa saja. Bukan sekadar cita-cita untuk berkhayal dan menjadi pemanis bibir, tapi betul-betul cita-cita yang akan diperjuangkan. Karena pemuda adalah pewaris masa depan, maka biarkan pemuda memiliki cita-cita setinggi langit yang diperjuangkan.

Mahasiswa adalah kelompok pemuda paling strategis. Mereka adalah golongan pemuda yang beruntung memiliki kesempatan mengembangkan dirinya dengan leluasa. Menyerap ilmu sebanyak mungkin, melatih keterampilan sehingga mahir, dan menyerap pengalaman sehingga matang, untuk menjadi manusia seutuhnya. Kemahasiswaan adalah ruang kesempatan untuk mengasah seorang pemuda guna menjadi manusia paling siap untuk menduduki puncak tertinggi posisi masa depan.

Di kalangan mahasiswa ini terdapat sekelompok minoritas mahasiswa yang selalu terpanggil untuk berbakti. Menggerakkan berbagai organisasi kemahasiswaan di kampusnya. Sebagian di antara mereka ini, terlibat juga mengembangkan organisasi di luar kampus. Mereka mengisi hari-harinya dengan segala aktivitas yang berguna bagi kampus, bagi masyarakat



dan bagi nusa serta bangsa. Mereka inilah yang sering disebut sebagai agen perubahan, yaitu para aktivis mahasiswa.

Dompot Dhuafa, merasa terpancang untuk turut serta berkontribusi dalam kegiatan pengembangan pemuda dan mahasiswa. Kegiatan ini, selain sudah tentu dalam rangka membentuk mahasiswa yang memiliki etos mandiri, juga sekaligus sebagai wahana pembentukan kader pemimpin masa depan. Kegiatan ini mencita-citakan untuk melahirkan sosok presiden Indonesia masa depan. Meskipun mungkin nanti para mahasiswa terpilih ini tidak semuanya akan menjadi presiden, akan tetapi kualitas alumni kegiatan ini memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menjadi presiden.

Karena gelegak semangat para aktivis mahasiswa ini yang luar biasa, maka bertaburanlah berbagai gagasan dan pemikiran mereka tentang Indonesia. Seluruhnya mencerminkan gairah untuk melakukan perubahan dan perbaikan bangsa. Gagasan dan pemikiran ini telah menyebar dalam aneka ruang dan media massa. Patut pula bagi kami untuk merangkum semua gagasan tersebut sebagai bagian dari konsolidasi pemikiran dan perubahan.

Mereka ini sedang belajar merawat Indonesia, negeri kaya raya yang mereka cintai. Mereka ini sedang belajar mengarahkan laju pergerakan bangsa. Mereka ini sedang belajar memandu dan menggerakkan pembangunan negara. Mereka sedang belajar memperbaiki kelemahan dan penyakit yang masih diderita bangsa Indonesia. Mereka ini sedang belajar untuk menjadi Presiden baru Indonesia.

Jakarta, 11 Januari 2012



IKHTIAR MENDAMPINGI SDM MUDA CALON PEMIMPIN NEGERI

DIPILIHNYA aktivis kampus sebagai segmen baru dalam pengelolaan beasiswa Dompot Dhuafa bukan tanpa alasan. Pemilihan segmen ini pula yang membuat program ini memiliki kekhasan. Mbersamai para aktivis kampus melalui program beasiswa bagi kami tidak sekadar untuk mendukung aktivitas keorganisasian mereka di kampus. Lebih dari itu, mbersamai para aktivis artinya mendukung penyiapan SDM muda calon pemimpin negeri. Di kampus, kematangan para anak muda dibentuk dan diuji. Sementara di sisi lain, mbersamai para aktivis kampus adalah cara kami juga untuk bersinergi. Bersama para aktivis kami berharap dapat menebar nilai dan kemanfaatan yang lebih besar. Perjuangan pengentasan kemiskinan dan pengembangan pendidikan berkualitas.

Sesuai dengan konsep awal, program ini memiliki tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan sikap peserta program. Peserta program diharapkan akan menjadi sumber daya manusia yang berkarakter pemimpin. Bertanggung jawab dan mampu berkontribusi serta berperan aktif di tengah masyarakat. Beasiswa yang diberikan bukan didefinisikan sebagai uang saku. Beasiswa ini kami sebut sebagai dana dukungan aktivitas. Sebab, dengan beasiswa ini kami



berharap penerima beasiswa semakin produktif berkontribusi bagi organisasi. Dukungan diperkuat dengan tiga fasilitas pembinaan, yakni pelatihan pengembangan diri, pendampingan tokoh/aktivis, dan penugasan.

Pelatihan pengembangan diri fokus pada pelatihan nilai, jurnalisme kepemimpinan dan sosial jaringan. Pendampingan aktivis kami lakukan dengan memilih fasilitator yang juga berlatar belakang aktivis kampus. Sementara itu, penugasan kami berikan baik secara kolektif maupun personal. Penugasan dilakukan untuk mengasah tulisan dan program sosial para penerima beasiswa.

Kekhasan program menjadi kian terasa jika melihat *input*-nya Mereka yang kami pilih adalah mahasiswa yang telah aktif di organisasi minimal semester V. Dengan demikian para penerima beasiswa ini adalah mereka yang dalam rentang kehidupan masa mahasiswa berada pada garis mapan dan matang. Paling tidak secara aktivitas kemahasiswaan. Sebagian besar penerima manfaat program ini pada tahun pertama digulirkan adalah mereka yang telah memiliki status sebagai pimpinan lembaga mahasiswa baik universitas maupun fakultas. Atau minimal mereka memimpin sebuah tim, baik lingkup divisi/departemen ataupun tim khusus di organisasi kampus.

Dalam perjalanannya, mengelola para aktivis ini menjadi sangat menarik. Status pemimpin yang mereka miliki di lembaga masing-masing telah membuat dinamika forum dan proses di program menjadi sangat berwarna. Salah satu dinamika yang paling menarik dalam program ini adalah seliweran gagasan. Ide-ide segar mengalir dengan sangat de-



rasnya dari pikiran mereka. Mbersamai mereka seperti sedang mbersamai semangat anak muda yang khas tentang cita-cita bangsa. Mbersamai mereka ibarat juga menemukan kembali harapan akan masa depan bangsa. Dari sekian banyak gagasan tersebut kami mendorong untuk dituangkan menjadi sebuah karya tulis.

Buku ini adalah perwujudannya. Pada buku ini kami memberikan kesempatan para aktivis muda ini mengartikulasikan gagasan mereka. Dari mulai gugatan mereka tentang peran dirinya sendiri, catatan kritis mereka tentang kondisi negeri saat ini, ‘lirikan’ mereka terhadap situasi di luar Indonesia, kesadaran akan arti kompetensi guna menopang kontribusi mereka di kemudian hari hingga catatan para tokoh yang menginspirasi mereka. Semua dikemas dengan semangat pembelajaran luar biasa, Tidak ada perasaan menjadi pakar. Hanya mencoba belajar.

Kami bersyukur pada cetakan pertama, buku Belajar Merawat Indonesia mendapatkan respons dari berbagai pihak. Sebahagian respons tersebut sengaja kami dokumentasikan dalam cetakan kedua ini. Terkhusus ketika buku ini dibedah di UI, IPB, UGM, ITB, UNS dan UNSRI yang menjadi lokasi program Beasiswa Aktivis angkatan II. Respons tersebut—baik kritik maupun saran—telah memperkaya kami ketika menerbitkan cetakan kedua ini. Mari tetap bersemangat merawat Indonesia.

April 2012

Pengelola Program Beasiswa Aktivis Nusantara
(BAKTI NUSA)
Dompot Dhuafa

Ikhtiar Mendampingi SDM Muda







Menagih Kiprah Mahasiswa

PERAN MAHASISWA DALAM MEMBANGUN PERADABAN BANGSA

Nestiyanto Hadi

PEMUDA merupakan aset besar suatu bangsa. Aset besar yang dapat menjadi fondasi tatanan kehidupan. Pemuda memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan secara optimal seiring rentang waktu yang dimiliki. Tokoh-tokoh besar pun mengabadikan peran besar pemuda dalam bingkai sastra yang indah. Seperti ucapan Bung Karno, “Berikan aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Jika kau beri aku satu pemuda, niscaya akan kuguncang dunia.”

Bukanlah suatu hal yang dibesar-besarkan oleh Bung Karno dalam ucapannya itu, tapi memang seperti itulah sandingan yang layak untuk para pemuda. Karena memang di dalam jiwa seorang pemuda tertanam semangat yang kuat, keikhlasan beramal yang senantiasa tulus, dan memiliki karakter asasi yang melekat kuat di dalam hati. Seperti itulah gambaran ideal seorang pemuda.

Sebutan pemuda dapat disematkan ke berbagai aktor di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang menjadi penuntut ilmu, pekerja kantoran, tuna karya, ataupun para penggiat organisasi. Dalam hal ini, penggiat organisasi atau aktivis, menjadi sorotan khusus bagi banyak para pengelola sumber daya.



Aktivis memiliki arti sebagai seseorang (terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda dan mahasiswa) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan di organisasinya. Dalam ruang lingkup mahasiswa, label aktivis sering diberikan kepada orang-orang penggerak organisasi, seperti BEM, Senat, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan Lembaga Dakwah Kampus.

Agen Perubahan

Para aktivis mahasiswa diharapkan menjunjung tinggi fungsi-fungsi mahasiswa dalam kesehariannya. Fungsi-fungsi yang dapat menghasilkan nilai-nilai suci di dalam dirinya. Fungsi tersebut adalah *agent of change*, *moral force*, dan *iron stock*. Ketiga fungsi itulah yang menjadi ruh bagi para aktivis mahasiswa dalam mengemban amanahnya. Fungsi yang menjadikan setiap langkah, pikiran, dan gerakan yang dilakukan senantiasa jauh dari nilai ego pribadi maupun hawa nafsu semata.

Agent of change atau agen perubahan, menjadi fungsi bagi para aktivis untuk mencurahkan segala konsep baru, ide-ide segar, atau pun hal-hal unik yang dapat bermanfaat bagi masyarakat umum. Dengan semangat *agent of change*, para aktivis gencar menelurkan harapan atau cita bagi peradaban bangsa ini. Harapan atau cita yang lahir atas dasar kesucian hati dari para aktivis, jauh dari keinginan personal diri.

Harapan atau cita yang lahir di tangan para aktivis merupakan hasil kombinasi antara kebaikan-kebaikan yang ada di masa lalu dengan imajinasi harapan-harapan untuk masa



yang akan datang. Harapan itu juga lahir berkat kemampuan menganalisis yang baik dari para aktivis, karena memang mereka memiliki latar belakang dan nuansa akademis yang kental. Aktivis melakukan analisis mendalam terkait kebaikan masa lalu dengan mempelajari sejarah, baik nasional maupun internasional. Mereka mempelajari kesuksesan dari tokoh bangsa ini dan mereka pun tidak menutup diri untuk mempelajari dari kesuksesan tokoh bangsa lain.

Sikap keterbukaan aktivis tidak serta-merta sekadar membeo. Aktivis memiliki kemampuan untuk menyaring hal baru yang diperoleh dari bangsa lain. Mereka memilah hal-hal baru dengan detail, memastikan bahwa tidak ada hal yang bertentangan dengan etika adat-istiadat dan pastinya mampu memperbaiki peradaban bangsa ini. Aktivis akan mengelaborasi hal-hal positif dari bangsa lain dengan kebudayaan bangsa ini sehingga terjadi akulturasi budaya.

Dengan terjadinya akulturasi budaya, sangat menunjang bangsa ini untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Hasil akulturasi tersebut juga menjadikan bangsa ini akan semakin kaya akan budaya dan memperkuat basis peradaban di era globalisasi. Menjadikan masyarakat untuk tidak tabu menggunakan kemajuan teknologi bangsa lain untuk diterapkan di lingkungan mereka.

Kekuatan Moral

Berikutnya *moral force* atau kekuatan moral; merupakan fungsi kedua bagi mahasiswa. Dalam hal ini, aktivis mahasiswa mengimplementasikan *moral force* dalam merealisasikan harapan atau cita yang diimpikan. *Moral force* selalu hadir dan



bersemayam di dalam hati mereka. Implementasi harapan yang dibingkai dengan akhlak yang baik akan menghasilkan korelasi yang eksponensial dalam membawa perubahan baik bagi bangsa ini.

Moral force yang hadir di dalam hati-hati aktivis senantiasa menjadi penghias dan penyempurna dinamika pengimplementasian harapan yang mereka impikan. Para aktivis berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjaga kekuatan moral yang ada di dalam diri mereka. Karena memang itulah karakter asasi dari para aktivis yang menjadi citra positif di mata masyarakat umum.

Wajar saja jika seorang visioner seperti Hasan al-Bana menggambarkan bahwa “sebuah pemikiran itu akan berhasil diwujudkan manakala kuat rasa keyakinan kepadanya, ikhlas dalam berjuang di jalannya, semakin bersemangat dalam merealisasikannya, dan kesiapan untuk beramal dan berkorban dalam mewujudkannya.” Dilandasi dengan iman, ikhlas, semangat, dan amal merupakan karakter yang melekat pada diri pemuda. Karena sesungguhnya dasar keimanan itu adalah nurani yang menyala, dasar keikhlasan adalah hati yang bertakwa, dasar semangat adalah perasaan yang menggelora, dan dasar amal adalah kemauan yang kuat. Itu semua tidak terdapat kecuali pada diri para aktivis.

Moral force menjadi karakter bagi para aktivis. Karakter itu akan lahir seiring dengan kematangan berpikir aktivis. Karakter juga akan tumbuh dengan baik jika ada dalam diri aktivis jiwa rela berkorban dan kemampuan mengolah emosi. Dengan adanya karakter, tipe kepemimpinan para aktivis akan menjadi lebih sempurna. Kepemimpinan yang mampu



memahami permasalahan secara menyeluruh dan mampu menyelesaikannya dengan solusi yang terbaik. Begitu pula dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa ini. Dengan tipe kepemimpinan yang berkarakter inilah, para aktivis sangat diharapkan kehadirannya untuk membangun kembali peradaban bangsa.

Cadangan Keras

Fungsi ketiga mahasiswa yang menunjang peradaban bangsa adalah *iron stock* atau cadangan keras. *Iron stock* menjadi fungsi pelengkap kesempurnaan bagi para aktivis mahasiswa. *Iron stock* berperan sebagai penyempurna gerakan para aktivis karena dengan itulah mereka mampu mengolektifkan kebaikan secara masif. Selain itu, *iron stock* merupakan suatu cara untuk menjaga kesinambungan gerak langkah aktivis dalam merealisasikan harapan atau cita yang mereka impikan.

Iron stock menjadi penanda karakter unik lain dari para aktivis kampus. Mereka paham suatu kalimat bijak yang menyatakan bahwa “kebaikan yang tidak terorganisasi dengan baik maka selamanya tidak akan dapat menggantikan keburukan yang terorganisasi dengan baik”. Dalam hal ini, para aktivis mencoba menerjemahkan kalimat bijak tersebut dengan melakukan pendekatan terkait jumlah orang yang mendukung harapan atau cita yang diusung. Aktivis memahami, dengan semakin banyaknya orang yang mendukung harapan yang mereka usung, maka akan mempercepat terealisasinya harapan tersebut.



Dari sisi lain, kita pasti paham bahwa sungguh naif jika harapan atau cita-cita tidak akan terealisasi hanya dalam hitung bulan, tahun, ataupun hanya satu generasi. Umumnya, harapan atau cita-cita itu akan terealisasi dalam beberapa tahun atau bahkan lintas generasi. Karena itulah, dibutuhkan suplai generasi-generasi penerus yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan hingga titik akhir kemenangan.

Para aktivis akan terus mengader orang-orang baru yang akan siap digerakkan untuk menuntaskan harapan atau cita-cita mulia mereka. Para aktivis akan mengulurkan nilai-nilai dalam *moral force* ke dalam diri para generasi penerusnya. Mereka akan melakukan kaderisasi yang baik hingga akhirnya generasi penerus mereka kelak akan memiliki karakter yang baik pula. Dengan kata lain, para aktivis akan senantiasa mencetak pemimpin-pemimpin baru yang berkarakter. Dengan demikian, para aktivis akan memiliki sumber daya pemimpin berkarakter dalam jumlah yang banyak, sehingga tidak merasa khawatir pada harapan-harapan besar mereka untuk perubahan bangsa ini di masa akan datang saat mereka sudah tidak lagi menjadi pemain langsung di medan laga.

Mengatasi Tantangan

Begitulah idealnya, fungsi-fungsi mahasiswa yang mampu memberikan harapan bagi bangsa ini. Namun, tidaklah mudah untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Akan ada banyak halangan dan rintangan yang dihadapi para aktivis. Dari mulai permasalahan akademis ataupun terkait finansial. Kendati demikian, semua itu menjadi ajang pembuktian bagi kredibilitas maupun integritas para aktivis.



Dalam hal permasalahan akademis, para aktivis dituntut untuk mendapatkan indeks prestasi yang tinggi. Biasanya para dosen maupun civitas akademika yang lain akan menilai seorang aktivis pertama kalinya dari nilai indeks prestasinya. Hal itu memang menjadi parameter yang mudah untuk dilihat. Jika indeks prestasi baik, maka orang menghargainya dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, sebagian aktivis ada yang mengalami miorientasi dalam pergerakannya. Saat yang sama, para aktivis saat ini juga dituntut untuk lulus dalam waktu yang singkat. Jika melewati batas waktu yang ditentukan, mereka akan menghadapi ancaman *drop out* dari kampus. Dampak dari keadaan seperti ini, waktu seorang aktivis untuk menimba pengalaman pun berkurang. Banyak aktivis yang mahir itu hasil dari kaderisasi instan.

Ada pula tantangan dalam hal finansial. Tak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar aktivis umumnya berasal dari golongan kelas menengah hingga ke bawah. Mereka muncul atas kesadaran dirinya untuk membela hak bagi kaum marginal. Sedangkan orang-orang menengah atas umumnya sulit untuk turun ke lapangan karena memang kondisi mereka yang sudah nyaman. Dengan begitu, memang terlihat adanya kesenjangan dalam dinamika kehidupan kampus. Hal inilah dapat menjadi celah para aktivis dalam mempertahankan idealismenya. Karena adanya tuntutan untuk membayar kuliah, biaya makan, kos, dan kebutuhan yang lainnya, menyebabkan para aktivis mahasiswa tergiur untuk memanfaatkan fasilitas lembaga yang diberikan. Begitu pula transaksi-transaksi kepentingan elit-elit politik yang juga turut menambah sederetan peluang bagi para aktivis untuk memperkaya dirinya sendiri.



Seperti itulah dinamika yang terjadi di kampus. Memang banyak orang-orang yang memiliki harapan besar untuk memberikan perubahan kebaikan bagi bangsa Indonesia. Banyak dari mereka yang berasal dari kalangan politisi, aktivis LSM, ilmuwan, kalangan kelas menengah atas, baik dari kalangan alumnus maupun dari para senior. Namun apalah daya, sebagian besar mereka terkadang tidak memiliki nilai-nilai suci dalam menggerakkan harapan atau cita-citanya.

Alih-alih terperangkap pada godaan materi dari pihak luar, para aktivis mahasiswa dituntut untuk mengonsistensi tiga fungsinya tadi. Tanpa komitmen, aktivis mahasiswa sulit diharapkan andilnya membangun peradaban bangsa. Sebaliknya, dengan berbekal nilai-nilai yang ada pada fungsi mahasiswa itulah, mereka bergerak maju untuk menuntaskan harapan besarnya dalam memperbaiki peradaban bangsa. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk senantiasa mempertahankan idealisme dan menjauhkan diri dari buaian materi belaka.[]



‘VIVERE PERICOLOSO’, DAN KEBERANIAN (CALON) PEMIMPIN

Akifan Hanggraito

KONON KATANYA, hampir setengah abad yang lalu, masyarakat Indonesia tak asing dan dapat menangkap dengan mudah makna dari kata-kata *Vivere Pericoloso*. Suatu uji sederhana, saya tanyakan kepada ayah dan ibu saya yang kelahiran 1960-an, mereka menjawab dengan fasih: “Pidato Bung Karno itu kan?” atau “Oh, yang TAVIP itu ya?”. Jawaban mereka sangat kontras dengan persepsi rekan saya yang menyangka itu nama seorang pesepakbola asal Italia.

Vivere Pericoloso: Live-dangerously, diperkenalkan oleh Bung Karno dalam salah satu orasinya yang mengungkapkan kegundahan sang proklamator ini terhadap arah revolusi Indonesia yang masih rapuh pada 20 tahun pasca-kemerdekaannya. Bung Karno menjanjikan dunia baru dengan berani mengambil tantangan dan dengan tegas menetapkan haluan dalam kemerdekaan sendiri, kemerdekaan yang hakiki. Dengan kata lain, berani hidup dalam segala kebahayaan, berani ber-*vivere pericoloso* dalam menentang dan melawan kesemuan kekuasaan. Hal semacam inilah yang belakangan ini menjadi barang mewah nan langka dalam sistem kepemimpinan negara kita.



Lorong Bahaya

“Keberanian untuk berada dalam lorong kehahayaan.” Itulah sebenarnya yang membuat pandangan orang terhadap kita menjadi berbeda. Kita akan merasa terangkat dan merasa “ada” karena berani mendobrak palang yang menghalangi suatu tujuan mulia yang lurus. Tentu berani di sini bukan sembarang berani, yang lebih sering ditafsirkan sebagai “nekat” atau tanpa perhitungan. Berani di sini merupakan sikap lugas terhadap ketidakbenaran yang dilandasi pikiran jernih dan lurus. Picik rasanya bila kita berpikir bahwa di masa lalu bangsa Indonesia tidak punya pilihan lain dalam kehidupan bernegaranya, karena memang sudah berada dalam keadaan yang berbahaya, sehingga sekarang di saat banyak pilihan tersaji di depan mata, kita memandangi ideologi keberanian ini dengan sebelah mata. Sama sekali tidak! Hidup berbahaya adalah pilihan, seperti halnya pilihan antara memproklamasikan Indonesia atau tetap tunduk pada Jepang. Boleh jadi, lorong *vivere pericoloso* merupakan stimulus untuk memunculkan jalan satu-satunya bagi bangsa ini untuk meretas segala macam masalah yang menghadang di depan.

Keberanian dalam menangani suatu hal sering hanya terbatas oleh suatu dimensi ke-pemulaan yang tidak memerlukan *skill* dan pengetahuan lanjut. Dengan demikian, keberanian hanyalah berada setingkat di bawah kriteria kepemimpinan lain yang lebih populis dan terasa berharga untuk ditunjukkan karena diperoleh dengan cara yang susah sekali. Apa sebab bisa seperti itu? Bangsa ini telanjur melahirkan masyarakat pintar bicara yang bernyali besar untuk mem-bual dengan omongan hampa di depan umum dengan suara



keras—disebut pemberani—daripada melahirkan sesosok manusia pendiam dengan berjuta gagasan mulia yang pasti teronggok di barisan terdepan kala dia merasa pemikiran yang benar disalahkan dan dia harus melawan. Jatuhlah gambaran mulia dari keberanian dengan serta-merta.

Bisa kita lihat, berapa banyak orang yang memegang golok sembari meneriakkan semboyan, “Ganyang Malaysia!” tapi hilang sehilang-hilangnya saat aparaturnegara ini menelanjangi badan penegak korupsi di Indonesia? Nirkontribusi! Bukan itu yang dinamakan keberanian.

Belajar dari Sejarah

Urgensi dari keberanian yang mutlak ada dalam diri seorang pemimpin bangsa tidak bisa ditawar lagi. Apalagi saat metode kepemimpinan para pemimpin bangsa ini kurang mendapat tempat yang baik di masyarakat. Saat kebijakan populis dianggap sebagai keputusan terbaik yang tidak bisa dikritik, dan saat janji-janji bernuansa utopis menjadi pemanis bagi rakyat yang siap menerima apa pun yang pemimpin itu katakan.

Dibutuhkan pemimpin dengan modal keberanian yang datang tulus karena pikiran jernih yang lurus dalam hati untuk membawa kita pada tataran negara madani yang ditunggu-tunggu selama ini. Ini bukan berarti saya menyepelkan kepemimpinan dan usaha yang selama ini telah ditunjukkan para pemimpin kita. Namun, zaman selalu berubah dan akan banyak bahaya di depan kita. Meskipun selama ini bangsa kita terlihat hidup tenteram tanpa gangguan berarti (dengan beberapa pengecualian adanya riak pengeboman dan konflik



horizontal di beberapa daerah), cengkeraman dan tekanan dunia luar selalu datang.

Untuk menjadi berani, ada baiknya kita belajar dari zaman awal-awal kemerdekaan, zaman Indonesia masih belum maju atau modern seperti sekarang. Harus diakui bahwa di zaman itulah kita mendapat sorotan khusus dari dunia internasional karena keberanian dan kegigihan kita. Sungguh suatu sikap yang langka bagi bekas bangsa terjajah yang baru merdeka. Bangsa kita menampilkan sesuatu yang bisa ditonjolkan bernama kemandirian dan keberanian untuk tampil sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Bangga rasanya punya *role-model* dari pendiri bangsa sendiri. Sayangnya, zaman itu telah lewat, zaman ketika yang kecil tergerakkan untuk melawan yang sedang onggang-onggang kaki—penjajah. Saat itu, keberanian untuk membela yang benar berada di garda terdepan meninggalkan kemampuan retorika dan diplomasi. Pemuda dan terdidik lainnya tidak mengerut dalam cangkang keilmuannya. Suatu waktu yang memang tertulis dengan tinta emas di semua buku sejarah. Ya, saat bangsa kita berani hidup berimpit dengan bahaya, *ber-vivere pericoloso*. Persis seperti penggambaran Pramoedya A Toer dalam diri Minke yang dengan medan priyayinya menyalurkan keberanian-keberanian untuk menghapuskan budaya feodalistik sambil terus menyerukan kalimat yang populer di kalangan aktivis: “Didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah pemerintah dengan perlawanan.”

Sulit memang menemukan kepribadian sekokoh orang-orang dahulu itu pada masa sekarang. Tetapi, apakah tidak boleh kita mengandai dengan percikan niatan menuju ke arah



itu yang dideklarasikan oleh pemikiran-pemikiran seperti ini? Bahwasanya akan datang kelak sekelompok orang seperti itu hadir di tengah-tengah kita. Kita nantikan saat bangsa ini tidak *manut-manut* lagi terhadap diplomat dari negara asing, dihargai dan tidak dilecehkan di negeri tetangga, serta mendapat respek dari negeri sekitar.

Ah, mungkin untuk sekarang orang bilang itu hanya mimpi dan susah perealisasiannya. Namun, akan sampai kapan kita menunggu Ratu Adil datang dan memberi pencerahan pada bangsa ini? Sering terlintas dalam benak saya bahwa kita tidak harus menunggu-nunggu imam dari langit untuk memberantas kemungkarannya dan membawa kita ke surganya. Kitalah yang harus membawa surga itu ke dunia. Sekarang, bukan nanti!

Lorong *vivere pericoloso*, penuh sesak dengan intrik dan konflik kepentingan. Dia datang bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Bangsa ini membutuhkan kita, tunas muda bangsa, untuk ikut bergerak dan berperan aktif dalam membangun diri ini. Bangsa ini memerlukan pribadi cerdas yang tanggap dan kokoh serta berani dalam bertindak. Bangsa ini merindukan orang yang mengedepankan hati dan moralitas ketimbang logika tanpa memandang keduanya dengan sebelah mata. Bangsa ini menantikan pemuda yang siap bercokol di garda depan, menyongsong bahaya dan perubahan yang silih berganti, tak menentu—kadang terlihat memihak, tapi ternyata hanya muslihat—momen kebanyakan orang enggan ada di sana.

Bangsa ini menginginkan putra-putri yang mau memeras pikiran dan tenaga demi bakti untuk negeri. Ya, bangsa



ini membutuhkan kita, kaum muda sebagai penerus bangsa yang sudah kenyang disusui oleh berbagai peradaban dan perkembangan zaman, dari cerita tentang nenek moyang dahulu sampai realita teknologi yang sedang disaksikan sekarang. Sudah saatnya bangsa ini bangkit, sendiri, bertopang pada keringat dan tangan anak bangsa sendiri, melalui teladan kepemimpinan yang berani menembus lorong-lorong itu. Berani melakukan kebajikan di bawah cercaan, berani mengangkat kita di posisi yang semestinya, posisi negeri dongeng yang lama diidamkan pemikir-pemikir kita dahulu. Ingat, bangsa ini suatu saat pasti akan maju, itu suatu keniscayaan, dengan atau tanpa kita. Jadi, merupakan pilihan bagi kita: ingin menjadi penonton perubahan itu atau menjadi salah satu pilar pengubahnya. Maka, beranilah memilih![]



MEMBANGUN KARAKTER DARI KAMPUS

Monica Utari

SETENGAH abad yang lalu, pendiri negeri ini pernah berkata bahwa tujuan didirikannya universitas adalah untuk menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan bangsa.

Lantas mengapa harus mahasiswa? Mengapa pada akhirnya mahasiswa menjadi harapan bangsa? Sungguh jika kita melihat lebih dalam lagi pada diri kita, maka jawaban tersebut akan kita temukan dengan sangat jelas.

Kebanyakan mahasiswa beranggapan bahwa ia harus menjadi seorang yang 'siap' secara internal maupun eksternal terlebih dahulu, sebelum akhirnya berkontribusi untuk masyarakat. Hal tersebut dimanifestasikan dengan banyaknya rencana hidup mahasiswa dengan isi yang tidak jauh berbeda.

Diawali lulus dengan predikat *cumlaude*, bekerja di perusahaan baik nasional maupun internasional, mendapatkan gaji tinggi, melanjutkan S-2 di luar negeri; dan di saat semua hal tersebut tercapai maka itulah saat yang tepat untuk berkontribusi di masyarakat.

Kampus, sebagai tempat pembentukan karakter diharapkan dapat menjadi mata air di tengah gersangnya pemikiran



kapitalis dewasa ini. Diawali dengan melakukan internalisasi nilai-nilai mendasar seorang akademisi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pada tahap internalisasi nilai tersebut, pembentukan karakter akan berjalan seiringan. Semangat kontribusi akan melekat pada pribadi yang telah berhasil melakukan internalisasi dan membangun karakter mahasiswa sejati. Hal tersebut akan menjadi sebuah modal untuk menebar manfaat seluas-luasnya tanpa harus menunggu nanti. Bergerak sebagai seorang mahasiswa berarti berkontribusi di lini manapun ia berada sebagai praktik lapangan akan kontribusi nyatanya di masyarakat.

Tidak perlu setiap mahasiswa harus menjadi aktivis kampus yang aktif di ranah sosial politik, mengikuti banyak aksi massa, berdiskusi hingga larut malam untuk pada akhirnya membangun karakter dengan semangat kontribusi di dalamnya. Semua lini yang ada dalam kehidupan di kampus dapat menjadi media yang tepat untuk membangun karakter dan menyiapkan diri untuk kontribusi lebih besar lagi bagi bangsa ini karena bangsa ini merindukan pemuda-pemudi terbaiknya.

Sekarang, bukan nanti![]



MENYIAPKAN MAHASISWA BERKARAKTER DAN BERADAB

Achmad Fahmi Basyaiban

AKHIR-AKHIR ini pemerintah Indonesia gencar menggalakkan program Pendidikan Berbasis Karakter. Program ini dicanangkan dengan asumsi bahwa pengembangan sumber daya manusia yang hanya memperhatikan kecerdasan intelektual (*Intellectual Quotients*) saja tidak sejalan dengan pembangunan dan kemajuan bangsa. Orang cerdas secara intelektual saja tidak akan bisa mengembangkan potensinya dengan baik jika tidak disertai kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Bahkan kecerdasan intelektual saja akan memberikan bahaya untuk masyarakat jika tidak dibarengi dengan adab yang akan mengatur dan mengarahkan kecerdasannya dengan benar.

Pendidikan berbasis kecerdasan intelektual saat ini diusahakan untuk direvisi dan diarahkan dengan konsep Pendidikan Berbasis Karakter. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan kita yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003, Bab II Pasal 3: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, ber-



ilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Menurut UU tersebut, pendidikan didefinisikan sebagai “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Merujuk kepada UU Pendidikan Nasional tersebut, sebenarnya tujuan pendidikan nasional sangatlah jelas, yakni bukan hanya mengembangkan potensi kecerdasan intelektual semata. Hanya saja, bisa dipastikan bahwa pelaksanaan di lapangan tidaklah mudah. Karakter bukan hanya ajaran yang cukup kita tahu, tapi harus dibiasakan dan dilatih secara terus-menerus. Karakter jujur misalnya, tidak cukup kita tahu bahwa jujur itu diperlukan, tapi juga harus tahu, cinta, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. “Good character is more to be praised than outstanding talent,” tutur John Luther. “Most talents are to some extent a gift. Good character, by contrast, is not given to us. We have to build it peace by peace by thought choice, courage, and determination.”

Sebagai bangsa yang beragama dan berketuhanan, pendidikan karakter saja tidak cukup, sebab etika dan karakter selalu bersumber pada *worldview* (pandangan alam) dan *values* keagamaan. Orang bisa saja berkarakter tanpa dia mempunyai keimanan dan agama yang benar. Bangsa China bisa maju karena pendidikan karakter. Lalu apa bedanya kita



sebagai bangsa yang beragama dan berketuhanan dengan bangsa komunis yang berkarakter? Orang komunis bisa saja menjadi pribadi yang jujur, pekerja keras, disiplin, cinta kebersihan, dan sebagainya. Lalu di mana perbedaan karakter antara kita sebagai bangsa yang beragama dan berketuhanan dengan bangsa yang tidak mengenal tuhan?

Bagi Muslim, dia bisa juga dan bahkan harus berkarakter mulia. Tetapi bagi Muslim, berkarakter saja tidaklah cukup. Beda antara Muslim dengan orang yang tidak mengenal tuhan meskipun sama-sama berkarakter adalah pada konsep adab. Jadi, yang diperlukan bangsa Indonesia bukan hanya menjadi pribadi yang berkarakter atau beretika, tetapi harus menjadi seseorang yang berkarakter dan beradab.

Kata ‘adab’—kata yang juga termaktub dalam sila kedua Pancasila—merupakan istilah yang khas dan tidak bisa dilepaskan dari konsep Islam. Banyak hadits yang menyebutkannya perihal tentang adab, begitu pula dengan beberapa ulama. K.H. Hasyim Asy’ari, ulama dan pahlawan nasional, menyimpulkan dalam sebuah tulisannya berkaitan dengan adab:

“Kaitannya dengan masalah adab ini, sebagian ulama lain menjelaskan, ‘Konsekuensi dari pernyataan tauhid yang telah diikrarkan seseorang adalah mengharuskannya beriman kepada Allah. Karena apabila ia tidak memiliki keimanan itu, tauhidnya dianggap tidak sah. Demikian pula keimanan, jika keimanan tidak dibarengi dengan pengamalan syariat dengan baik, maka sesungguhnya ia belum memiliki keimanan dan tauhid yang benar. Begitu pun dengan pengamalan syariat, apabila ia mengamalkannya tanpa dilandasi



adab, maka pada hakikatnya ia belum mengamalkan syariat dan belum beriman serta bertauhid kepada Allah’.”

Dari penjelasan K.H. Hasyim Asy’ari di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu indikator diterima atau tidaknya suatu amal di sisi Allah adalah sejauh mana aspek adab disertakan dalam perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, menjadi manusia yang berkarakter dan beradab tidak bisa terlepas dari keimanan dan ketakwaan. Dan *values* yang diajarkan yang terbentuk menjadi karakter dan adab dalam diri kita tidak terlepas dari sumber ketuhanan. Hal demikian ini yang membedakan kita sebagai bangsa yang beragama dan berketuhanan Yang Maha Esa.

Peran Organisasi Kemahasiswaan

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter saat ini, sistem pendidikan kita belumlah siap dan mampu melaksanakannya. Di perguruan tinggi misalnya, sistem perkuliahan dengan sistem satuan kredit semester (SKS) belum menjangkau sisi aplikasi dari pendidikan karakter. Satuan kredit semester ini hanya untuk kegiatan kuliah, praktikum, praktik lapangan, seminar, kapita selekta, penelitian, dan lain-lain. Lalu bagaimana program pembentukan karakter dan adab bisa dilakukan di sistem perguruan tinggi?

Organisasi mahasiswa bisa menjadi salah satu pilihan dari bagian pelaksanaan pendidikan berkarakter dan pembentukan adab. Salah satu tujuan dari organisasi mahasiswa adalah sebagai *moral force* bagi masyarakat. Pembentukan karakter mulia salah satu caranya adalah dengan pembiasaan



suatu *values* dalam sebuah komunitas yang akan menjadikannya mempunyai karakter tertentu sesuai dengan *values* yang diajarkan. Terkait pembiasaan, Prof. Dr. Syamsul Hadi, salah satu guru besar dari UGM pernah mengatakan bahwa “akhlak itu keluar dari diri seseorang dengan sendirinya, tidak lagi harus dipikir untuk berbuat demikian, karena itu telah menjadi kebiasaannya.”

Peran organisasi mahasiswa di sini sungguhlah vital dalam pembentukan karakter, terutama melalui aspek pengembangan sumber daya manusia. Caranya adalah dengan melakukan aktivitas yang berkesinambungan dalam kerangka internalisasi *values* menjadi karakter. Misalnya *values* amanah, dengan menciptakan keadaan ketika personal di dalamnya selalu menjaga amanahnya, baik dalam menjaga harga diri orang lain, harta, maupun kepercayaan. Dengan cara seperti ini diharapkan akan terbangun karakter bagi setiap individu mahasiswa yang masuk di dalamnya dan akan tetap bertahan walaupun yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat di organisasi tersebut.

Jadi, selain sebagai tempat memupuk idealisme dan pengembangan diri mahasiswa, organisasi merupakan tempat terbaik menciptakan pemimpin masa depan bangsa ini sebagai bangsa yang bermartabat dan beradab. Tentunya jika dimaksimalkan di masa depan tidak ada lagi orang-orang yang berani melakukan korupsi, memperkaya diri sendiri, dan kejahatan yang lain andaikan hari ini mereka telah mempunyai karakter dan adab yang dibangun ketika menjadi mahasiswa dan bisa menjaganya setelah bukan lagi menjadi mahasiswa.[]



KEPRIBADIAN DIRI, KEPEMIMPINAN, DAN KEMAJUAN ORGANISASI

Akifan Hanggraito

SEBELUM bertolak langsung ke masalah aplikatif dari soal kepribadian diri, perlu adanya kesamaan sikap dalam melihat kepribadian diri. Tidak mungkin seseorang bisa dengan mantap menjelaskan ini dan itu soal kepribadian diri bila apa yang dibicarakannya ternyata tidak mempunyai kesamaan konsep dengan para pendengarnya. Oleh karena itu, bahasan singkat untuk pembukaan wawasan diperlukan terlebih dahulu, agar kemudian tidak terselip persepsi-persepsi yang dangkal dan sempit terhadap topik ini.

Jika mendengar istilah kepribadian diri, yang langsung tebersit dalam benak adalah masalah ‘bagaimana aku begini’ atau ‘bagaimana aku begitu’. Semuanya serba ke-aku-an. Kepribadian diri seolah hanya mempunyai dimensi tunggal dalam pembangunannya. Tidak begitu salah memang, mengingat arti dari kepribadian itu sendiri adalah “karakteristik dinamis yang dimiliki seseorang yang secara unik mempengaruhi tingkah polahnya sesuai situasi” (Wikipedia).

Namun, yang perlu ditelaah lebih dalam adalah masalah fungsi dari kepribadian itu sendiri. Apakah hanya untuk mengadaptasikan diri saja? Hanya menampik efek negatif ling-



kungan dengan bermimikri terhadap polah sekitar? Kalau boleh sedikit berteori, kepribadian semacam itu bisa dibilang kepribadian bertopeng. Tidak ditemukan suatu nilai kebaikan lain yang terkandung di dalamnya, kepribadian seolah hanya menggambarkan tingkah laku secara deskriptif tanpa memberi nilai.

Kepribadian Ideal

Lalu, yang bagaimanakah kepribadian yang ideal itu? Apakah menuruti mode yang sedang terjadi, ataukah yang sesuai dan cocok saja dengan diri sendiri? Dengan tanpa mempersalahkan jika kepribadian itu bersifat ke-aku-an, kepribadian seseorang seharusnya dapat memberi kebaikan dan manfaat kepada lingkungan tempat dia bernaung. Kesuksesan dari seorang dengan pribadi menawan tidaklah terlihat pada kebaikan yang senantiasa muncul untuk dirinya saja, tapi juga bagaimana orang sekitarnya terinspirasi untuk memoles dirinya masing-masing menjadi semenawan yang mereka lihat. Bahasa populer untuk ini: keteladanan.

Kepribadian setidaknya memiliki dua dimensi pembangunan: ke luar dan ke dalam. Jika kepribadian yang sifatnya intrinsik berfokus pada masalah bagaimana aku bersikap terhadap ini dan itu dalam berbagai situasi, maka kepribadian ekstrinsik menjelaskan bahwa dari apa-apa yang kita lakukan itu harus menjadi teladan dan anutan yang baik, tidak boleh hanya menguntungkan diri saja sementara orang lain di sekitar merasakan akibat buruknya. Kedua hal ini tidak bisa berjalan sendiri, keduanya harus saling bersinergi untuk membentuk kepribadian yang ideal.



Dengan terciptanya kepribadian diri yang ideal, akan dihasilkan formula khusus dalam membentuk suatu lingkungan yang berkualitas. Lingkungan tersebut akan berkembang dengan pesat dikarenakan orang di dalamnya tidak kekurangan anutan untuk dianut, setiap orang di dalamnya akan saling berlomba memperbaiki diri, dan lebih daripada itu, tiap individu akan sadar bahwasanya tidak cukup dirinya sendiri yang berkembang, orang lain pun perlu berkembang sejauh yang sudah kita capai. Budaya maju bersama dan berkontribusi maksimal bagi sekitar akan tercipta pada tahap ini.

Kepribadian Teladan

Selalu dibutuhkan personel yang berkualitas dalam pembangunan suatu organisasi yang mapan. Tentunya, dalam mengembangkan para personel itu dibutuhkan lebih dari sekadar program rutin dan pembekalan-pembekalan biasa saja. Seperti yang kita tahu, tiap elemen dari suatu organisasi bekerja sesuai alur guna mencapai tujuannya. Dalam prosesnya banyak ditemukan hal-hal yang bisa memperlancar atau malah menghambat kinerja. Di sinilah pembangunan dari kepribadian diri itu akan ditempa. Dalam dinamika kehidupan organisasi, diri akan diuji dengan kondisi di luar kebiasaan, menuntut kita untuk bersikap menentukan reaksi yang pas dan dalam tempo yang singkat. Syukur jika ternyata langkah yang ditampilkan tepat. Jika buruk? Lingkungan sekitar yang akan merasakan akibatnya.

Maka dari itu, dibutuhkan ketangguhan dalam masalah ini. Tanpa mengesampingkan faktor teknis lain seperti kepiawaian seseorang berorganisasi, kepribadian diri yang



paripurna merupakan pintu awal untuk menciptakan organisasi yang berkualitas. Karena itulah, dasar yang melandasi pekerjaan seseorang itulah yang memunculkan *will* untuk bekerja, menimbulkan kemantapan hati dalam menghadapi tantangan, dan berpendar menjadi *role-model* untuk dicontoh. Dari Kepribadian dirilah suatu masyarakat organisasi terba-wa dalam tuntunan yang baik mencapai tujuannya.

Lalu, di mana faktor kunci ini harus ditempatkan? Apakah harus ada dalam diri setiap personel organisasi? Idealnya, tentu iya. Namun, dalam praktiknya kita tidak dapat berharap banyak. Sekantung bubuk mesiu tidak mungkin bisa meledak tanpa adanya satu percikan api kecil. Diperlukan suatu pemantik dalam organisasi untuk menciptakan percikan itu. Dialah sang pemimpin. Selain bertanggung jawab secara struktural terhadap pekerjaan para bawahannya, seorang pemimpin juga mempunyai beban moral tersendiri dari segi kepribadian diri. Bagaimana dia bisa mengeluarkan keteladanan dalam bersikap dan bertindak yang siap 'dikonsumsi' oleh para anak buahnya akan menentukan kualitas dari organisasi yang dibimbingnya ke depannya.

Dalam membimbing organisasi dan rekan-rekan kerjanya ke depan seorang pemimpin akan menjadi pemandu dalam setiap permasalahan. Semuanya akan kembali direfleksikan pada pimpinan organisasi itu, sehingga kepribadian yang harus dimilikinya haruslah kokoh. Dia harus bisa menentukan sikap terhadap suatu kondisi yang pengaruhnya haruslah baik untuk semua. Lebih daripada itu, apa-apa yang dilakukan dan dicanangkannya merupakan sumber panutan yang siap dijadikan acuan dasar bagi tindakan rekan-rekan kerjanya.



Dalam suatu organisasi, ketika ada seorang pimpinan dengan mental *pasrah bongkokan*, yang cenderung serba menerima apa pun hasil yang didapat tanpa hitung-hitungan upaya yang dilakukan. Maka, stafnya pun akan merasa bahwa target yang dipatok sudah tercapai, *toh* pimpinannya saja sudah puas seperti itu. Lebih lanjut, jika di kemudian hari ditemukan berbagai macam kondisi yang menekan dan merugikan organisasi, orang-orang dengan kepribadian diri yang lembek akan mulai menyalahkan sistem. Mereka mulai memaki keadaan tanpa ada keinginan untuk mengoreksi diri. ‘Segala yang buruk, datangnya dari luar’, itulah kira-kira yang akan menjadi bingkai pemikiran ke depannya.

Oleh karena itu, suatu figur, yang dapat mengolah kapasitas pribadinya, dan dapat memancarkan teladan yang patut dicontoh, akan dapat membawa organisasi menuju tujuan yang diimpikan. Seseorang dengan kepribadian yang menarik, dengan kemampuan organisasi yang baik akan menjadi pijakan bagi rekan-rekannya untuk melangkah ke depan menyongsong tujuan bersama yang telah dirumuskan.

Kemajuan organisasi tidak bisa dinilai sebagai panggung pergelaran dari satu orang berkepribadian paripurna saja. Namun, organisasi perlu setidaknya satu orang paripurna itu untuk menjadi sutradara pembangunan dari para aktor lain yang mungkin sebagian besar belum sadar bahwa dia sedang berada di panggung untuk mementaskan pertunjukkan besar yang ditunggu-tunggu khalayak luas.[]



MENERPA DIRI LEWAT KOMUNITAS

Yogi Achmad Fajar

MENJADI mahasiswa merupakan sebuah nikmat. Konon, masa yang paling menentukan jati diri seseorang adalah saat menjadi salah satu civitas akademika di perguruan tinggi ini. Selain posisinya yang memiliki ekspektasi besar dari masyarakat karena dipandang sebagai intelektual muda bisa bermanfaat banyak dengan idealismenya, tetapi juga kebebasan yang dimilikinya.

Dunia kuliah atau mahasiswa jelas berbeda dengan siswa saat sekolah. Tak ada lagi jadwal yang tersusun rapi dan monoton; masuk jam tujuh pagi, istirahat, dan pulang di atas jam satu siang. Mahasiswa tidak berangkat Senin sampai Jumat mengejar perkuliahan. Pasaunya, dalam seminggu waktu yang diperlukan rata-rata tiga atau empat hari. Itu pun dalam satu hari memungkinkan hanya satu mata kuliah dengan waktu dua hingga tiga jam saja.

Kondisi itulah yang membuat mahasiswa memiliki kebebasan dengan waktu luangnya. Lantas, muncul pertanyaan besar. Dengan banyaknya waktu luang tersebut, kegiatan apa yang ideal dan bermanfaat dilakukan mahasiswa? Jawaban yang terlontar pastinya bervariasi. Namun, setidaknya dalam 24 jam waktu yang ada tak terbuang percuma. Memaksimal-



kan potensi dan aktualisasi diri melalui kegiatan mengasah *soft skill* adalah salah satu pilihan bijak.

Pasalnya, selain *hard skill* yang didapat dalam kurikulum perkuliahan, *soft skill* adalah elemen penting (bahkan terpenting) untuk menghadapi dunia kerja dan hidup bermasyarakat. Maka, tak berlebihan jika ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa apa yang didapat dari pengalaman *soft skill* lebih banyak digunakan daripada pengalaman *hard skill* semasa kuliah. Dan *soft skill* tersebut hanya bisa didapat melalui sebuah kegiatan kemahasiswaan dan komunitas.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial atau istilah lainnya *zoon politicon*. Manusia ditakdirkan untuk tak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan manusia lainnya. Fakta sejarah mencatat nenek moyang kita Nabi Adam sudah membuktikannya.

Melalui interaksi antarmanusia itulah pembelajaran yang sebenarnya. Kemampuan berkomunikasi, membangun hubungan, kerja sama, tanggung jawab, solidaritas, komitmen, negosiasi, tidak berpikir individualis, manajemen konflik, dan aspek *soft skill* lainnya menjadi mata kuliah secara otomatis. Kehidupan adalah kelas yang kadang tak kita sadari.

Banyak Pilihan

Alternatif pilihan kegiatan kemahasiswaan sangat banyak baik intrakampus maupun ekstrakampus. Mulai dari tingkat jurusan, fakultas, hingga tingkat universitas melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM) dan berbagai organisasi atau komunitas yang ada bisa menjadi sarana empuk me-



maksimalkan potensi serta eksistensi diri untuk mengisi waktu luang.

Setiap orang terlahir dengan bakat, potensi, dan keahlian yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita mengetahui “sesuatu” yang kita miliki tersebut. Mencari, mengenal, dan memahami potensi diri adalah langkah awal yang sejatinya dilakukan. Hal ini penting lantaran bisa menentukan kegiatan apa yang bisa dilakukan sesuai passion (minat).

Misalnya, mahasiswa yang memiliki kemampuan dan bakat dalam bidang tarik suara bisa masuk dalam UKM Paduan Suara. Bila menyukai bidang tulis-menulis, bisa aktif dan mengaktualisasikan diri dalam organisasi atau komunitas pers mahasiswa. Sedangkan bagi mahasiswa yang suka berorganisasi dan memiliki jiwa kepemimpinan, Badan Eksekutif Mahasiswa bisa menjadi saluran tepat. Masih banyak lahan kegiatan kemahasiswaan yang mengakomodasi semua bidang dari olahraga, penelitian, keagamaan, seni, fotografi, sampai musik.

Semua kegiatan tersebut merujuk pada satu benang merah, mengasah soft skill. Apa gerakan yang dimaksud soft skill itu sendiri? Secara umum, merupakan sebuah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (interpersonal skills) dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri (intrapersonal skills) yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal (Dewajani, 2010).

Lebih daripada itu, memasuki dan terjun dalam aktivitas organisasi atau komunitas adalah sebuah ikhtiar. Ikhtiar dalam rangka investasi keilmuan, pengalaman, dan perluasan silaturahmi (baca: koneksi). The power of silaturahmi sangat



akan terasa dalam kehidupan kelak setelah lulus dan hidup bermasyarakat.

Jadi, apa masih mau menjadi mahasiswa berlabel mahasiswa “kupu-kupu” alias kuliah pulang-kuliah pulang, kemudian tidur di kos, dan nongkrong-nongkrong tak jelas bareng teman? Pilihan ada di tangan masing-masing.[]



RUANG BELAJAR

Wawan Dinawan

RUANG BELAJAR adalah permainan otak. Jika bermain dengan otak, maka yang paling penting adalah seberapa banyak informasi yang didapat dan bagaimana mengolah informasi tersebut. Ruang belajar tidak ada kaitannya dengan seberapa banyak ia membaca buku atau mendengarkan ceramah karena hal tersebut hanya akan menambah informasi. Lebih dari itu, ruang belajar mengarah pada bagaimana informasi tersebut dapat diolah dan berdaya guna. Kita tidak membicarakan fakta, namun kita membicarakan di balik fakta dan untuk apa fakta tersebut.

Lebih banyak kita temukan kasus ruang belajar yang tinggi pada para penemu dan inovator-inovator. Contoh sederhana yang bisa disampaikan adalah bagaimana Isaac Newton belajar. Faktanya adalah Isaac Newton kejatuhan apel dan itu merupakan sebuah informasi; apel jatuh. Namun, informasi apel jatuh ternyata menimbulkan pertanyaan dalam diri Isaac Newton, “Mengapa apel jatuh ke tanah, bukan ke atas?” Informasi dipertanyakan dan kemudian diolah dengan hipotesis sederhana namun menjadi dasar bahwa ada daya tarik Bumi yang belakangan dikenal sebagai *gravitasi*.

Kisah yang lebih menarik adalah kisah tentang Archimedes. Mandi adalah sesuatu yang sangat biasa dan alami.



Air keluar dari bak mandi adalah hal biasa, tidak ada yang aneh dari itu. Air tumpah adalah fakta. Lebih dari sekadar fakta, Archimides menganggap tumpahnya air memiliki makna yang dalam. Maka, muncullah Hukum Archimides.

Dalam perjalanan organisasi apa pun, ruang belajar ini yang cukup penting untuk kita kembangkan bersama-sama. Kondisi eksternal yang pasti berubah dari masa ke masa mau tidak mau menuntut adanya penyikapan yang berbeda. Namun, tujuan tidak boleh berubah, namun cara yang harus berubah. Dalam kondisi yang berbeda dengan menggunakan cara yang sama tidak akan memberikan hasil yang sama.

Kondisi eksternal yang tidak bisa dikendalikan harus mendapat penyikapan yang sesuai dengan kondisi internal organisasi. Niat hati memeluk bulan namun apa daya tangan tidak sampai. Mengapa harus dengan tangan jika teknologi kita bisa sampai ke sana? Ini yang saya maksud dengan ‘mencapai hasil yang sama dengan cara yang berbeda’. Bahasa yang sering kita kenal adalah *thinking out of the box*, berpikir di luar kotak. Jangan seperti katak dalam tempurung yang tidak tahu dunia luar, yang kita tahu hanya diri kita sendiri dan kelompok. Ingatlah bahwa bumi Allah itu luas dan ilmunya pun sangat luas. Bicara tentang ruh saja, kita hanya diberikan ilmu yang sedikit.

Di sinilah letak penting membiasakan berpikir. Orang-orang ekonomi, menurut saya, adalah orang yang paling suka berpikir. Bagaimana tidak? Bayangkan jika inflasi naik sedikit saja, orang atau perusahaan akan mengambil sikap. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang dikeluarkan oleh bursa efek (di Indonesia adalah BEI) sangat bergantung pada senti-



men para investor. Dalam bursa, selalu ada hal yang mendorong investasi dan menjatuhkannya. Kita ingat pada krisis tahun 2008 saat saham anjlok hanya karena keadaan ekonomi Amerika Serikat yang bergejolak. Krisis ekonomi Amerika Serikat tidak bisa kendalikan oleh perusahaan, namun perusahaan melakukan penyikapan agar tujuan perusahaan tetap tercapai.

Oleh karena itu, ekonomi dan bisnis selalu berkaitan dengan strategi memenangi persaingan. Mereka bermain dalam sebuah kondisi di mana kemenangan adalah syarat mutlak bertahan dalam dunia bisnis. Tidak peduli pada samudra merah atau samudra biru, semua memiliki tujuan yang sama yakni memenangi persaingan.

Inilah orang-orang ekonomi dan bisnis, selalu berada pada ruang yang tidak bisa dikendalikan yang memaksa mereka belajar dan membuka cakrawala pemikiran mereka. Mereka tidak hanya menerima informasi namun memainkan informasi yang diberikan.

Kita tidak menyangsikan adanya *Nasrun min Allah* “pertolongan Allah” dengan banyaknya ibadah dan amal ruhiyah yang kita lakukan. Namun, mengandalkan itu saja tidak cukup. Maka, ada yang mengatakan bahwa orang berilmu itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Ada ruang kekuasaan Allah dan ada juga ruang ikhtiar. Lakukan apa yang kita bisa sesuai sunnatullah dan jika kemampuan kita tidak sampai, maka ruang pertolongan Allah yang akan bermain. Bukan sebaliknya, tidak bergerak sama sekali.

Allah sebenarnya telah memberikan ruang belajar kepada kita, para aktivis mahasiswa. Tidakkah kita pahami bahwa



kisah-kisah yang Allah sampaikan melalui Al-Qur`an adalah sarana belajar yang baik? Bahkan Allah menyampaikan pada surat Yusuf tentang kisah terbaik. Tidakkah kita mempelajarinya dan mengambil ibrahnya, wahai aktivis muda?[]



JALAN CINTA PARA AKTIVIS

Seztifa Miyasyiwi

BUKANLAH sebuah jabatan dan kedudukan yang kita harapkan, kita hanya ingin memenuhi janji untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Ah, mungkin kita terlihat berpura-pura tak cinta harta benda, tetapi ya inilah diri kita dan perjuangan kita. Jalan ini tidak mudah, Kawan. Jalan ini, ya jalan ini sampai akhirnya mempertemukan kita semua di sini. Di jalan ini kita bersama berjuang, ah terlalu sepele jika dibandingkan para pejuang, namun kita sering menggunakan kata ini untuk membangkitkan rasa semangat kita untuk tetap berada di jalan ini.

Hanya perlu keikhlasan untuk menjalani jalan ini, keikhlasan untuk berpikir lebih, keikhlasan untuk berkorban lebih, keikhlasan untuk disakiti lebih, dan keikhlasan untuk berlapang dada lebih. Inilah hal yang diperlukan untuk menjalani jalan ini. Apakah jalan ini sebegitu sulit untuk dilalui?

Mengapa persyaratannya begitu berat dan terlihat sangat menyakitkan? Apa balasannya?

Balasannya hanya ridha Ilahi. Ya, balasannya hanya itu saja. Jika kau mengharapkan lebih maka bukanlah di jalan ini tempatnya. Silakan kaucari jalan lainnya. Jika kaudapati aku mendapatkan hal-hal yang lainnya ini merupakan bonus. Setelah lelah dan letih seharian menjalankan sebuah kegiatan, bonusnya itu tak lebih nasi bungkus untuk makan siang atau



makan malam. Anehnya, setelah kegiatan itu berlangsung kita merasakan senang dan bahagia, padahal setelah kegiatan itu kita harus kembali lagi menjadi mahasiswa, diterjang oleh beberapa tugas-tugas dan ujian-ujian mata kuliah. Kadang kala kita harus memutar otak bagaimana semua tugas-tugas itu dapat dikerjakan dengan baik, namun amanah di organisasi juga berjalan tak kunjung dengan optimal. Atau tugas kita lainnya menjadi anak bagi orangtua tercinta, dan teladan selaku kakak bagi adik-adik kita.

Semuanya harus berlangsung di waktu yang bersamaan, hingga terkadang aku berpikir bahwa kita menggadaikan masa muda kita dengan perjuangan ini. Namun, aku tahu bahwa kita ternyata sedang dijaga oleh-Nya dari perbuatan-perbuatan sia-sia, dari perbuatan-perbuatan yang justru akan menambah dosa.

Sungguh perjalanan ini sangat melelahkan. Tetapi, kawan, entah mengapa kita pilih jalan ini. Aku pun sempat bertanya kepada diriku mengapa jalan ini yang kupilih. Karena cinta, ya karena cinta sehingga kita saling terhubung dalam jalan ini, dengan ikatan atas nama cinta untuk tetap terus bersama. Emas menggunung dan mahkota bertahtakan beryan pun tidak akan sanggup membayar ini semua. Namun, aku masih heran, mengapa kita masih mau berada di jalan ini. Aku menyebutnya jalan cahaya, di mana jalannya yang panas, dan aku berharap ada angin surga yang berhembus untuk sekadar menyejukkan hati ini.

Bahkan orang-orang di sekitar kita pun tidak menghargai, tetapi masih saja kita terus tetap berada di jalan ini. Tidak sedikit mereka mencemooh diri kita. Banyak yang berkata ini



hanyalah pelarian dari akademik kita yang buruk. Atau banyak yang berkata ini adalah manuver agar kita dapat terkenal dengan cepat. Atau yang lebih menyakitkan lagi banyak yang berkata bahwa kita hanyalah sekelompok orang-orang yang kurang kerjaan. Sungguh miris, Kawan, ya semua itu tidaklah berbayar dan hanya atas dasar cinta kita melakukannya.

Mereka tidak tahu kalau kita berjuang untuk nilai akademik, sembari harus memikirkan program-program kerja yang telah disusun, mengerjakan tugas-tugas di sepiunya malam, berselimutkan bintang temaram yang menenteramkan hati, dan tidur bersama senandung nyanyian malam.

Matematika kita sungguh membingungkan, siapa diri kita dan siapa mereka. Kita tidak terhubung dengan ikatan darah, namun mengapa kita memperjuangkannya, memikirkannya, mau bersusah payah, dan membantunya? Lantas apa yang kita dapatkan? Kita hanya tersenyum jika pertanyaan itu terlontar. Sungguh matematika yang sangat membingungkan.

Kawan, bekerja di saat yang lain terlelap, bersemangat di saat yang lain mengeluh. Berteriak di saat yang lain diam, dan berlari di saat yang lain berjalan. Angkuhnya kita sering bersuara bahwa jalan inilah yang sangat membutuhkan kita. Namun ternyata, Kawan, kitalah yang sebenarnya membutuhkan jalan perjuangan ini. Untuk mencari ridha-Nya, kitalah yang memerlukan jalan ini untuk merasakan anginnya berjuang, kitalah yang membutuhkan jalan ini untuk senantiasa saling terhubung, dalam ikatan yang disebut dengan ukhuwah.



Terkadang lelah itu saling menghinggapi, terkadang jenuh itu saling menghinggapi, terkadang air mata itu tak tertahankan dan peluh terus menetes. Namun, aku tahu pasti kita akan selalu ada untuk menggenggam tangan ini, untuk memberikan sandaran, untuk memberikan senyuman paling hangat, dan untuk menghapus air mata ini. Memberikan cinta penawar luka.

Biarkan mereka, yang tidak tahu apa-apa terus mencemooh kita, biarkan mereka terus menghakimi kita, biarkan mereka terus menyudutkan kita, namun aku tahu pasti kau dan aku, kita akan terus berjalan di jalan ini, mencari puing-puing berserakan, menyusunnya dalam sebuah kumpulan mozaik indah untuk agama, untuk almamater, dan untuk bangsa kita. Untuk sekadar sebuah torehan indah dalam episode hidupku.

Inilah jalan kita, jalan cahaya yang penuh cinta, aku lebih senang menyebutnya dengan jalan cinta, karena hanya atas dasar inilah kita, aku dan kau, dapat berjalan bersama, dengan matematika yang sangat membingungkan.[]



SUMPAH PEMUDA ISLAM ANTIKORUPSI

Abdul Basir

KEJUJURAN merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan lain yang menjadi dasar ukuran kepercayaan seseorang di mata manusia. Kejujuran memiliki nilai tersendiri bagi setiap orang sesuai dengan profesinya. Kejujuran adalah kunci kehormatan para pejabat pemerintahan. Bagi seorang hakim, kejujuran adalah kunci kesaksian. Adapun bagi para pedagang, kejujuran adalah kunci keberkahan dari hasil yang diusahakannya.

Di antara faktor yang menyebabkan Rasulullah Saw berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat dan akhlaknya yang terpuji. Salah satu sifatnya yang menonjol adalah kejujuran beliau, sehingga beliau mendapat gelar *al-amin*, “orang yang dapat dipercaya atau jujur”.

Banyak orang mencita-citakan Indonesia menjadi bangsa yang berkarakter. Namun, saat ini nilai-nilai kejujuran sulit ditemukan. Tindak pidana korupsi mengakar dari pemerintahan pusat hingga ke daerah, bahkan sampai tingkat desa. Apakah itu yang disebut bangsa berkarakter? Relakah kita bangsa Indonesia dikatakan sebagai bangsa yang berkarakter dan berperilaku korup?



Fakta yang terjadi di lapangan cukuplah menjadi energi positif bagi kita untuk terus berupaya memerangi tindakan tercela tersebut.

Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pada hari tersebut, sejarah mencatat para pemuda Indonesia yang berasal dari seluruh daerah mengikrarkan sebuah sumpah sebagai simbol persatuan bangsa. Pemuda Indonesia saat itu berikrar mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Semangat persatuan dan nasionalisme inilah yang saat ini mulai pudar.

Lantas, kontribusi apa yang bisa kita berikan, selaku pemuda Islam, untuk bangsa Indonesia?

Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa. Apalagi bagi para mahasiswa yang merupakan generasi intelektual yang nantinya akan memimpin negeri ini. Kalau dulu kita mengenal Sumpah Pemuda, maka sepertinya saat ini pun pemuda Muslim perlu berjanji menghindari perilaku korup. Apalagi saat nanti kita berkiprah sebagai pelayan rakyat menjadi pejabat negara.

Dengan berpegang teguh pada sumpah itu, semoga pada saat nanti kita memegang kendali pemerintahan, bangsa kita tidak lagi dikenal sebagai bangsa korup, melainkan dikenal sebagai bangsa yang sejahtera buah dari kejujuran para pemimpinnya yang amanah dalam menjalankan tugasnya. Semoga Allah Swt senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, para pemuda Islam yang berikrar menghindari perilaku korup.[]







Awan Hitam Perubahan

REFORMASI YANG (BELUM) USAI

Maman Abdurrakhman

TAHUN 1998 mungkin menjadi titik balik romantisme gerakan mahasiswa yang mengawali Indonesia (kembali) menuju sistem demokrasi setelah lebih dari 32 tahun lamanya berada dalam era otoritarianisme Orde Baru. Terjadi restrukturisasi sistem pemerintahan, dan kebebasan berpendapat tidak lagi diharamkan. Gelombang demokratisasi ketiga yang awalnya diprediksi tidak akan menyentuh Indonesia, sampai juga ke negeri ini.

Meski reformasi sudah berlangsung, nyatanya hasil yang didapat jauh dari memuaskan. Berbagai lembaga negara dan peraturan memang berhasil dibuat akan tetapi implementasinya masihlah sebatas nominal. Undang-undang masihlah kumpulan ketentuan di atas kertas sementara kenyataan di lapangan adalah kegagalan dalam bentuk lain. Peradilan terkesan “tajam ke bawah dan tumpul ke atas”.

Beragam ketentuan mengenai HAM memang disematkan dalam undang-undang bahkan disahkannya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM seolah-olah menegaskan kepada masyarakat bahwa pemerintah memang berniat menegakkan hak asasi warga negaranya. Tak tanggung-tanggung ada sepuluh pasal mengenai HAM diatur dalam UUD RI 1945 ditambah dengan pasal-pasal yang secara tersirat menentu-



kung penegakan HAM. Secara normatif pemerintah berhasil 'menegakkan' hak asasi warga negara melalui regulasinya.

Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan pengakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum."* Pasal tersebut memberikan gambaran dua sisi mata uang. Pada sisi yang satu, hanya dengan membaca rumusan pasal ini orang akan merasa aman dan tenang karena secara normatif pemerintah memang benar-benar membuktikan kesungguhannya. Akan tetapi, ketika melihat sisi yang lain, maka akan kelihatanlah keluarga korban-korban HAM dibiarkan menunggu kepastian hukum bagi sanak saudaranya, atau rakyat yang dibiarkan terlunta-lunta mengikuti persidangan yang lambat dan berbiaya mahal, serta rakyat yang menjadi korban ketidakadilan atas putusan pengadilan terhadap suatu perkara.

Kita tentu masih ingat kasus yang menimpa Nenek Minah pada tahun 2009 lalu yang divonis 1,5 bulan kurungan dengan masa percobaan 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto akibat perbuatannya mencuri tiga buah kakao dari lahan yang dikelola oleh PT RSA. Belum lagi proses peradilan yang memakan waktu hingga berbulan-bulan (akhir Agustus-Oktober) semakin memperlihatkan buruknya penegakan hukum dan keadilan di negeri ini. Proses hukum yang cepat dan murah adalah hak asasi semua orang namun bagi Nenek Minah, hal tersebut seakan jauh dari hadapannya. Ia bahkan harus menjual beberapa barang di rumahnya demi menjalani proses persidangan.



Berikutnya kasus pencurian *voucher* pulsa Rp 10.000 oleh bocah berumur 14 tahun. Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dia dijerat dengan delik pencurian dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Menahan dan mengadili seorang bocah di bawah usia dewasa memang tak dilarang oleh UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Akan tetapi, apabila membandingkan tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang diberikan betapa tidak masuk akal penegak hukum membawa perkara pencurian tersebut ke pengadilan.

Selanjutnya, kasus mobil yang dibakar warga setelah menabrak seorang nenek hingga tewas di SDN 04 Rambut-an, Ciracas, Jakarta Timur menunjukkan pada kita fenomena penghakiman massal karena ketidakmampuan aparat dalam meredam emosi warga atau menjadi bagian ketidakpercayaan warga terhadap penegakan hukum ala aparat.

Bagaimana dengan kasus Nazarudin yang bisa melenggang bebas, layaknya penjahat kerah putih yang sangat licin dan boleh jadi terlindungi karena kepentingan yang lebih besar lagi? Pemerintah dibuat kalang kabut dan menghabiskan energi padahal ini seharusnya merupakan pekerjaan rutin penegak hukum. Jika teroris saja bisa diburu kenapa sekian banyak koruptor bisa lari dan mengaduk-aduk hukum di Indonesia?

Lain lagi dengan cerita Prita Mulyasari, kisah perjuangan menegakkan keadilan yang sebelumnya direspons publik lewat “Gerakan Koin untuk Prita”. Putusan Mahkamah Agung untuk menghukum Prita memperlihatkan terabaikannya keadilan substantif; fungsi yudikatif terkesan hanya dijadikan terompet undang-undang belaka.



Lantas timbul pertanyaan: ke mana perginya perangkat penegak hukum negeri ini?

Beberapa kasus di atas merupakan secuil dari banyak kasus lain yang mengebiri rasa keadilan. Ketika reformasi dijadikan jargon dalam mengusung keadilan—sebagai antitesis atas kesewenang-wenangan pemerintahan Orde Baru—justru keadilan itu sendiri terasa semakin jauh dari kehidupan hukum negeri ini. Keadilan yang merupakan hak dasar setiap orang hanya berlaku nominal bahkan semantik di atas kertas. Sementara di luar kertas ketidakadilan seperti momok bagi setiap orang. Maka, dalam hal ini, lakon reformasi (belum) usai.[]



ANARKISME DAN KONFLIK HORIZONTAL

Atiudina

BELUM selesai Indonesia bebas dari ancaman bom, bermunculan aksi anarkis dan konflik horizontal di masyarakat. Satu kasus belum selesai tertangani, muncul kasus yang lain di tempat berbeda. Sebagai negara yang memiliki keragaman majemuk, Indonesia memang sangat rawan akan konflik-konflik kekerasan horizontal. Baik hubungan etnis, agama, golongan, bahkan perbedaan prinsip dan ideologi. Kenyataan ini semestinya menjadi perhatian yang besar, baik bagi masyarakat secara keseluruhan maupun bagi para pengambil kebijakan.

Akar Anarki

Terlepas dari apa pun motifnya, setiap kekerasan hanya memberikan dampak kerusakan dan kerugian pihak lain dan diri sendiri. Beberapa kasus yang terjadi seputar isu-isu dan konflik horizontal menunjukkan belum dewasanya masyarakat kita menghadapi perbedaan.

Berbicara tentang perbedaan golongan dan aksi anarkis, kita tidak bisa melepaskan diri dari kata prasangka dan diskriminasi. Keduanya merupakan sumber dari terjadinya tindakan-tindakan anarki. Prasangka adalah sebuah sikap (bi-



asanya negatif) terhadap anggota kelompok tertentu, semata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Shelton menyebutkan, terlepas dari bentuk maupun sasarannya, bagaimanapun juga prasangka sungguh nyata dan merusak, bahkan dalam bentuk yang paling halus sekalipun.

Sedangkan diskriminasi dapat didefinisikan sebagai tingkah laku negatif yang ditunjukkan kepada anggota kelompok sosial yang menjadi objek prasangka. Diskriminasi merupakan perwujudan prasangka dalam tingkah laku. Prasangka dan diskriminasi inilah yang kemudian melahirkan konflik sosial antarkelompok. Jika konflik antarkelompok ini tidak terkelola dengan baik, maka akan sangat berpotensi menyulut tindakan anarki ketika mendapati kondisi yang memungkinkan.

Konflik antarkelompok dalam jangka panjang akan menumbuhkan kategorisasi sosial, yaitu kecenderungan untuk membagi dunia sosial, yang mengandung efek 'kita versus mereka'. Fenomena 'kita versus mereka' selanjutnya memperkuat adanya teori identitas sosial. Identitas sosial akan melekat lama pada seorang individu, karena ia sangat berkaitan dengan pengalaman-pengalaman histori yang dialami, baik secara pribadi (diwariskan dari keluarga) maupun kolektif kelompok. Kondisi ini yang selanjutnya rawan memicu konflik-konflik di masa mendatang. Ketika identitas sosial telah melekat kuat, baik pribadi maupun kolektif, maka suatu tindakan diskriminasi bisa muncul hanya dengan melalui dogma. Tidak lagi menunggu adanya peristiwa nyata berupa konflik.



Kondisi ‘kita versus mereka’ selamanya akan mengandung prasangka-prasangka terhadap kelompok *out-group*. Dan diskriminasi, cepat atau lambat, akan mencapai klimaks dengan sebuah konflik, baik penyerangan maupun anarkisme. Yang demikian ini akan sangat laten terjadi jika masing-masing kelompok tidak pandai menempatkan diri.

Saran Antisipatif

Berkaitan dengan beberapa konflik horizontal di Indonesia, pemerintah semestinya bertindak. Selaku pihak penengah, pemerintah seyogianya meninjau penyebab dari munculnya aksi anarkis. Pemerintah harus berada pada posisi tidak memihak. Penyelidikan sebuah kasus semestinya mengedepankan sebab akibat yang menyertai kejadian.

Tindak anarkis ini jelas harus diusut, dan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun, perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk melakukan pengusutan secara komprehensif terhadap kasus ini. Oleh karena itu, pemerintah harus menangani segala konflik horizontal di negeri ini secara adil dan merata. Tidak membeda-bedakan korban konflik itu seperti yang masih terjadi saat ini.

Tidak relevan lagi menyebut kalangan minoritas selalu tertindak, dan yang mayoritas pastilah penindas. Stereotip semacam ini lebih sering melahirkan ketidakadilan baru dan stigma pada kalangan yang kadung dianggap penyebab keonaran di masyarakat. Tidak bisa tidak, pengusutan yang terkesan condong ke salah satu pihak lantaran tekanan pihak asing, tidak akan menuntaskan akar persoalan. Justru yang muncul adalah tindak anarkis yang jauh lebih besar di masa mendatang.[]



MENYOAL KARAKTER BANGSA

Yogi Achmad Fajar

PEMBERITAAN media mengenai negara kita tercinta Indonesia ini mesti diakui hari demi hari senantiasa membuat kita mengerutkan dahi. Bagaimana tidak, pemberitaan yang tersaji lebih banyak sisi boroknya daripada sisi prestatif anak bangsa ini.

Korupsi, suap-menyuap, pengingkaran terhadap konstitusi, sikap ketidakprofesionalan politisi, kisruh sepak bola, konflik, intrik politik, krisis moral, ekonomi, dan sumber daya manusia (SDM), semua ini menjadi sekelumit masalah yang sedang melanda bangsa ini. Lantas, muncul tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi dengan Indonesia? Pertanyaan ini mencuat sebagai konsekuensi logis atas jiwa kritis manusia.

Meski pertanyaan ini terkesan sederhana, tetapi akan memunculkan berbagai variasi jawaban dari berbagai perspektif. Hemat penulis, kondisi Indonesia acak marut ini salah satunya tidak terlepas dari karakter bangsa yang tengah menjauh bahkan terbilang menghilang dari bangsa Indonesia.

Karakter bangsa atau identitas bangsa dalam tataran antropologi dipandang sebagai tata nilai budaya dan keyakinan yang mengejawantah dalam kebudayaan suatu masyarakat dan memancarkan ciri-ciri khas keluar sehingga dapat di-



tanggapi orang luar sebagai kepribadian masyarakat tersebut (Saifuddin dan Karim, 2008). Berbicara karakter bangsa tentunya mempunyai konotasi positif sebagai sebuah nilai-nilai atau sifat-sifat luhur yang dimiliki sebuah bangsa.

Oleh karena itu, kondisi bangsa Indonesia saat ini belumlah mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Karakter bangsa Indonesia merupakan cerminan dari manusia-manusia Indonesia secara keseluruhan. Singkatnya, bila bangsa ini memiliki ketidakberesan dengan karakternya, dipastikan hal ini bersumber dari karakter manusia Indonesia sendiri mulai dari rakyat, siswa, guru, mahasiswa, dosen, rektor, pejabat, anggota dewan, menteri, hingga presidennya.

Menarik bila mengutip apa yang disampaikan Mochtar Lubis mengenai karakter manusia Indonesia. Lubis (1981) secara komprehensif mengemukakan beberapa karakter buruk manusia Indonesia. Karakter yang dimaksud antara lain adalah sikap tak bertanggung jawab, hipokrit, dan ingin cepat berhasil tanpa kerja keras.

Tidaklah mengherankan bila korupsi dan suap-menyuap melekat dalam keseharian manusia Indonesia. Sebuah mental 'instan' yang ingin cepat berhasil tanpa kerja keras, inginnya jalan pintas, dan melupakan sebuah proses. Ironisnya, sifat ini menjalar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Kondisi alam Indonesia yang *gemah ripah loh jinawi* disinyalir menjadi salah satu faktor lain. Kemurahan Tuhan Yang Mahakaya kepada Indonesia dengan kekayaan alam dan



iklimnya yang tropis berperan terhadap pembentukan mental masyarakat Indonesia.

Subur dan strategisnya tanah Indonesia tidak berbanding lurus dengan karakter masyarakat dalam memaksimalkan potensi tersebut. Alih-alih bermental ulet, etos kerja dan semangat juang (*fighting spirit*) yang tinggi, masyarakat Indonesia dikenal lebih santai dan merasa berkecukupan.

Berbanding terbalik dengan karakter masyarakat negara empat musim dan miskin sumber daya alam. Korea Selatan bisa menjadi model nyata. Korea Selatan dengan segala keterbatasan sumber daya alamnya dan memiliki musim dingin yang panjang dan beku telah membentuk karakter bangsa dan masyarakatnya ulet, etos kerja tinggi, dan disiplin (Yang, 2005).

Dengan memiliki landasan karakter bangsa yang kuat tersebut, Korea Selatan melejit menjadi salah satu negara kekuatan ekonomi Asia bahkan dunia. Padahal, dekade 1950-an Korea Selatan dikenal dengan negara miskin. Stagnasi ekonomi dan kemiskinan menjadi pemandangan Korea Selatan saat itu.

Kehilangan karakter bangsa atau jati diri bangsa adalah sebuah permasalahan besar. Kekokohan eksistensi sebuah bangsa bisa dilihat dari seberapa besar karakter bangsa yang dimiliki. Tidak heran bila syair lagu Indonesia raya lebih dahulu menekankan "bangunlah jiwanya" (baca: karakter) baru setelah itu "bangunlah badannya".[]



MENGKHIANATI REPUBLIK

M. Adi Nugroho

ANGKA Rp1,138 triliun pernah menjadi tanda kegusaran masyarakat kita. Betapa tidak, dengan keangkuhannya wakil rakyat di parlemen tidak menggubris aspirasi masyarakat dan terus melanjutkan rencana pembangunan gedung DPR yang jauh dari rakyat. Bahkan, seruan Presiden RI untuk menunda atau bahkan membatalkan pun dianggap angin lalu.

Sejauh ini, rencana membangun gedung DPR memang surut. Tapi, sebagian masyarakat percaya, para wakil rakyat terhormat itu tidak benar-benar membatalkan niatnya untuk membuat gedung baru. Kiranya patut dipertanyakan apakah ide gedung baru wakil rakyat itu aspirasi rakyat ataukah bukan. Entah mengapa DPR masih menghendaki hadirnya gedung baru mereka ketimbang memperjuangkan rakyat. Belum lagi kasus korupsi, indisipliner hingga asusila, membuat wibawa anggota dewan semakin merosot tajam dan mungkin melecehkan bangsa. Seharusnya anggota dewan menyadari bahwa republik ini segala hal kebijakannya harus berorientasi pada rakyat atau publik.

DPR seakan semakin membuat batas antara dirinya dan publik masyarakat. Rencana gedung DPR baru yang menjulang tinggi semakin mengukuhkan pengastan antara rakyat



dan wakil rakyat. Lebih menyakitkan lagi setelah Ketua DPR Marzuki Alie berpendapat bahwa urusan gedung tersebut cuma orang-orang elite yang paham, dan rakyat biasa tidak bisa dibawa. Lebih lanjut ia menegaskan rakyat tidak bisa menjangkau pemikiran terlalu mendalam soal pembangunan gedung. Sebuah pelecehan republik karena sang dewan memarginalkan protes kalangan yang memilihnya. Mereka justru lupa bahwa DPR sebenarnya haruslah kembali pada rakyat, hakikat dari republik ini.

Mengkhianati Republik

Hakikatnya, wakil rakyat adalah mereka yang memahami secara utuh makna dari nama yang di usung negara ini, yaitu republik. Spirit republik yang semakin hari semakin hilang adalah penyebab negara ini dekat dengan negara gagal. Buktinya, adanya perpecahan yang memunculkan pemekaran wilayah di mana-mana; konflik kekerasan; kasus mega korupsi Century yang hilang ditelan Bumi, sampai juga polemik pembangunan gedung DPR yang baru.

Sematan republik dalam negara kita bukan sekadar *taken for granted*. Bung Hatta, bapak republik ini, pernah menyatakan bahwa republik harus berfondasi pada dua hal, yaitu demokrasi dan politik yang bermoral. Politik yang bermoral bagi Bung Hatta adalah politik yang memiliki fungsi intrinsik yang mulia, yakni perbuatan kenegaraan demi kesejahteraan negara dan masyarakat.

Sekarang ini, spirit republik yang digagasoleh Bung Hatta seakan hilang sirna. Pemerintah kita seakan jauh dari makna politik yang bermoral apalagi intrinsik pada kese-



jahteraan. Secara esensial, Indonesia masih jauh dari republik karena jauhnya keberpihakan pada rakyat serta bobroknya moralitas bangsa.

Dalam konteks negara modern saat ini, republik terdiri dari beberapa landasan pokok.

Pertama, republik adalah konsep dari rakyat untuk rakyat dan selalu kembali pada rakyat. Masyarakat sebagai kepentingan umum adalah prioritas; dan kepentingan privatnya adalah untuk melayani kepentingan publik (masyarakat). Keberadaan dewan di parlemen seharusnya berbanding lurus dengan kondisi masyarakat. Sayangnya, yang terjadi masih kebalikannya.

Forum masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Fomappi) pernah menyampaikan informasi bahwa biaya kunjungan luar negeri selama 2010 adalah mendekati Rp163 miliar. Kemudian biaya studi banding DPR adalah Rp 73,5 miliar atau 42% dari alokasi dana untuk prolegnas sebesar Rp173,4 miliar. Sungguh menyakitkan melihat kenyataan tersebut bahwa dana berhambur tak mengalir ke rakyat.

Kedua, lembaga kepartaian yang ada dalam parlemen berfungsi sebagai penyalur aspirasi. Dalam kasus gedung DPR seharusnya mendengarkan rakyat bahwa rencana mendirikan gedung baru itu adalah rencana yang jauh dari kepentingan rakyat. Masih banyak ruangan di dalam DPR yang kosong dan tidak digunakan. Apalagi, di tengah kondisi rakyat yang susah, pengangguran masih banyak, dan bencana terus menimpa; tidak sepatutnya anggaran negara dikucurkan untuk hal yang hanya bersentuhan pada kepentingan dewan.



Kondisi wakil rakyat untuk mendengarkan aspirasi rakyat memang jauh api dari asap. Anggota DPR hanya memperjuangkan partainya, bukan rakyat yang memilihnya. Padahal, negara kita menggunakan label 'republik' adalah wujud nyata bahwa segalanya kembali ke rakyat. Maka, sudah sepatutnya harapan rakyat digantungkan pada anggota DPR. Terlebih lagi, mereka ada di parlemen karena rakyat.

Sudah masanya wakil rakyat memahami bahwa label 'republik' harus dipahami secara universal. DPR harus memaknai kembali arti republik yang ada pada nama negara ini. Dan idiom untuk rakyat ini bukan sekadar bualan para politikus apalagi untuk dikhianati.[]



WAKIL RAKYAT MINIM KINERJA

M. Ridwan Affan

*Wakil rakyat bukan paduan suara,
hanya tahu nyanyian kata setuju....*

BALADA “Wakil Rakyat” yang diciptakan Iwan Fals di atas melambangkan keresahan pada para wakil rakyat abal-abal. Meskipun lagu itu dibuat di era Orde Baru, liriknya masih relevan untuk disematkan pada para Anggota DPR RI periode 2009-2014. Kinerja buruk dewan terlihat dalam semua fungsi dewan, baik legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tidak heran jika hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan hanya sekitar 24 % tingkat kepercayaan publik terhadap DPR.

Kinerja Legislasi

Barometer penilaian awal kinerja legislasi DPR (2010-2014) dikenal Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang dapat diukur dari pencapaian Prolegnas prioritas tahun pertama. Dari total 70 RUU dalam daftar Prolegnas 2010, hanya 18 UU yang berhasil dihasilkan dari periode 2010. Itu pun hanya 8 UU yang berasal dari daftar prioritas Prolegnas, sementara sisanya adalah UU kumulatif terbuka, seperti UU yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta UU ratifikasi dengan negara lain.



Dari sisi substansi, RUU yang diprioritaskan haruslah memiliki urgensi yang sangat penting serta memiliki landasan filosofis, yuridis, dan historis yang sejalan dengan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Sehingga, dalam penentuan RUU mana yang didahulukan bukan lagi atas dasar kepentingan “pesanan” kalangan tertentu, melainkan haruslah menyesuaikan kebutuhan mendesak masyarakat. Hasil evaluasi kinerja legislasi DPR RI 2004-2009 menunjukkan mayoritas kualitas UU yang dihasilkan dewan pada periode tersebut adalah UU yang berkaitan dengan pemekaran wilayah dan ratifikasi perjanjian internasional, sedangkan berbagai RUU yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat dan pembangunan hukum nasional justru tidak diprioritaskan.

Hal yang sama juga terlihat dari kualitas RUU yang dihasilkan DPR RI dalam daftar prioritas Prolegnas 2010, mayoritas substansi UU yang dihasilkan secara kualitas tidak menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dan pembangunan hukum nasional. Setidaknya hanya tiga UU dari 18 UU yang dihasilkan terlebih dulu melihat kondisi bangsa yang substansinya penting untuk diatur; di antaranya adalah UU Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Grasi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, serta UU Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pada periode tugas 2011, ada 70 RUU yang ditargetkan DPR untuk diproses menjadi UU. Setelah satu tahun masa sidang per Oktober 2011, DPR hanya berhasil mengesahkan 8 undang-undang. Masih sangat jauh dari kata ideal untuk menjalankan fungsi legislasi.



Target pengesahan RUU Prolegnas yang tidak tercapai disebabkan oleh banyaknya tarik-menarik kepentingan politik yang terjadi di DPR. Lihat saja bagaimana lambatnya pengesahan RUU Jaminan Sosial yang disebabkan oleh alotnya negosiasi antara DPR dan perwakilan pemerintah, sehingga pada akhirnya UU yang dihasilkan justru jauh dari substansi pengaturan yang diharapkan.

Adapun untuk periode 2012, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menerima 115 RUU yang diusulkan untuk masuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012. RUU yang masuk usulan prioritas tersebut merupakan RUU yang pernah diusulkan dalam Prolegnas 2010 dan 2011, sejumlah 65 RUU. Sementara RUU yang belum pernah diusulkan dalam Prolegnas 2010-2011 sebanyak 40 RUU, dan RUU yang tidak masuk dalam Prolegnas 2010-2014 sebanyak 10 RUU.

Komoditas Politik

Dalam hal tugas pengawasan, DPR juga disorot lantaran menjadikannya sebagai komoditas politik. Fenomena baru dalam kinerja dewan periode 2009-2014 adalah semakin menguatnya fungsi pengawasan legislatif kepada eksekutif, meski hal ini tidak diimbangi dengan prestasi di bidang legislasi. Hak Angket Century bisa jadi termasuk fungsi pengawasan DPR RI yang banyak mendapat sorotan publik. Namun, amat disayangkan ketika fungsi pengawasan tersebut justru menjadi komoditas politik.

Tidak salah jika ada tuduhan bahwa DPR 2009-2014 lebih banyak berkuat dengan isu-isu kontroversial yang mengelilingi dan dibuatnya sendiri. Hak Angket Century yang



semula memberi harapan baru bagi penegakan hukum di Indonesia hanya berakhir di meja rekomendasi setelah terjadi banyak transaksi politik. Begitu pula dengan wacana Hak Angket Pajak yang juga berakhir di meja perundingan politik dan ancaman dikeluarkan dari koalisi pemerintahan. Bahkan, kekritisian sebagian anggota DPR RI terkadang berakhir dengan pergantian antarwaktu jika sikap tersebut bertentangan dengan kebijakan partai. Jadi, pengawasan DPR cenderung hanya manuver politik untuk memperbaiki citra dewan di mata publik.

Kalau tidak untuk perbaikan citra, DPR terkadang bersiasat dengan menempuh jalur aman saat memilih anggota komisi yang dibutuhkan masyarakat. Dalam proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III DPR, begitu tampak tarik-menarik kepentingan dan lobi politik. Cara-cara semacam ini menafikan semangat pemberantasan korupsi yang merupakan warisan reformasi. DPR bersikukuh menolak rekomendasi panitia seleksi calon pimpinan KPK dan terkesan mendukung calon yang lebih *'soft'* terhadap pemberantasan korupsi. DPR seperti mengalami ketakutan jika KPK dipimpin oleh orang yang tegas dan tidak pandang bulu terhadap pemberantasan korupsi. Hal ini tentu tidak mengejutkan mengingat KPK telah menangkap dan memproses sekitar 48 anggota DPR selama kurung waktu KPK berdiri. Upaya pelemahan KPK melalui Revisi UU Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK dengan menghilangkan beberapa kewenangan penting seperti penyadapan, juga menjadi catatan kita terhadap DPR yang terkesan resisten dengan upaya pemberantasan korupsi.



Harapan

Jika DPR ingin ada perbaikan kinerja ke arah yang lebih baik, DPR harus memiliki keseriusan untuk memaksimalkan fungsi utama lembaga legislasi yang benar-benar bertujuan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kalangan tertentu. Berbagai kebijakan legislasi yang dihasilkan haruslah bersih dari ‘politik dagang sapi’ yang justru menghilangkan substansi pengaturan.

Selain itu, Badan Kehormatan dan Pimpinan DPR juga harus berani menegakkan kedisiplinan terhadap anggota dewan yang berkinerja buruk dan harus mendorong *political will* dari parpol untuk berani memberikan sanksi bagi para anggotanya yang berkinerja buruk. Bahkan, seharusnya *recall* anggota dewan yang merupakan hak setiap parpol dilakukan berdasarkan penilaian kinerja, bukan atas dasar kepentingan politik apalagi rasa tidak suka subjektif pada anggota yang kritis.[]



PERSELINGKUHAN KORUP

Laras Susanti

KORUPTOR selalu punya kuasa dan cara untuk mengeruk Kuang rakyat. Salah satunya dengan menggunakan kendaraan partai politik. Parpol menjadi media perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif.

Perselingkuhan tersebut nyata terpampang dalam kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games. Pada kasus Wisma Atlet, Mindo Rosalina Manulang (Direktur Marketing PT Anak Negeri) tertangkap tangan bertransaksi *fee* dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam (Wafid). Dalam keterangan lengkapnya, Rosa menyebutkan PT Duta Graha menjadi pemenang karena sanggup memberi komisi 15% dari nilai proyek dengan komposisi 2% untuk Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam (Wafid), dan 13 % untuk Direktur PT Duta Graha Indah, Muhammad el-Idris (Idris). Kesepakatan tersebut telah rapi disusun dengan pertemuan awalan antara Rosa dengan Wafid yang difasilitasi oleh Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat.

Dugaan mengalirnya *fee* ke sejumlah anggota DPR semakin nyata terungkap lewat “nyanyian” Nazaruddin. Kasus tersebut terus disidik oleh KPK. Terakhir, duta besar Indonesia untuk Kolombia, Michel Menufandu, dan anggota DPR, Angelina Sondakh, diperiksa oleh KPK.



Dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur di 19 daerah transmigrasi senilai Rp 500 miliar, menanti untuk segera ditindaklanjuti. Dalam kasus tersebut, tiga orang ditangkap, yaitu Sekretaris Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya, Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Dadong Irbarelawan, serta Dharnawati, Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua. Mereka buka mulut tentang lobi orang-orang dekat Badan Anggaran, yakni Sindu Malik Pribadi dan Iskandar Pasojo alias Acos. Acos adalah staf khusus Tamsil Linrung, Wakil Ketua Badan Anggaran dari Partai Keadilan Sejahtera. Mencuat pula orang-orang dekat Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar, seperti Ali Mudhori, Muhammad Fauzi, serta Jazilul Fawaid. (*Tempo*, 15/09/2011).

Pada kasus Wisma Atlet, pejabat Kemenpora berselingkuh dengan sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar). Banggar pun ditengarai berselingkuh dalam kasus proyek Kementrakertrans. Belum lagi dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan di sekolah-sekolah. Sehingga, relevan kiranya kita menduga bahwa ada lebih banyak perselingkuhan yang merugikan keuangan negara.

Legalisasi Perselingkuhan

Keterlibatan eksekutif dan legislatif dalam kasus korupsi membuat penyidikan menjadi rumit. Tarik-menarik kepentingan amat kuat terasa. KPK harus melalui beragam rintangan untuk memulangkan dan meminta keterangan dari Nazaruddin. Sejumlah rekayasa dilakukan guna melemahkan KPK. Mulai dari tuduhan pertemuan dengan tersangka sampai penyiksaan terhadap Nazaruddin. Tujuannya jelas tentu saja untuk menghalang-halangi penyidikan kasus tersebut.



Ketertutupan Nazaruddin membuat penyidikan semakin sulit. Sehingga, penegak hukum harus bekerja ekstra untuk mengungkapnya.

Sistem presidensiil Indonesia menghendaki adanya *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif. Pengalaman otoriterianisme Orde Baru, mendorong konstitusi diamandemen agar legislatif memiliki kedudukan kuat untuk melakukan pengawasan. Alih-alih *checks and balances*, eksekutif dan legislatif justru berselingkuh mengeruk uang negara. Perselingkuhan terjadi melalui ketentuan yuridis yang mewadahi kewenangan eksekutif dan legislatif. Banggar DPR yang diharapkan mempermudah pembahasan rencana anggaran justru menjadi ajang bancakan partai politik. Titipan proyek menjadi modus untuk mendapatkan *fee* dari rekanan. Parpol berburu pendanaan dari proyek-proyek negara. Proyek-proyek yang seharusnya menjadi jalan mensejahterakan rakyat justru dinikmati parpol.

Parpol Buruk

Perselingkuhan korup terjadi karena buruknya parpol. Parpol tidak optimal memaksimalkan sumber keuangan yang legal. Dalam UU No. 2 Tahun 2011 (UU Parpol) dinyatakan bahwa keuangan parpol bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari APBN/APBD.

Sumbangan yang sah menurut hukum bukan merupakan *fee* proyek; *fee* yang memuluskan jalan perusahaan-perusahaan milik para politisi untuk menjadi pemenang proyek pemerintah. Parpol berdalih kekurangan uang untuk



melakukan sosialisasi. Padahal, setiap tahunnya negara mengeluarkan lebih dari Rp 8 triliun sebagai bantuan keuangan bagi parpol. Pada level daerah pun, parpol mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah yang besar ini tak terkelola dengan baik. Tak hanya itu, parpol juga gagal untuk menciptakan konstituen ideologis yang dapat menjadi pembayaran iuran.

Rezim Korup

Dugaan kasus korupsi di Kemenpora, Kementankertrans, dan Kemendiknas membuktikan bahwa perselingkuhan terjadi amat terang-benderang antara eksekutif dan legislatif. Presiden dalam hal ini harus membersihkan kementerian-kementerian yang terbukti korup. Menteri-menteri yang terbukti gagal harus diganti. Penegak hukum harus bekerja ekstra untuk membongkar sindikat pemburu rente di DPR maupun kementerian.

Tak hanya itu, pembenahan parpol pun harus dilakukan secara menyeluruh. Revisi UU Parpol juga harus dilakukan. Parpol yang terbukti korup dapat dikenakan sanksi tegas misalnya tidak dapat mengikuti pemilu lima tahun berikutnya.

Jika perselingkuhan korup terus dibiarkan, maka tepat kiranya rezim korup untuk disematkan pada siapa pun penguasa negeri ini. Pengalaman tumbangnya rezim Hosni Mubarak di Mesir dapat digunakan untuk berkaca. Berkaca bagi para penikmat bisnis kotor uang rakyat. Rakyat tidak selamanya diam, kelak rakyat akan membuktikan dirinya adalah pemimpin sesungguhnya. Tapi, haruskah menunggu rakyat menggulingkan rezim secara paksa?[]



MASIH MENGORUPSI PENDIDIKAN?

Laras Susanti

PUBLIK kembali terkejut karena kejutan tak menyenangkan dari dunia pendidikan. Sebanyak 2,7 juta siswa tingkat SD dan 2 juta siswa setingkat SMP yang terancam putus sekolah. Kabar anak putus sekolah ini, membuat kita bertanya-tanya: ke manakah pemerintah? Benarkah pemerintah telah melaksanakan tanggung jawabnya?

Tanggung jawab pemerintah dalam UUD 1945 adalah memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dalam rangka pemenuhan hak pendidikan ini, 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Khusus untuk pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya.

Deretan norma di atas merupakan konsensus nasional. Konsensus agar pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan terutama biaya pendidikan. Salah satu implementasinya dengan menganggarkan subsidi bagi siswa miskin. Pada perubahan APBN Tahun 2011, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) siap menggelontorkan subsidi biaya pendidikan sekitar Rp 2,9 triliun untuk siswa miskin tingkat SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia.



Namun, pendidikan tetap saja mahal bagi mereka yang miskin. Rata-rata untuk pendidikan dasar, siswa masih dibebani dengan biaya buku, biaya seragam, biaya ekstrakurikuler dan banyak lagi biaya lainnya. Biaya pendidikan mahal tidak hanya terjadi pada pendidikan dasar. Biaya pendidikan di perguruan tinggi jauh lebih mengerikan. Biaya berkisar puluhan sampai ratusan juta. Biaya tersebut merupakan biaya masuk. Belum termasuk biaya per semester. Jika dikalkulasikan seorang calon mahasiswa harus mempunyai saat akan masuk sampai akhir masa kuliah. Rasanya amat miris. Amat sering kita mendengar pidato soal gelontoran dana untuk pendidikan, tapi pendidikan tetap saja mahal. Sulit membayangkan 50 juta siswa miskin harus menyediakan uang berjumlah puluh bahkan ratusan juta. Pertanyaan besar timbul: ke manakah dana pendidikan?

Laporan Penyelewengan Dana

Pendidikan seharusnya mengajarkan tentang baik dan benar. Pendidikan yang dikelola oleh birokrat kotor, akan sangat membahayakan. Membahayakan bagi keuangan negara juga pada pembangunan mental bangsa. Sulit rasanya mengajarkan kebaikan pada peserta didik jika para birokrat pendidikan justru menjadi mengerat dana pendidikan.

Dugaan adanya praktik kotor pengelolaan dana pendidikan kembali mencuat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan dua laporan yang mengejutkan. Pengelolaan aset pendidikan Indonesia amat buruk. BPK mengeluarkan laporan *disclaimer* untuk pengelolaan aset oleh Kementerian Pendidikan Nasional. BPK juga melansir bahwa terdapat 43



rekening liar milik Kementerian Pendidikan Nasional senilai Rp 26,44 miliar. Jumlah tersebut diperoleh dari pemeriksaan BPK tahun 2009 dan 2010. Dua laporan tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa penyelewengan dana pendidikan telah terjadi. Audit BPK beberapa waktu silam juga menyatakan bahwa 6 dari 10 sekolah menyimpangkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan rata-rata penyimpangan Rp 13,7 juta per sekolah.

Sebenarnya, dugaan penyelewengan dana pendidikan bukanlah hal baru. Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch Tahun 2004-2009 menunjukkan bahwa penegak hukum telah mengusut 142 kasus korupsi pendidikan dengan total kerugian negara kurang lebih Rp 243,3 miliar. Dari kasus korupsi tersebut, 287 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka yang sebagian besar berasal dari dinas pendidikan daerah seperti kepala dinas pendidikan (42 orang) dan jajarannya (67 orang).

Tidak hanya pada level nasional, pengelolaan dana pendidikan pada level lokal pun bermasalah. Di sejumlah daerah, para pejabat daerah ramai-ramai mengeruk uang buku ajar. Sebut saja Bupati Sleman Ibnu Subianto yang terbukti bersalah melakukan korupsi buku ajar. Alih-alih mencerdaskan kehidupan bangsa, para pejabat sibuk memperkaya diri.

Mengorupsi Pendidikan

Beberapa laporan di atas menunjukkan bahwa pemerintah tidak juga memperbaiki pengelolaan dana pendidikan. Penegak hukum seharusnya tidak boleh tinggal diam. Penegak hukum harus menelusuri puluhan rekening liar pada Ke-



menterian Pendidikan. Bukan tidak mungkin potensi korupsi ada di sana. Jika memang ditemukan aliran tidak wajar, maka kepolisian dan kejaksaan dapat menjadi garda terdepan untuk menyidik.

Tidak hanya temuan BPK, penegak hukum juga harus menaruh perhatian pada laporan-laporan masyarakat. Masyarakat punya hak untuk meminta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. Pemerintah harus bersegera. Bersegera melakukan pembersihan di internal Kemendiknas. Kemendiknas juga harus berkoordinasi dengan kementerian terkait agar pengelolaan dana yang bersih juga terjadi pada level lokal. Desentralisasi yang tanpa diimbangi dengan pengawasan akhirnya membuat korupsi marak di daerah, termasuk korupsi pendidikan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berulang kali menyatakan akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Kita menuntut Presiden memperbaiki pengawasan dalam pengelolaan dana pendidikan. Jika kondisi carut-marut pengelolaan pendidikan masih terus terjadi seperti sekarang, kita patut bertanya benarkah Presiden telah menjadi pemimpin dalam pemberantasan korupsi?[]



SEKOLAH HANYA UNTUK ORANG BERDUIT?

Dewanti

MIRIS memang ketika saat ini pendidikan seolah diperjualbelikan. Hanya orang-orang yang berduitlah yang dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Sejatinya pendidikan adalah hak segala bangsa. Itulah yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Maka, sudah selayaknya masyarakat memperoleh hak-hak atas pendidikan. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Seperti yang telah tertera pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun apa daya, kini pemerintah seolah-olah amnesia dengan kewajibannya dalam menjamin pendidikan masyarakatnya. Biaya sekolah kian hari kian mahal. Biaya sekolah meliputi uang gedung, seragam sekolah, buku pelajaran, serta kelengkapan lainnya bukanlah biaya yang sedikit. Terlebih lagi jika dalam suatu keluarga lebih dari dua orang yang bersekolah dengan jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Masyarakat dituntut untuk bekerja ekstra demi terpenuhinya kebutuhan atas pendidikan. Tidak masalah bagi keluarga yang kondisi keuangannya mencukupi. Namun, bagaimana nasib keluarga yang kondisi ekonominya pas-pasan? Untuk



memenuhi kebutuhan pokoknya saja sulit, bagaimana bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi.

Perubahan sistem kurikulum pendidikan berdampak pada biaya sekolah semakin mahal. Jika dahulu buku pelajaran masih dapat diturunkan oleh kakak kelas, namun sekarang tiap tahun harus ganti, sehingga pengeluaran untuk uang buku setiap tahun akan keluar. Terlebih untuk keperluan praktikum pelajaran, siswa harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli peralatan atau bahan-bahan yang digunakan untuk praktikum. Dan hal yang paling memberatkan masyarakat adalah biaya uang gedung. Di tingkat SMA negeri biaya uang gedung berkisar antara Rp 5-10 juta. Jika dijumlahkan, untuk menyekolahkan satu anak SMA dapat mengeluarkan biaya sebesar Rp 7-12 juta. Inilah yang membuat sekolah seakan-akan untuk orang berduit saja.

Untuk itu, peran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah bukan hanya menetapkan kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun, tetapi juga harus memfasilitasi serta mengontrol keberlangsungan pendidikan itu sendiri. Penciptaan lapangan kerja juga dapat dilakukan agar masyarakat memiliki pendapatan yang mencukupi untuk pendidikan anak-anaknya. Pemerintah juga dapat meningkatkan alokasi APBN untuk sektor pendidikan yang terlepas dari biaya gaji guru. Pengontrolan terhadap operasional sekolah juga harus dilakukan terkait biaya uang gedung yang mahal dan berbeda-beda di masing-masing sekolah. Semua ini harus segera dijalankan bila amanat pembukaan UUD 1945 di atas masih dianggap penting.[]



GENERASI MUDA DAN KORUPSI WAKTU

Ary Santoso

KORUPSI sudah menjadi bahan pembicaraan utama publik di mana-mana. Ia merupakan masalah yang sudah sejak lama terjadi di negeri ini. Korupsi yang sudah mendarah daging ini sangat sukar sekali diberantas, bahkan sampai saat ini belum didapati cara menyelesaikan korupsi sampai ke akar-akarnya. Ketika perangkat hukum kita ingin menyelesaikan suatu masalah korupsi, yang dihasilkan bukanlah terungkapnya para koruptor tersebut, melainkan yang muncul justru praktik-praktik korupsi lainnya.

Korupsi Kontemporer

Kata 'korupsi' berasal dari bahasa latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok (Axel Drehel, dkk., 2004). Banyak kalangan baik dari praktisi, akademisi, maupun para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaiannya berbeda namun secara hakikat mempunyai makna yang sama.

Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan-



an umum dan Negara. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan pihak pemberi hadiah. Terkadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Axel Drahel, dkk. (2004) berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Beberapa definisi di atas pada dasarnya memiliki makna yang sama bahwasanya korupsi adalah sikap seseorang ataupun kelompok orang yang merugikan individu, sekelompok orang, maupun institusi dengan berbagai upaya yang dilakukan. Pada hakikatnya hampir sebagian besar kalangan menyepakati pula bahwa korupsi merupakan hal yang merugikan, menghambat, dan harus terus dicari penyelesaiannya.

Dalam konteks Indonesia hari ini, korupsi memiliki makna yang semakin meluas. Tidak hanya korupsi materiil (uang) dan korupsi politik, akan tetapi muncul juga jenis (istilah) korupsi waktu, korupsi ilmu pengetahuan, korupsi hati nurani, dan lain sebagainya.

Korupsi waktu banyak melibatkan kaum muda, baik yang masih berstatus mahasiswa ataupun pegawai profesional. Korupsi kategori ini sering dipandang bukan masalah. Tindakannya tidak diperhitungkan sebagai persoalan, tetapi sebagai kebiasaan yang turun-menurun dan 'manusiawi'. Pa-



dahal, korupsi waktu ini memberi dampak negatif yang cukup besar ketika tidak kunjung dihentikan.

Korupsi waktu adalah korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan waktu. Dalam bahasa yang umum, korupsi waktu lebih dikenal sebagai 'jam karet'. Bentuk korupsi ini menyebabkan minimnya efisiensi dan kurangnya hasil yang dicapai dalam suatu pekerjaan, serta ketidakefektifan dan kerugian materiil yang tidak sedikit. Korupsi waktu tentu saja melahirkan konsekuensi moral antar-individu atau kelompok, semisal tidak ada lagi rasa percaya (*trust*) dan tanggung jawab, mengingat ada pihak yang dirugikan, yakni pihak yang telah mengatur waktunya dengan baik.

Korupsi waktu memang paling mudah dilakukan, paling murah biaya untuk melakukannya, namun memiliki dampak yang hampir sama besarnya dengan korupsi uang (materiil) dan korupsi lainnya. Hampir setiap mahasiswa melakukan praktik korupsi ini. Tanpa disadari, praktik ini merupakan salah satu pembiasaan munculnya bibit-bibit korupsi yang lebih besar. Padahal, kaum muda terpelajar memiliki kedudukan mulia: calon pemimpin bangsa.

Tidak bisa tidak, korupsi waktu yang menjadi 'tradisi' para mahasiswa harus segera di minimalisasi bahkan diberantas. Karena hal yang terlihat sederhana itu memiliki dampak yang sangat berbahaya jika terus tumbuh subur dalam diri mereka. Penting sekali bagi kita para mahasiswa, kaum intelektual dan agen perubahan ke arah kebaikan, untuk segera menancapkan di diri kita ini satu tekad untuk berkata: "DISIPLIN dan STOP KORUPSI WAKTU!"



Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memulai dari diri sendiri yang telah menyadari betapa pentingnya menghargai dan menjaga waktu seefektif mungkin. Langkah selanjutnya, perlu ada suatu penegasan *punishment* bagi yang melakukan korupsi waktu dan *award* bagi yang telah berusaha menghargai waktu. Mekanisme ini bertujuan untuk meminimalkan munculnya praktik korupsi waktu.

Organisasi kemahasiswaan dalam kaitan ini sudah saatnya membuang jauh-jauh tradisi jam karet. Perlu ada budaya malu untuk terus mengulangi praktik korupsi tersebut. Sebaliknya, perlu digalakkan budaya tepat waktu. Komitmen tepat waktu ini diiringi dengan pengawasan terhadap pelaksanaannya, antara lain dengan adanya *punishment* dan *award* yang tegas dan berkelanjutan bagi aktivis yang melakukan korupsi waktu.

Kini, saatnya bukan menanti orang lain mengubah diri dulu. Dari diri kita sendirilah perbaikan kedisiplinan terhadap waktu harus dimulai! []





**Becermin pada
Geliat di Luar**

PEMERINTAHAN TERBUKA DI AMERIKA

M. Adi Nugroho

SAAT INI dunia telah mencapai era globalisasi yang tak mengenal batas arus informasi. Negara dituntut menjadi semodern mungkin demi mengikuti perkembangan zaman. Antara warga negara dengan pemerintah selaku pengelola negara seakan tidak ingin adanya batas. Sebuah pemerintahan yang terbuka adalah jawabnya. Sebuah pemerintahan yang mampu membuka semua kebutuhan informasi warga negaranya.

Pemerintahan terbuka adalah wacana baru. Pemerintahan secara sukarela memberikan informasi apa pun yang berkaitan dengan lembaga tersebut. Dan Amerika adalah salah satu pencetusnya di era modern ini, era keterbukaan pemerintah atau dikenal dengan *open government*.

'Open Government'

Secara formal, wacana *open government* di Amerika diawali ketika Presiden Barrack Obama pada tanggal 21 Januari 2009 menandatangani memorandum *open government* sebagai bentuk komitmennya menciptakan era keterbukaan dalam pemerintahan Amerika Serikat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Era komitmen Obama untuk sebuah keterbu-



kaan sendiri sebenarnya telah dimulai sejak masa kampanye pemilihan presiden AS. Ketika itu Obama bukan saja menjadi fenomena karena ia merupakan calon presiden dari ras Afro-Amerika tetapi juga karena transparansi timnya dalam melaporkan dana kampanye.

Ketika itu, melalui situsnya Obama bukan saja memperlihatkan visi dan misinya bila terpilih sebagai presiden. Tim Obama juga memperlihatkan transparansi dana sumbangan kampanyenya. Obama membuka lebar-lebar bagi masyarakat Amerika yang ingin mendonasikan uangnya meski hanya 1 dollar. Ajakan inilah yang membuat masyarakat ingin berpartisipasi dengan kampanyenya. Data Federal Election Committee (FEC) menunjukkan bahwa penyumbang Obama dengan kategori kecil (yaitu di bawah 500 dollar) nilainya mencapai 342,5 juta dollar atau 60,4 persen dari total dana kampanye individual yang terkumpul.

Inilah bentuk partisipasi nyata karena adanya transparansi yang ditunjukkan oleh Obama. Transparansi atau tingkat aksesibilitas publik atas laporan dana kampanye pun tinggi. Aksesibilitas Obama mencapai 90,7 persen (*full disclosure*) dengan nilai jumlah sumbangan yang dapat diakses sebesar 579,1 juta dollar. Obama dan timnya juga berhasil menorehkan di catatan sejarah dengan mengumpulkan dana kampanye terbesar, yaitu 640 juta dollar (menurut Center for Responsive Politics). Era transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi sebuah kolaborasi untuk membuktikan keunikan Obama karena sebagian besar dana kampanye dikumpulkan warga AS secara individual.



Keberhasilan itulah yang menjadi semangat Obama pada hari pertama kerja sebagai presiden, 21 Januari 2009, menandatangani memorandum berjudul “Transparency and Open Government”. Pada hari pertama itulah Obama langsung meminta Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) untuk mengeluarkan peraturan baru yang memudahkan akses masyarakat terhadap data, rapat, dan keputusan pemerintah. Dalam memorandum tersebut ada tiga poin yang dikedepankan dalam *open government* Obama, yaitu adanya transparansi, partisipasi, dan kolaborasi.

Transparansi, dengan ini pemerintah harus memiliki keterbukaan pada masyarakat. Transparansi mengharuskan adanya peningkatan akuntabilitas dan penyediaan informasi bagi warga negara mengenai kegiatan yang sedang dilakukan pemerintah. Pun secara administrasi, ada tindakan yang layak sesuai hukum dan kebijakan untuk pemberian secara cepat dan mudah bagi masyarakat. Dalam transparansi, departemen dan lembaga-lembaga eksekutif harus memanfaatkan teknologi baru untuk menyediakan informasi tentang hasil kerja dan keputusan lembaga publik secara daring (*online*) dan mudah bagi publik. Wujud sederhananya adalah publikasi departemen dan dinas pemerintah tentang rencana kerja dan kebijakan yang akan dan telah mereka keluarkan.

Partisipasi, pemerintah harus partisipatif dengan melibatkan publik demi meningkatkan efektivitas pemerintah dan kualitas keputusan yang dibuat. Penerapan partisipasi mengharuskan keterlibatan publik dalam rangka memberi masukan, saran atau bahkan kritik dalam merancang kebijakan yang akan dibuat lembaga pemerintah. Hal ini diperlukan demi tercapainya kebijakan yang berkualitas. Oleh ka-



rena itu, departemen dan dinas pemerintah harus membuka pintu partisipasi publik dalam memberi masukan.

Kolaborasi, setelah adanya transparansi dan partisipasi, maka tingkatan selanjutnya adalah kolaborasi. Wujud dari penerapan transparansi dan partisipasi adalah kolaborasi yang mengharuskan departemen dan dinas pemerintah meningkatkan kerja sama antarlembaga pada semua tingkat pemerintah, antara pemerintah dan LSM, dunia bisnis dan bahkan perorangan.

Kemudian, pada hari kedua pemerintahannya, Obama mengeluarkan *Open Government Directive* yang isinya menginstruksikan institusi pemerintah AS untuk menyediakan informasi publik dalam bentuk *open data* sebagai langkah menuju *open government*. Langkah tersebut langsung dilaksanakan Direktur OMB Peter Orszag dengan memerintahkan semua agen-agen federal untuk menciptakan dan melembagakan pemerintahan terbuka. Perintah tersebut termasuk pelaporan seberapa baik lembaga membuat data yang tersedia di situs Gedung Putih dalam waktu 60 hari. Di dalamnya juga melepaskan tiga *database* “bernilai tinggi” dalam waktu 45 hari dan memungkinkan adanya komentar publik atas data dan upaya keterbukaan pada situs departemen dan dinas pemerintah.

Selain itu, Obama juga mempromosikan Vivek Kundra sebagai *Chief Information Officer* dan Aneesh Chopra sebagai *Chief Technology Officer*. Jabatan tersebut adalah jabatan yang sebelumnya belum pernah ada dalam sejarah pemerintahan AS. Pengangkatan kedua pejabat publik tersebut sangat berkaitan dengan pemecahan masalah kesejahteraan dalam



negeri pascakrisis dengan mendayagunakan teknologi informasi.

Dengan adanya memorandum tersebut, ada beberapa perubahan yang diperoleh:

- ❖ Peluncuran Data.gov sebagai pusat data dari pemerintah federal di satu tempat yang mudah ditemukan. Dalam format yang dapat dibaca komputer dan bebas disalin untuk diolah kembali dan ditampilkan sebagai bentuk inovasi layanan publik. Jumlah yang terkumpul sebanyak 270.000 set data dari beragam jenis data, antara lain data potensi pasar, kesehatan, keamanan penerbangan, kualitas udara, kriminalitas, dan narkoba.
- ❖ Peluncuran Recovery.gov dan ITdashboard.gov untuk memantau penggunaan dana pemulihan oleh pemerintah. Dua situs ini memungkinkan pengawasan yang ketat oleh masyarakat. Hasilnya, sebuah proyek TI dari Department of Veterans Affairs (VA) senilai 54 juta dolar AS berhasil dihentikan.
- ❖ Peluncuran Challenge.gov sebagai tempat menaruh ide dan konsep inovasi baru dari para pelaku industri kreatif untuk penyelenggaraan *open government*.
- ❖ Terdapat 30 dinas yang telah merancang situs *open government* mereka. Isinya memuat dokumen perencanaan penyelenggaraan *open government*. Beberapa perencanaan termasuk milik dari Department of Health and Human Services (HHS), Environmental Protection Agency (EPA), dan Department of Housing and Urban Development (HUD), mendapat sambutan hangat dari masyarakat.



- ❖ Menggelar ajang penghargaan. Salah satu bentuk penghargaan yang sukses adalah SAVE (Securing Americans Value and Efficiency) Award yang melombakan proposal tentang ide inovasi baru dari para penyelenggara pemerintahan. Pergelaran pertama ini telah menerima 38.000 lebih proposal, yang banyak di antaranya telah diimplementasikan.
- ❖ Penerapan suatu anggapan yang jelas (*clear presumption*) untuk pertama kalinya atas data yang dipublikasikan di situs Gedung Putih. Misalnya data tentang gaji pegawai, informasi keuangan, atau data yang lain. Artinya adalah jika yang ditulis gaji, maka yang dimaksud adalah penghasilan total yang didapat dari bekerja pada institusi tersebut termasuk gaji pokok+tunjangan tunjangan+uang makan+uang transportasi. Tidak ada informasi yang perlu penjelasan lebih detail yang tidak disertakan. Ini terkait dengan hak masyarakat mendapatkan informasi yang jelas sesuai dengan Freedom of Information Act (FOIA).

Refleksi

Penerapan pemerintahan terbuka atau *open government* telah memberikan efek dari beragam sendi. Di dalamnya memang terdapat pro dan kontra, juga segi positif dan negatif. Ketika pertama kali memorandum transparansi muncul, terdapat beberapa komentar. Francesca Grifo dari Union of Concerned Scientists menyebutkan bahwa perintah untuk sebuah transparansi itu “kurang spesifik”.



Walaupun demikian, upaya keterbukaan dalam pemerintahan yang dicanangkan oleh Obama adalah suatu hal inovatif dan visioner. Tidak mengherankan apabila inovasi Obama ini disambut luar biasa oleh masyarakat AS ketika itu. Hasil survei Pew Internet terhadap 2.258 pengguna internet berusia di atas 18 tahun di AS menunjukkan, sekitar 40% melakukan daring untuk mencari data tentang pengeluaran dan kegiatan pemerintah. Angka ini termasuk siapa saja yang telah melakukan setidaknya salah satu dari aktivitas berikut: melihat secara daring bagaimana uang stimulus federal dihabiskan (23%); membaca atau mengunduh teks undang-undang (22%); mengunjungi situs seperti data.gov yang menyediakan akses ke data pemerintah (16%); atau melihat siapa yang berkontribusi terhadap kampanye pejabat terpilih mereka (14%).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pemerintahan terbuka sangat dinantikan oleh masyarakat. Warga negara dapat mengetahui seluk-beluk yang perlu mereka ketahui dari sebuah departemen atau dinas pemerintah. Penerapan pemerintahan terbuka seperti ini tentu mengharuskan upaya aparat pemerintah untuk intensif memperbarui data daring mereka. Juga perlunya penyikapan yang tenang mengingat banyaknya partisipasi aktif yang luar biasa dari publik untuk memberi masukan atau kritik pada lembaga pemerintah. Dikritik atau bahkan dicaci memang konsekuensi yang harus diterima dari sebuah keterbukaan. Inilah 'risiko' bila kita ingin maju.

Omong-omong, bisakah *open government* diterapkan di Indonesia?[]



SETELAH REVOLUSI MESIR BERGULIR

Achmad Fahmi Basyaiban

ANGIN REVOLUSI itu kian berhembus di beberapa negara Arab. Diawali di Tunisia, berikutnya Mesir, Libya, dan Yaman. Di Suriah hingga April 2012 masih terjadi pergolakan menuju pergantian rezim otoriter. Hasil proses revolusi yang menyebar di kawasan ini, menunjukkan pola yang hampir sama. Revolusi membawa angin segar masa depan demokrasi dan kehidupan masyarakat Arab. Kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kritik terhadap pemerintah, serta harapan memiliki tatanan pemerintahan baru melingkupi negara-negara yang berhasil dengan revolusinya.

'Arabic Spring'

Arabic Spring begitulah beberapa pengamat menyebut revolusi di beberapa negara Arab dengan ditandai berakhirnya rezim otoriter dan diktator yang sudah berkuasa 30 tahun lebih di masing-masing negara. Satu hal yang menarik perhatian dari rangkaian kejadian pascarevolusi adalah dilaksanakannya pemilu di masing-masing negara. Golongan yang selama ini tertindas dan ditekan oleh penguasa muncul sebagai pemenang dalam pemilu. Ikhwanul Muslimin di Mesir misalnya. Organisasi yang didirikan Hasan al-Banna



ini adalah organisasi terlarang ketika rezim Husni Mubarak berkuasa. Sebagai anasir rakyat yang turut andil dalam keberhasilan melakukan revolusi 2011 dan menurunkan presiden sebelumnya, Ikhwanul Muslimin mendapatkan ruang bebas kembali ke panggung politik pemerintah, setelah sebelumnya mengubah haluan ke sektor sosial masyarakat.

Demokrasi yang diwujudkan dalam pemilu merupakan salah satu tuntutan revolusi menghadirkan peta politik baru. Elemen-elemen yang bersama-sama melakukan revolusi belakangan hari mendirikan partai politik sebagai kelanjutan dalam melaksanakan amanah dan semangat revolusi. Setidaknya ada dua golongan besar yang muncul pascarevolusi. Pertama, golongan Muslim yang diwakili partai Freedom and Justice Party (FJP) dan an-Nour. Kedua, golongan Sekuler diwakili oleh Free Egyptians Party (FEP) dan Egyptian Social Democratic Party (ESDP). Pemilihan Umum pun dilakukan untuk memilih wakil rakyat baru baik di tingkat majelis rendah (DPRD) maupun majelis tinggi (DPR).

Kemenangan mutlak FJP yang notabene perpanjangan kelompok Ikhwanul Muslimin tidak bisa dilepaskan dari rappingnya manajemen organisasi yang mereka kelola selama ini, meskipun organisasi mereka dilarang di era rezim Mubarak.

Menolak Intervensi Barat

Kemenangan FJP di satu sisi bisa memberikan angin segar bagi peta perpolitikan di Mesir, dari rezim otoriter ke arah politik yang lebih egaliter dan demokratis. Di sisi lain, kemenangan pihak Islam mengganggu keberadaan pengaruh Barat yang selama ini banyak memiliki kepentingan di Mesir.



Dengan kemenangan ini pula geopolitik Timur Tengah juga akan berubah drastis, hubungan Mesir-Israel dan Palestina keadaannya akan berubah dengan kemenangan Ikhwanul Muslimin yang selama ini dianggap sebagai organisasi yang berbahaya menurut Barat.

Tantangan yang akan dihadapi Mesir saat ini adalah usaha Barat untuk tetap dapat mengontrol negeri piramida tersebut. Barat memang selama ini banyak mengampanyekan dan menggaungkan pelaksanaan demokrasi di seluruh penjuru dunia ini, tapi sayangnya mereka menerapkan standar ganda khusus untuk negeri-negeri Muslim. Demokrasi harus jalan, tapi Islam tidak boleh menang. Kita mungkin masih ingat pada tahun 1993 di Aljazair ketika itu terjadi gelombang revolusi yang kemudian diikuti dengan pemilihan umum sebagai bagian tindak lanjut dari revolusi.

Pemilihan umum pun digelar, dan secara mengejutkan FIS (Front Islamic du Salut) menjadi pemenang pemilu. Kemenangan FIS mengejutkan pihak Barat yang notabene punya kepentingan besar di Aljazair sebagai daerah penghasil minyak. Jika sampai pihak Islam yang menguasai negara tersebut, tentunya akan menyusahkan mereka di kemudian hari. Konspirasi Barat pun dilancarkan, pemilu yang sudah dilaksanakan tiba-tiba dibatalkan. Kekuasaan pemerintah secara sepihak pun diberikan kepada militer. Pemberangusan aktivis dan simpatisan FIS dilakukan di seluruh penjuru Aljazair. Kemenangan mutlak FIS yang menyabet 188 kursi dari 231 kursi, sementara FLN (Front de Libération Nationale) sebagai partai penguasa rezim otoriter hanya mendapatkan 15 kursi.



Beberapa bulan kemudian pemerintah mengadakan pemilu ulang dengan harapan komposisi suara antara FIS dan FLN akan berubah. Pemilu digelar kembali, hasilnya tetap sama. FIS menjadi partai pemenang mutlak melawan rezim otoriter pemerintahan, dan FLN tetap dengan suara rendah. Di sinilah upaya penjegalan kemenangan Islam dilakukan, demokrasi dan pemilu yang jujur dan adil, yang diharapkan membawa tatanan baru Aljazair, menjadi awal petaka negeri itu.

Rezim otoriter pemerintah yang didukung Prancis dan konspirasi Barat menyiapkan skenario berdarah bagi Aljazair. Kemenangan FIS yang kedua kalinya ditolak oleh pemerintah dan Barat. FIS kemudian dianggap sebagai partai terlarang, tidak boleh ikut pentas politik, dan harus diberantas keberadaannya. Kemenangan dua kali FIS dalam pemilu demokratis dihancurkan oleh rezim pemerintah dan kekuatan Barat yang selama ini mengagungkan demokrasi. Seluruh aktivis dan simpatisan FIS menjadi korban dari skenario ini. Tak kurang dari 5000 jiwa melayang di tangan junta militer pro-pemerintahan.

Sejarah tentang demokrasi di Aljazair tentunya harus menjadi pelajaran penting untuk Mesir yang baru berbenah menuju Mesir yang demokratis. Ancaman dari pihak Barat yang tak ingin kehilangan pengaruhnya di Timur Tengah sewaktu-waktu hadir. Kemandirian yang akan dibangun bisa menjadi sia-sia belaka ketika standar ganda demokrasi oleh Barat tetap dipaksakan hanya karena pemenang dari demokrasi adalah pihak Islam.



Kini semua mata menantikan apa yang terjadi setelah demokratisasi Mesir dan beberapa negara Arab. Apakah akan memberikan tatanan baru global, khususnya di wilayah Timur Tengah? *Arabic Spring* yang bermuara dengan *Islamic Spring* memberikan peta politik yang berubah total selain perubahan pendulum ekonomi yang sudah mulai berpindah dari Barat ke Asia. Dominasi Barat secara perlahan bisa mulai memudar dan berganti dengan pengaruh yang lain.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Akankah Indonesia punya peran dan kedudukan penting di Timur Tengah? []



ME(MESIR)KAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Laras Susanti

GERAM, kata yang paling tepat untuk menggambarkan kekusaran rakyat pada pemberantasan korupsi di negeri ini. Kegeraman tersebut akibat pemberantasan korupsi yang selalu dibayangi oleh tarik ulur dan intervensi politik. Terutama untuk kasus-kasus kelas kakap. Dengan kuasanya, pelaku korupsi dapat melakukan intervensi politik terhadap penuntasan kasusnya.

Sejarah mencatat beberapa kasus kelas kakap, antara lain kasus Soeharto dan kroninya. Sampai saat ini dugaan korupsi yang dilakukan selama 32 tahun berkuasanya Soeharto tak tersentuh secara hukum. Soeharto diduga melakukan tindak pidana korupsi di tujuh yayasan (Dakab, Amal Bakti Muslim Pancasila, Supersemar, Dana Sejahtera Mandiri, Gotong Royong, dan Trikora) sebesar Rp 1,4 triliun. Pasca Soeharto wafat, tak ada satu pun kroni Soeharto yang diperiksa.

Tak hanya Soeharto, mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga diduga tersangkut korupsi Bulogate. Secara politik, Gus Dur disingkirkan dari jabatan presiden. Namun, secara hukum keterlibatan Gus Dur pada kasus Bulogate tak pernah terungkap.



Beberapa tokoh yang pernah menjabat menteri negara pun tak lepas dari dugaan korupsi. Contohnya korupsi sisminbakum di Departemen Hukum dan HAM, korupsi pengadaan sarung di Departemen Sosial. Setiap tahun korupsi masih menjadi permasalahan serius bangsa ini, termasuk dugaan kasus korupsi Century. Kasus ini ramai diberitakan tapi miskin upaya penuntasan.

Kasus-kasus di atas merupakan sedikit contoh korupsi di Indonesia. Bertambah jamaknya korupsi menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan tidakla optimal.

Kondisi kekinian di Mesir

Indonesia mengalami transisi demokrasi pada tahun 1998. Adapun Mesir baru mengalaminya beberapa bulan belakangan. Namun, Mesir jauh lebih maju dalam penegakan hukum. Pasca digulingkan, Husni Mubarak dan kronikroninya tak lepas dari jerat hukum. Mubarak dan anaknya ditahan atas tuduhan korupsi, penyalahgunaan dana publik dan menyelewengkan kekuasaan demi kepentingan sendiri. Meskipun berdalih sakit, Mubarak tetap ditangkap dan ditahan. Tak hanya Mubarak, menteri-menteri di zamannya juga sedang dalam proses penyidikan. Bahkan sudah ada yang divonis yakni Mantan Menteri Dalam Negeri Habib al-Adly. Habib al-Adly terbukti melakukan pencucian uang dan memperkaya diri sendiri saat berkuasa. Fakta di atas menunjukkan penguasa totaliter diadili tanpa pandang bulu dengan proses peradilan yang cepat.



Kondisi di Mesir amat berbeda dengan Indonesia. Korupsi sulit diberantas karena ada kelindan antara penegak hukum dan petinggi negara. Penegak hukum kehilangan tajinya saat berhadapan dengan korupsi yang dekat dengan kekuasaan. Dengan kuasanya, koruptor dapat membeli penegak hukum. Akhirnya, koruptor bisa lepas dari jerat hukum.

Oleh karena itu, me(mesir)kan pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi kalimat yang tepat. Indonesia patut meniru semangat dan keberanian Mesir dalam memberantas korupsi. Tanpa keberanian, penegakan hukum akan sekadar janji tanpa implementasi.[]



KRISIS LIBYA DAN STRATEGI KEAMANAN KITA

Dini Khoirinnisa

KRISIS di Libya nampaknya belum menampakkan tanda-tanda usai, meskipun mantan penguasa setempat Moammar Khadafi telah terbunuh dalam kontak senjata. Alih-alih mengusahakan perdamaian, pasukan Sekutu malah mendeklarasikan untuk melakukan operasi di darat yang kecil kemungkinan akan dijalankan dalam waktu yang singkat.

Campur tangan asing dalam krisis di Libya masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Pihak Koalisi mengklaim harus menegakkan Resolusi 1973, tapi nampaknya yang menjadi fokus sampai saat ini hanyalah poin dari *no fly zone* dan perlindungan masyarakat sipil. Padahal, masih ada poin lain dari resolusi 1973, yakni gencatan senjata dan pencarian solusi, seperti pernah dikemukakan oleh Presiden Susilo Bambang Yodhoyono mengenai sikap Indonesia atas Krisis di Libya.

Semua pihak yang terlibat sampai saat ini mengklaim mengusahakan masa depan Libya yang lebih baik. Namun, ternyata nasib Libya kini menjadi sulit diprediksi karena belum adanya tanda-tanda keberhasilan dari usaha yang dilakukan oleh pihak mana pun. Rakyat penentang dan pendukung rezim Khadafi telah banyak yang terluka dan menjadi korban jiwa. Tentara Sekutu yang dikirim 'tugas mulia' oleh



NATO dipandang telah pula turut andil dalam menambah banyaknya jumlah korban warga sipil yang berjatuh dan membuat situasi di Libya kini makin carut marut karena bertambahnya kepentingan yang ada di dalamnya.

Konflik yang kini terjadi di Libya (juga di Tunisia dan Mesir) disarankan oleh berbagai pihak agar menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Pemerintah dan rakyat Indonesia bisa belajar proses demokratisasi dan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan pemerintahan. Bagaimanapun juga, salah satu kunci dari partisipasi demokrasi yang sehat adalah kondisi kesejahteraan yang baik dari masyarakat disertai adanya pendidikan politik yang partisipatif.

Selain itu, ada pelajaran penting lain dari kasus revolusi di negara-negara tersebut, yakni pentingnya menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI. Pemerhati militer Indonesia, Connie Rahakundini, menyatakan bahwa campur tangan atau intervensi asing yang akhirnya masuk ke Libya tidak dapat dipungkiri karena adanya kepentingan dari negara-negara Sekutu tersebut. Kepentingan yang dimaksud adalah sumber minyak.

Kecurigaan ini wajar mencuat di sela-sela tindakan Sekutu untuk mengintervensi langsung Libya. Sedangkan untuk kasus Mesir, Sekutu mengambil sikap yang berbeda; mereka (yang diwakili Amerika Serikat) hanya memberikan sebatas seruan dan saran untuk melindungi proses transisi Mesir. Lain halnya sewaktu konflik Libya, Sekutu langsung bergairah untuk memberi intervensi langsung dengan mendukung para pemberontak pemerintahan Khadafi.



Kondisi yang sama sebenarnya juga mengancam Indonesia. Di negara kepulauan ini, ada satu kepentingan yang dimiliki oleh banyak negara, yakni lintas jalur perdagangan berkaitan dengan era perdagangan bebas khususnya di wilayah ASEAN. Posisi di Indonesia menjadi amat strategis karena bersilangan antara wilayah negara-negara Asia dan Australia serta persilangan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dari segi ekonomi dan strategis, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia karena juga menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yakni India, China, dan Indonesia. Tentu saja Amerika dan Eropa juga memiliki kepentingan terutama di bidang ekonomi. Menurut data dari pihak Indonesia, pada tahun 2009 saja sebanyak 71.359 kapal melintas menggunakan Selat Malaka. Bisa dihitung betapa banyak jumlah komoditas yang dibawa, ini menandakan strategisnya Selat Malaka.

Posisi vital Selat Malaka tentu harus segera diimbangi oleh keamanan yang stabil di kawasan tersebut. Namun sayangnya, seperti yang kita ketahui, kekuatan militer Indonesia terutama untuk menjaga batas-batas wilayah masih sangatlah lemah. Hal ini terlihat dari kecilnya anggaran militer untuk pertahanan Indonesia dalam APBN di setiap tahunnya. Padahal, kita tidak menginginkan hal buruk seperti di Libya, Irak, dan Afghanistan terjadi di Indonesia.

Andai ada faktor yang menyebabkan tidak stabilnya kondisi Indonesia sehingga mengganggu kestabilan keamanan di Selat Malaka, maka bukan tidak mungkin akan ada intervensi dari negara-negara yang memiliki banyak kepentin-



gan di selat tersebut. Oleh karena itu, ada baiknya pemerintah Indonesia mengambil pelajaran dan mengevaluasi kebijakan-kebijakannya selama ini, baik dalam politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Hal ini agar masalah-masalah yang terjadi di Timur Tengah, tidak juga terjadi di Indonesia.[]



MEMPERBAIKI PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN LEWAT ASEAN

Andreas Senjaya

PADA tanggal 2-8 Mei 2011 lalu penulis berkesempatan untuk menjadi delegasi dari Universitas Indonesia di 12th ASEAN University Network Educational Forum and Young Speakers Contest. Selama seminggu para mahasiswa perwakilan dari universitas-universitas anggota ASEAN University Network (AUN) ditambah dengan Jepang, Korea Selatan, dan China membahas kondisi pendidikan ASEAN+3 (negara-negara ASEAN ditambah Jepang, Korea Selatan, dan Cina) dan potensinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara-negara ini. Dari pertemuan itu kami menyadari bahwa ASEAN memiliki potensi yang sangat besar sebagai sebuah kesatuan bangsa-bangsa yang menjadikan perbedaan budaya dan suku bangsa sebagai kekuatan untuk mewujudkan visi bersama.

Pendidikan khususnya pendidikan tinggi memiliki potensi sangat besar dalam kemajuan taraf hidup sebuah negara, terlebih ketika kita bicara dalam konteks regional seperti ASEAN. Maka, kesatuan gerakan akan menjadi langkah yang dapat berdampak besar.

Semangat untuk membangun jaringan dan kesatuan gerakan dalam mengoptimalkan pendidikan tinggi—sebagai

Becermin pada Geliat di Luar



sarana untuk memberikan kontribusi dan karya nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat—sebenarnya sudah lama dibangun sejak dibentuknya AUN pada tahun 1995. Hanya saja, sejak didirikan masih ada kendala di berbagai sisi dalam penerapannya di lapangan. Kendala tersebut terdiri dari kendala dalam hal infrastruktur, kepentingan politik, atau perbedaan baik ekonomi maupun perbedaan kebudayaan antarnegara.

Cara agar bisa mengoptimalkan pendidikan khususnya pendidikan tinggi sebagai organ yang bisa memberikan manfaat nyata kepada masyarakat di tingkat ASEAN dapat berjalan efektif dengan menguatkan jaringan dan kerja sama antarnegara ASEAN. Adanya penguatan jaringan dan kerja sama ini akan membuat mekanisme *knowledge sharing* dan *resource sharing* antarnegara ASEAN menjadi lebih baik. Sering kali potensi jaringan dan keterikatan di dalam ASEAN yang begitu besar selama ini tidak dimanfaatkan, alih-alih kita malah sering melihat berbagai macam perbedaan yang ada dengan kaca mata kecurigaan. Adanya kerja sama nyata antarnegara di kawasan ASEAN dalam pengembangan pendidikan diharapkan akan memunculkan kesamaan ritme dan irama dalam gerakan. Sehingga, bagi negara yang masih tertinggal dalam pendidikan dan kesejahteraan dapat belajar dari negara yang sudah mapan dalam hal tersebut.

Indonesia yang saat ini dipercaya menjadi garda terdepan ASEAN seharusnya menyadari dan memanfaatkan ASEAN sebagai sebuah potensi besar untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat negara-negara di ASEAN. Keberadaan ASEAN bisa menjadi aset dan senjata



yang ampuh untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam bidang pendidikan seperti pemerataan dan kualitas pendidikan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, seiring dengan langkah perbaikan kondisi pendidikan tersebut, langkah-langkah konkret pemanfaatan pendidikan sebagai gudang ilmu dan pusat riset pelajar maupun ilmuwan untuk kontribusi nyata kepada masyarakat harus dilakukan.

Oleh karena itu, Indonesia semestinya bisa merangkul dan membangun kerja sama yang sinergis dan berdaya antarnegara di ASEAN untuk memiliki keseriusan membangun pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Sehingga, rasa kepemilikan negara-negara anggota ASEAN terhadap ASEAN akan semakin menguat dan semakin kokoh untuk menghadapi persaingan global yang telah bergulir saat ini. Sifat egois harus ditanggalkan sehingga kita dapat mulai memandang bahwa ASEAN adalah sebuah identitas pemer-satu tersendiri bagi setiap anggotanya.[]







Memimpikan Indonesia Baru

MEMBANGKITKAN MANUSIA INDONESIA

M. Adi Nugroho

MAJU, mandiri, adil, dan makmur; itulah visi dari BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk arahan RPJPN dalam *Human Development Approach for Planning and Monitoring*. Sungguh besar cita-cita bangsa ini. Dan selalu besar cita-cita untuk membangun banga Indonesia yang lebih maju. Arahan yang dibuat untuk memperjelas manusia Indonesia dalam berkembang. Bukan mendorong sumber daya manusia yang ada menjadi seorang utopianis sejati. Tapi, ini untuk sebuah misi bangsa dari BAPPENAS, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab.

Membicarakan sumber daya manusia Indonesia pastilah membicarakan “orang Indonesia”. Seperti apakah manusia Indonesia sehingga perlu adanya pemberdayaan yang jelas dan rapi? Sangat lucu kalau muncul pemeco bahwa harga otak Indonesia sangat mahal bila dibandingkan dengan otak orang Jepang, Amerika, dan Jerman. Alasannya, otak “orang Indonesia” masih sangat bersih karena tidak pernah digunakan untuk bekerja. Memalukan, dan cerita itu masih bakal eksis dalam paradigma berpikir kita kalau Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni.



Pekerjaan rumah yang diemban bangsa ini sudah terlewat banyak. Sejarah sering kali hanya sekadar cerita rekaan yang mengasyikkan tanpa berniat diambil hikmahnya. Cita-cita di masa depan pun terkadang hanya dengungan untuk menggantungkan cita-cita setinggi langit. Sebuah titik poin yang setidaknya menjadi modal bangsa ini telah dibiarkan terbang ke langit tanpa ada yang kehilangan. Modal kedigdayaan bangsa Indonesia pada masa kerajaan lampau tak dapat dijadikan investasi utama. Potensi besar dengan sumber daya yang maksimal juga lekang pada emosi individualistis masyarakatnya.

Ada yang perlu dibenahi pada pola berpikir bangsa ini dari *wong gedhe* sampai *wong cilik*. Letaknya ada pada perombakan paradigma berpikir bangsa Indonesia. Setidaknya ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam membentuk paradigma baru itu.

Pertama, investasi mitologi bangsa yang menunjukkan kebesaran Indonesia pada masa lampau.

Kedigdayaan raja-raja Nusantara telah memberikan buktinya. Tak ada yang tidak mengenal keperkasaan kerajaan Sriwijaya yang telah menjadikannya kerajaan laut yang disegani pada masanya. Inilah bangsa kita. Bangsa besar yang memiliki sumber daya mumpuni sejak dulu. Hingga terakhir kita disuntikkan motivasi besar dari seorang Mahapatih Gadjah Mada dari Majapahit dengan Amukti Palapanya.

Mitologi ini bukan sekadar santapan anak kecil sebelum tidur. Tapi, mitologi ini haruslah dijadikan modal besar untuk bangsa besar. Dari mana datangnya keperkasaan bangsa Jerman saat Perang Dunia I? Keperkasaan itu muncul



dari adanya dominasi mitologi Arya. Sebuah mitologi yang membuat Adolf Hitler ingin menguasai dunia. Menurutnya, bangsa Arya adalah ras atas yang harus menguasai seluruh dunia hingga muncullah slogan *Deutschland Uber Alles*. Lalu bagaimana Indonesia?

Kedua, keberadaan manajemen sumber daya manusia.

Ada tugas berat untuk menyadarkan masyarakat; menyadarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Untuk melakukan tugas ini haruslah ada sebuah manajemen SDM. Anasir penting dalam *human resources* adalah adanya penempatan manusia sebagai subjek pembangunan, baik itu pembangunan dalam hal SDM maupun alam. Hakikatnya manajemen ini harus memiliki tiga jangka berpikir, yaitu masa lalu melalui mitos, masa kini, dan masa depan. Dengan manajemen *human resources* tersebut diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Berdasarkan data dari Program Pembangunan Bangsa-bangsa (UNDP), IPM Indonesia bergerak naik dalam 30 tahun terakhir, namun kemajuan yang dicapai masih berada di bawah kemajuan rata-rata regional.

Untuk memperbaiki pembangunan manusia, menginvestasikan modal kebesaran Indonesia di masa silam merupakan wujud pemberdayaan yang utama. Dengan demikian, Indonesia tidak boleh lagi minder saat berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa kita adalah bangsa yang besar dan bukan bangsa yang lemah. Tak ada lagi ucapan meragukan: "Inikah kita?" Tapi, merupakan sebuah kebanggaan bangsa: "Inilah Kita!"[]



MELIHAT PERANAN PENTING PEREMPUAN

Seztifa Miyasyiwi

ISU peranan perempuan dalam pembangunan nampaknya cukup mendapat perhatian yang besar. Pengakuan atas perlunya memperbaiki status perempuan dan meningkatkan peranan potensinya di dalam pembangunan tak lagi hanya dipandang dari masalah hak asasi manusia atau keadilan sosial saja. Tidak hanya soal hak asasi manusia dan keadilan gender, investasi untuk perempuan kini juga diakui menentukan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang berkesinambungan.

Analisis ekonomi mengakui bahwa pendidikan dan pelatihan yang rendah mutunya, tingkat kesehatan dan status nutrisi rendah, serta akses yang terbatas terhadap sumber daya tak hanya menekan kualitas hidup perempuan saja, namun juga membatasi produktivitas dan menghalangi pertumbuhan dan efisiensi ekonomi. Dengan demikian, peningkatan dan perbaikan status perempuan perlu dikejar, atas alasan kesejajaran dan keadilan sosial dan juga karena alasan rasa ekonomi dan merupakan praktik pembangunan yang baik.

Hal ini kemudian berfokus pada bagaimana mengintegrasikan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, tanpa banyak mempersoalkan sumber-sumber yang menyebab-



kan mengapa posisi masyarakat dalam bersifat interior, sekunder, dan dalam hubungan ter subordinasi terhadap laki-laki. Asumsinya, struktur sosial yang ada dipandang sudah *given*. Indikator integrasi perempuan dalam pembangunan diukur dengan indikator seperti partisipasi angkatan kerja, akses terhadap pendidikan, hak-hak politik dan kewarganegaraan lainnya.

Menurut perspektif feminis-Marxist, perempuan selalu menjadi pelaku penting dalam masyarakat sehingga posisi perempuan dalam arti status, kedudukan, dan peranannya akan menjadi lebih baik bila struktur internasional menjadi lebih adil. Asumsinya perempuan telah dan selalu menjadi bagian dari pembangunan nasional. Adapun menurut kaca mata *gender and development*, konstruksi sosial yang membentuk persepsi dan harapan serta mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sering merupakan penyebab rendahnya kedudukan dan status perempuan, posisi inferior, dan sekunder relatif terhadap laki-laki.

Kekuatan Mendasar

Sebenarnya adanya fenomena R.A. Kartini telah mengajarkan kepada kita bahwa para perempuan juga memerlukan pendidikan yang layak sebagaimana haknya sebagai manusia yang butuh hak atas pendidikan dan kebebasan hidup. Sayangnya, ada beberapa kalangan yang menyalahartikannya bahwa posisi perempuan harus sama bahkan sejajar dengan kaum laki-laki. Padahal, tanpa mempersoalkan masalah tersebut kita harusnya bisa memosisikan diri kita dalam kondisi apa dan lingkungan yang seperti apa perempuan bisa



mendapatkan hak-hak perempuan. Tentu dengan landasan agama yang kita anut sehingga tidak ada penyimpangan di dalamnya.

Selama ini, perekonomian dan segala aspek pendukung pembangunan sebagian besar memang dikelola oleh kaum laki-laki. Namun, di sisi yang lainnya, pernahkah kita berpikir tentang siapa yang mengajarkan moralitas dan etika di rumah atau sekeliling kita?

Selama ini perempuan diidentikkan mempunyai sifat dan perasaan yang lebih peka bila dibandingkan laki-laki. Atas dasar hal ini, dengan melihat secara objektif, justru negara kita ini bisa maju dan berkembang dengan adanya peran perempuan dalam pembangunan terhadap moral dan akhlak di suatu wilayah.

Ada perempuan yang biasa kita sebut ibu yang telah melahirkan kita dan mengajarkan kita tentang banyak hal. Di sekolah ada perempuan yang biasa kita sebut ibu guru yang dengan sabarnya penuh kasih sayangnya mengajarkan kita membantu melihat dunia. Dan di rumah kita apabila sudah menikah ada perempuan yang dengan setia menunggu di rumah dan menyambut dengan senyuman; perempuan ini biasa kita panggil dengan istri.

Yang perlu kita sadari terlebih dulu sebelum bicara ke-mauan perempuan adalah menyadari peran strategis yang utama dari perempuan. Bahwasanya yang paling menentukan diri kita dan yang paling berpengaruh terhadap kita adalah ibu kita. Dan dia adalah seorang perempuan. Karena semua bermula di sini, di hati.[]



SATU UNTUK SEBUAH KERAGAMAN

Ratih Kumala Dewi

KEANEKARAGAMAN hayati membuat kehidupan di Bumi ini menjadi bervariasi. Rantai makanan berputar tanpa henti, selalu ada yang terlahir dan berpulang ke sisi Tuhan setiap detiknya. Ada kala di mana para predator begitu jaya dengan makanan yang melimpah di habitatnya. Tapi, ada saat di mana para mangsa bisa bernapas lega karena mereka tak harus berurusan dengan para gigi tajam yang tiba-tiba menghilang satu per satu.

Keanekaragaman hati manusia pun menjadi sebuah roda kehidupan yang tak kalah menariknya dengan rantai makanan yang berputar semakin cepat dan tak beraturan kini. Dimensi kehidupan para pejuang hak asasi, ada kalanya begitu terasa kuat dan melekat di setiap belahan bumi ini. Akan tetapi, di waktu yang bersamaan, dimensi hidup para perusak peradaban yang berkedok pejuang kemerdekaan asasi, mulai melahap setiap semangat memperbaiki bumi secara perlahan. Pemanasan global hanyalah sedikit dari sekian banyak ulah yang dibuat oleh betapa beragamnya hati di setiap manusia ini. Sebuah keberagaman yang begitu kompleks. Jauh lebih kompleks dibandingkan keragaman agama, bangsa, suku, maupun status sosial. keragaman yang di satu sisi



dapat membuat era global semakin maju, tetapi di sisi lain, kepedulian terhadap moral dan peradaban semakin purba.

Sungguh, kita benar-benar hidup di dalam sebuah dunia yang sama sekali jauh dari homogenitas. Tidak ada satu pun studi ilmiah yang dapat menjelaskan secara detail berapa banyak ragam kehidupan di planet ketiga setelah Merkurius ini. Perkembangan ilmu dan teknologi setiap waktunya akan terus dan terus menambah jumlah keragaman baik secara biologi, teknik, genetik, sampai ke areal psikologis yang sampai saat ini masih terasa begitu abstrak.

Begitu sibuknya dunia ini akan sebuah keberagaman yang kompleks. Segala macam fenomena seperti perdebatan panjang akan sebuah nama spesies baru, kebijakan akan sebuah komunitas yang minoritas di sebuah negara, perselisihan atas perbedaan paham di tengah-tengah masyarakat, dan banyak hal lainnya membuat manusia disibukkan dengan banyak keberagaman.

Betapa menyenangkan bukan, memiliki keberagaman budaya di negara kita? Betapa indah bukan, melihat begitu banyak panorama yang memesona membentang di setiap sudut dunia? Betapa enak bukan, ketika kita datang ke sebuah rumah makan dan menemukan begitu banyak pilihan menu lezat yang menggairkan?

Ya, keragaman yang seperti ini patut kita banggakan dan kita rayakan. Betapa setiap kita adalah manusia yang beruntung karena terlahir bukan dengan wajah yang serupa. Bahkan para kembar di dunia ini pun tidak berharap jumlah kembar identik mereka adalah lebih dari sepuluh. Keragaman ini patut kita syukuri. Betapa kita terlahir dengan bakat,



kemampuan, dan impian yang berbeda-beda. Tidak bisa terbayangkan jika ada sebuah kehidupan di dunia ini yang dihuni oleh manusia-manusia yang semuanya berbakat dan ahli dalam bermain sepak bola. Lalu, siapa yang akan menjadi suporternya? Betapa tak menariknya, bukan?

Banyak suku bertikai karena perbedaan paham antara mereka. Betapa mengesankan, bukan? Perang saudara dan intimidasi kemanusiaan merajalela karena sebuah perbedaan ambisi. Betapa kesal, bukan? Begitu banyak jelata berkeliaran di muka Bumi, sementara para petinggi keliling dengan semua fasilitas yang didapat dari uang rakyat, karena sebuah perbedaan status sosial? Haruskah semua ini dirayakan?

Begitu banyak konsep perbedaan yang muncul di setiap belahan Bumi ini. Namun, banyak yang melupakan bahwa konsep persatuan adalah sebuah *buffer* bagi setiap keanekaragaman yang muncul. Ya, agar tidak ada sebuah alasan untuk berkilah bahwa manusia diciptakan benar-benar berbeda. *The rigin of species* sudah lama sekali dilupakan oleh dunia keilmuan. Tapi, masih saja banyak orang yang belum mengerti bahwa gen dalam tubuh kita adalah gen purba, yang sama sekali tidak berevolusi dan tidak berbeda dengan gen manusia 20.000 tahun yang lalu. Metabolisme dalam tubuh kita dalam mengenali dalam setiap benda asing yang masuk adalah sama dengan manusia pada masa Paleolitikum. Kesamaan yang amat signifikan antara manusia super modern saat ini dan manusia yang sangat purba dahulu.

Konsep sebuah negara juga tidak akan pernah meletakkan keberagaman sebagai tujuan utama bangsanya. Sebaliknya, seberagam apa pun sebuah negara, tetap akan



mengedepankan sebuah persatuan sebagai hakikat keberlangsungan hidup bangsanya. Konsep ini tergambar lewat moto beberapa negara di belahan dunia ini. Lihatlah:

- ♦ Malaysia: *Bersekutu Bertambah Mutu*: Bersatu Menjadi Kuat;
- ♦ Pakistan: *Yaqeen-mukkam, ittihad, nizam*: Percaya diri, kesatuan, disiplin;
- ♦ Pantai Gading: *Union, Discipline, Travail* : Kesatuan, Disiplin, Kerja;
- ♦ Papua Nugini: *Unity in Diversity*: Kesatuan dalam Kepelbagaian;
- ♦ Tanzania: *Uhuru na Umoja*: Kemerdekaan dan Kesatuan;
- ♦ Argentina: *En Unión y Libertad*: Dalam persatuan dan kemerdekaan;
- ♦ Belgia: *Eendracht Maakt Macht/L'union Fait la Force/Einigkeit gibt Stärke*: Bersatu teguh;
- ♦ Georgia : ძალა ერთობაშია! (Dzala ertobashia): Bersatu teguh;
- ♦ Haiti: *L'union fait la force*: Persatuan adalah kekuatan;
- ♦ Jerman: *Einigkeit und Recht und Freiheit* (Unity and Justice and Freedom): Persatuan dan keadilan dan kemerdekaan;
- ♦ Namibia: *Unity, liberty, justice*: Kesatuan, kemerdekaan, keadilan;

Dan tentu saja sebuah semboyan Bhineka Tunggal Ika: Berbeda-beda tapi satu jua (bukan: Satu tapi berbeda-beda).

Jadi, mari rayakan keragaman, lewat sebuah perasaan yang SATU. []



BERINVESTASI LEWAT PENDIDIKAN

Atiudina

MANUSIA adalah subyek dalam kehidupan ini. Dia diciptakan sebagai khalifah di muka Bumi, memimpin dan menyejahterakan Bumi. Oleh karena itu, sumber daya manusia ini perlu ditingkatkan kualitasnya (*up grade*). Salah satu cara peningkatan kualitas ini adalah dengan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bangsa yang ingin maju. Dengan keyakinan bahwa pendidikan yang bermutu dapat menunjang pembangunan di segala bidang.

Kemajuan atau tingkat kesejahteraan dari suatu bangsa juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya. Hal ini nyata terjadi, apalagi jika dikontekstualkan bahwa kesejahteraan yang dimaksud adalah mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan sangat dekat dengan kebodohan; begitu pula sebaliknya, kebodohan akan membawa pada kemiskinan. Logikanya, orang yang miskin akan kesulitan mengakses pendidikan karena keterbatasan dana, sementara orang yang tidak berpendidikan akan kesulitan mencari penghidupan (pekerjaan) yang layak untuk hidupnya, dengan kata lain, mereka hidup pada garis kemiskinan. Dua hal ini seperti mata rantai yang akan terus berputar dan menciptakan lebih banyak lagi penderitaan jika tidak segera diputus.



Menanam Pendidikan

Pendidikan memiliki definisi yang sangat luas. Secara umum, pendidikan adalah suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Dilihat dari tujuannya di atas, pendidikan menempati kedudukan penting: mengubah manusia menjadi lebih baik dan berkualitas. Jika semua tujuan pendidikan di atas tercapai, tentulah manusia berpendidikan akan menjadi sosok yang jauh lebih bermanfaat dan amanah dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka Bumi. Sebagai catatan, pendidikan di yang dimaksudkan sini bukanlah hanya pendidikan formal, namun juga meliputi pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Yang jelas, semua ragam pendidikan ini bertujuan ke capaian yang sama.

Pendidikan sangat berperan dalam membentuk pola pikir seseorang. Ini berbeda dengan harta benda. Orang yang berpendidikan semestinya luas pula pikirannya; namun belum tentu dengan orang yang kaya raya. Yang dipikirkan orang berpendidikan sejatinya bukan hanya dirinya sendiri, akan tetapi juga memberi manfaat kepada orang lain.



Tingginya tingkat kemiskinan di suatu negara selalu berbanding lurus dengan tingginya tingkat berpendidikan warganya. Kondisi ini tentu menjadi permasalahan serius bagi bangsa Indonesia. Tidak bisa tidak, hal ini harus segera dihentikan. Untuk memutus permasalahan ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Dalam hal ini, pemerintah tetap memiliki porsi tanggung jawab yang lebih besar untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang mampu diakses oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Belajar dari India

Pendidikan adalah investasi besar bagi bangsa ini. Demi kemajuan bangsa Indonesia dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, pendidikan haruslah diprioritaskan. Hal ini menjadi syarat mutlak. Hal serupa pernah dilakukan India.

Bisa kita saksikan bagaimana pesatnya perkembangan yang dialami India. Negara yang tadinya dipandang sebelah mata oleh banyak kalangan ini, kini menjadi kiblat pendidikan dalam teknologi informasi, medis, dan manajemen, menyaingi Amerika Serikat dan Inggris. Universitas-universitas di India memiliki reputasi internasional. Dosen-dosennya pun menjadi pengajar kelas internasional. Para ilmuwannya juga berkali-kali dunia. Penelitian-penelitian sangat berkembang di sana.

Apa imbasnya ke rakyat India? Kehidupan masyarakat di sana pun lambat laun membaik. Kemiskinan berkurang, tingkat kematian menurun. Mari kita bayangkan, hal itu terjadi lima tahun yang lalu, dan sekarang India menjadi rak-



sasa pendidikan yang mampu menyaingi Australia, bahkan melampauinya. Hal ini karena pemerintahannya memiliki perhatian dalam bidang pendidikan. Tidak kurang sebanyak Rp 44 triliun dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Inilah komitmen pemerintah India. Mereka sadar betul akan pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya bisa dipastikan berhasil, meskipun jangka waktu menuainya tidak sebentar.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Hari ini kita masih sering mendengar sekolah ambruk hingga menewaskan siswa; guru-guru mengeluhkan rendahnya perhatian pemerintah; dan segudang persoalan lainnya.[]



'POSITIVE LEARNING', DAN PROBLEM PENDIDIKAN TINGGI

Nur Saudah Al Arifa D.

PENDIDIKAN merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak mulia, baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani. Manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki moralitas tinggi sangat dituntut untuk dibentuk atau dibangun.

Pemerintah Indonesia semestinya tidak hanya beretorika soal pentingnya pendidikan, namun sudah saatnya merealisasikan konsep pendidikan dengan cara pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan SDM secara berkelanjutan dan merata.

Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi merupakan sarana pembudayaan dan penyaluran nilai. Dalam pendidikan tinggi, mahasiswa harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurang-kurangnya tiga hal paling mendasar, yaitu: (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi



pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

'Positive Learning'

Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas SDM karena turut menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini merupakan masa emas namun kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Menurut Simon Philips (2008), karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Sedangkan Doni Koesoema A (2007) memahami bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai "ciri", atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan.

Sementara Winnie memahami bahwa istilah karakter memiliki dua pengertian. *Pertama*, ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut memanasifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanasifestasikan karakter mulia. *Kedua*, istilah karakter erat kaitannya dengan '*personality*'. Seseorang baru bisa disebut



'orang yang berkarakter' (*a person of character*) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral.

Adapun Imam al-Ghazali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi.

Untuk membentuk peradaban bangsa dibutuhkan karakter yang kuat dalam menjalankan sistem pendidikan itu sendiri, salah satunya dengan metode *Positive Learning* yang merupakan metode pembelajaran berbasis pada kaidah moral dan akhlak, karena dengan moral dan akhlaklah karakter dalam pendidikan bisa terbentuk. Aplikasi *Positive Learning* lebih menunjuk pada *ruh* atau *spirit* selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan.

Peran dosen dalam pembelajaran *Positive Learning* adalah menjadi fasilitator, memberikan motivasi positif, dan memfasilitasi pengalaman belajar serta mendampingi mahasiswa memperoleh tujuan pembelajaran. Sedangkan Mahasiswa berperan sebagai pelaku utama (*student center*) yang memaknai proses pengalamannya belajarnya sendiri. Sehingga, mahasiswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif.

Proses pendidikan terjadi apabila antarkomponen yang ada dalam pendidikan itu saling berhubungan secara fungsional dalam suatu kesatuan yang terpadu. Mobil akan berjalan dengan baik apabila komponen mobil, sopir, dan jalan masing-masing berperan secara fungsional.



Salah satu konsep pembelajaran yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara adalah konsep *Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*. Semboyan tersebut mempunyai arti yang mendalam. Bagaimana tidak, jika semua civitas akademika mampu memosisikan diri dan bekerja sama, yang di depan selalu menjadi garda terdepan dalam memberikan teladan yang positif, yang di tengah mampu menciptakan peluang untuk berprakarsa, kemudian yang di belakang mendukung dengan memberikan arahan dan dorongan yang positif. Jika ketiga ini bisa bersatu padu tentunya akan menghasilkan karakter positif dan membentuk sebuah peradaban pendidikan yang bersinergi.

Menurut Dewantara, dalam pendidikan nilai rohani lebih tinggi dari nilai jasmani. Hal ini ditunjukkan langsung melalui penampilannya yang sederhana, namun memiliki visi pendidikan yang jauh maju ke depan. Siswa yang bersekolah di Taman Siswa bukanlah ingin menjadi PNS, melainkan ingin menjadi sosok yang mandiri dan untuk melanjutkan perjuangan. Oleh karena itu, sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah satu aspek yang penting untuk membangun karakter bangsa yaitu *religiusitas*. Urgensi nilai-nilai agama dalam pendidikan yang hadir di tengah-tengah arus globalisasi saat ini muncul sebagai suatu respons yang terlahir dari hidup dan kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah masuk ke seluruh sistem kehidupan dengan berbagai variasi. Karakter manusia yang menghendaki kemudahan telah membawanya menuju peradaban manusia yang serba instan, cepat, dan simpel yang pada akhirnya akan membawa kehampaan hidup



bila tidak dilandasi dengan moral dan iman. Agamalah yang memberi tahu tujuan dan arahan yang jelas dalam menapak masa depan yang cerah. Realita inilah kiranya yang mengingatkan kita kepada perkataan Albert *Einstein* bahwa “ilmu tanpa agama adalah buta.”.

Dampak ‘Positive Learning’

Melalui *Positive Learning* diharapkan dapat mengasah karakter untuk senantiasa berpikir kritis, kreatif, dan positif sesuai norma yang berlaku.

Saat ini marak program yang berkaitan tentang Program Kreativitas Mahasiswa, yang merupakan salah satu ajang bergengsi di Indonesia. Tentunya dengan program tersebut diharapkan mampu mengasah karakter positif kemandirian mahasiswa, karena pada dasarnya kemandirian merupakan salah satu tujuan pendidikan dan pengajaran sehingga perlu mendapat perhatian lebih. Kemandirian merupakan sebuah tolok ukur keberhasilan pendidikan karakter yang membanggakan bagi para pendidik di mana pun; bukan hanya di perguruan tinggi saja. Melalui *Positive Learning*, tentunya setiap metode pembelajaran diarahkan pada hal-hal yang positif guna membentuk pribadi yang berkarakter positif pula.

Pemikiran tersebut didasari fakta bahwa ternyata pendidikan saja belumlah cukup untuk membuat hidup seseorang berkarakter. Kian banyak oknum berpendidikan tinggi yang justru melakukan kejahatan. Sebut saja penggelapan pajak dan makelar kasus yang banyak dibahas di media. Jadi, semakin tinggi pendidikan seseorang, jika tidak diarahkan pada hal yang positif, maka ia cenderung melakukan hal-



hal yang menyimpang. Namun sebaliknya, semakin tinggi pendidikan seseorang yang kemudian diarahkan ke hal-hal positif, maka bisa jadi orang-orang itulah yang akan menjadi tonggak perbaikan bangsa ini. Di sinilah pendidikan karakter berbasis *Positive Learning* dibutuhkan, agar mengarahkan para civitas akademika senantiasa berperilaku dan berkarakter positif untuk membangun peradaban bangsa.

Refleksi

Membangun sebuah peradaban bangsa yang baik dan kuat, bukanlah pekerjaan sederhana yang dapat dilakukan dengan sekali ayunan tangan. Bagaimanapun juga ada kekuatan-kekuatan eksternal dan tantangan globalisasi yang turut menghambat tatanan masyarakat yang sedang kita bangun.

Peradaban bangsa terkait erat dengan karakter positif hasil pendidikan di suatu bangsa. Suatu bangsa akan sukses menggapai kemajuannya jika mayoritas warganya berkarakter positif. Namun sebaliknya, jika mayoritas warganya berkarakter negatif, maka dapat dipastikan bangsa itu tidak bisa maju. Hal ini dikarenakan suatu bangsa yang warganya berkarakter positif sudah memiliki modal dasar untuk menggapai kemajuan, seperti sifat jujur, mandiri, bekerja sama, patuh pada peraturan, bisa dipercaya dan lain-lain.

Jadi, jangan salahkah bila selagi pendidikan tinggi kita masih belum bisa menghasilkan karakter positif, masih banyak lulusannya yang menduduki jabatan penting tidak se-gan-segan untuk bertindak korup.[]



MENGHANCURKAN BUDAYA KORUPSI

M. Adi Nugroho

KORUPSI ibarat candu yang membudaya; Mochtar Lubis bahkan menyebut korupsi sebagai budaya Indonesia. Pelakunya bukan saja elit (pemimpin dan pejabat publik) namun juga rakyat alit. Berinteraksi dengan tradisi bekerja sama yang positif, korupsi justru berpadu melahirkan budaya baru: gotong-royong korupsi.

Lalu, bisakah menghancurkan sebuah budaya?

Kultur korupsi tidak bisa dihancurkan hanya dengan perbaikan struktur atau birokrasi. Kultur korup lahir dari sebuah perjalanan sejarah yang panjang. Pelacaknya jatuh pada identitas pola pemerintahan bangsa kita, yaitu kerajaan.

Akar Korupsi

Pola korupsi bangsa ini sebenarnya bisa dilacak pada masa kerajaan dengan sistem oligarki absolutnya. Buku-buku sejarah sering membahas soal upeti dan perebutan kekuasaan. Feodalisme Nusantara mengajarkan hal dasar korupsi, yaitu tidak dipisahkannya kepentingan atau kekayaan privat dan publik. Birokrasi menanamkan kekuasaan sebagai sumber kekayaan.



Penumpukan kekuasaan inilah yang menjadi metode partai politik saat ini. Mengamankan sebuah posisi yang berminyak dan berlicin untuk kepentingan mereka meraup uang rakyat. Kasus Nazaruddin adalah kasus terbaru dan nyata adanya pemanfaatan kekuasaan. Posisinya sebagai bendahara partai penguasa dia campur adukkan dengan kepentingan mengeruk uang lewat proyek-proyek besar milik pemerintah.

Praktik korup saat ini bukan fenomena baru, melainkan sudah lama terajarkan oleh nenek moyang kita terdahulu. Mentalitas feodal yang masih melekat, mendahulukan saudara lalu teman kemudian rakyat, adalah nepotisme klasik. Pengurus partai, penerus jabatan, sampai isi dari birokrasi adalah saudara. Inilah yang terjadi, ketika dulu seorang raja terbiasa mengangkat bupati atau demang dari kalangannya sendiri dan masih bertalian darah.

Praktik korupsi yang membudaya tidak monopoli ditularkan oleh adanya feodalisme raja-raja Nusantara. Clive Day (1966) pernah menyoroti peran VOC dan pemerintahan kolonial pada saat itu sebagai lembaga yang memperkenalkan tradisi korupsi secara struktural birokratis. Dengan sistem penggajian pajak atas tanah dan hasilnya, praktik korupsi menjadi ladang basah bagi kaum priyayi untuk mendapatkan kekuasaan yang dibagi-bagi.

Pemerintahan Terbuka

Kekuasaan mutlak seorang raja sering memicu perebutan kekuasaan, birokrat yang bermuka manis pada atasan, dan tidak bisa dibedakannya harta privat dan publik. Tegasnya,



oligarki mutlak di masa kerajaan adalah pemerintahan tertutup yang tak tersentuh rakyat.

Pola pemerintahan adalah musabab akut korupsi sampai sekarang ini. Maka, untuk menghancurkan budaya korupsi di Indonesia dibutuhkan keberanian mengubah pola-pola lama kekuasaan feodal. Pemerintah harus menerapkan pemerintahan terbuka atau *open government*. Harus ada transformasi birokrasi, dan pemerintahan bukan hal privat layaknya hak raja-raja. Privatisasi kekuasaan adalah sebuah keniscayaan, meskipun menjadi malapetaka besar bagi yang telanjur menikmatinya.

Jurgen Habermas menyebut upaya tersebut sebagai 'demokrasi deliberatif' yang didasarkan pada partisipasi publik (*public share*). Titik penting dari demokrasi deliberatif adalah adanya diskursus di antara kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan rakyat. Ada respons komunikasi yang menghasilkan sebuah sintesis. Kebijakan demokrasi yang semula terindividualisasikan menjadi tersosialkan karena mengharuskan partisipasi. Masyarakat dan pemerintah bahu-membahu membuat kebijakan.

Korupsi sejatinya lahir dari sektor birokrasi karena tidak adanya *public share* atau partisipasi. Alhasil, kita tak tahu-menahu mengenai kinerja mereka apalagi transparansi lahirnya sebuah kebijakan dan proyek-proyek yang menggunakan uang rakyat. Ketertutupan inilah yang kemudian menjadi jalan menuju korupsi.

Dalam pemahaman Habermas, lingkup privat adalah sumber problem. Maka, menjalankan privatisasi birokrasi menjadi langkah penting. Sepanjang masih dalam ruang pub-



lik, semua bisa terawasi dengan baik. Terlebih lingkup publik menurutnya ditentukan oleh *civil society* yang kuat: terdiri dari komunikasi serta relasi nonpemerintah dan nonekonomi yang melandasi struktur komunikasi lingkup publik.

Keberadaan partisipasi publik selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan terbuka (*open government*). Pola yang mengedepankan keterbukaan dalam berpolitik. Hal-hal yang menjadi pegangan adalah transparansi, partisipasi, dan kolaborasi.

Transparansi menjadi kunci utama pencegahan korupsi di pemerintahan. Birokrat harus terbuka pada masyarakat secara proaktif, bukan diminta oleh masyarakat. Transparansi mengharuskan adanya akuntabilitas dan penyediaan informasi bagi warga negara mengenai kegiatan yang dilakukan pemerintah. Termasuk transaksi keuangan belanja negara yang digunakan. Negara pun telah mengamankan dalam UUD No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adanya partisipasi publik mewajibkan pemerintah melibatkan mereka sebagai wujud peningkatan kualitas serta efektivitas pembuatan kebijakan. Partisipasi publik dalam pemerintah telah tertera UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional. Di dalamnya mengamankan prinsip-prinsip perencanaan yang mengetengahkan partisipasi masyarakat atau konsultasi publik dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah, serta prinsip-prinsip koordinasi perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah dalam dua arah: *top-down* (dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah) dan *bottom-up* (dari aspirasi daerah ke pemerintah pusat). Dengan logika ini, masyarakat bukan lagi sekadar ob-



jek pembangunan, tetapi menjadi subjek bersama-sama menentukan arah kebijakan negara. Alhasil, kolaborasi menjadi penunjang itu semua, melibatkan masukan dari semua elemen masyarakat.

Dengan pendekatan partisipasi publik di atas, bukan tidak mungkin budaya korupsi akan hancur dari negeri ini. Dengan semangat dan kesungguhan tinggi yang diiringi keterbukaan pemerintah, maka korupsi perlahan kita kikis dari negeri ini.[]



MEDIA DAN KEBANGKITAN BANGSA

Nestiyanto Hadi

PERINGATAN Hari Kebangkitan Nasional setiap 20 Mei selayaknya tidak sebatas peringatan seremonial belaka. Dengan kesadaran yang kita miliki, sudah seharusnya nostalgia sejarah diiringi dengan tindakan nyata demi perbaikan bangsa.

Untuk itu, diperlukan suatu sikap, tindakan, dan kegiatan yang merupakan buah pikiran dari penjabaran kebangkitan nasional tersebut. Jadi, harus ada peran-peran yang dapat kita kontribusikan untuk kemajuan bangsa, sesuai kemampuan dan bidang keahlian masing-masing personal. Peran-peran yang bersifat kolektif dan secara bersinergi membangun masyarakat Indonesia.

Sinergisitas peran yang kita miliki dapat terealisasi baik dengan adanya media. Media tersebut yang dapat menyampaikan ide-ide atau gagasan dari satu personal ke personal yang lainnya. Sehingga, media mampu menjadi jembatan yang dapat menjembatani individu-individu menjadi satu kesatuan komunitas yang utuh dan solid.

Dalam perjalanannya, media telah mampu menggoreskan tinta emasnya dalam sejarah panjang bangsa kita. Hal itu terbukti dalam perannya mengawal kemerdekaan bangsa mulai dari sebelum proses detik-detik proklamasi diucapkan



hingga masa sekarang ini. Sampai sekarang, media masih gigih menyokong proses kemajuan bangsa kita ini.

Andil Media

Saat masa-masa penjajahan, media hadir sebagai suatu alat yang dapat menyatukan keberagaman bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Sebagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Sarekat Islam (SI) saat itu. SI yang di awal berdirinya memiliki nama Sarekat Dagang Islam (SDI) merupakan organisasi awal tingkat nasional bangsa, yaitu berdiri pada tahun 1905. SI secara terang-terangan menyampaikan sikapnya untuk menolak penjajahan yang dilakukan Belanda terhadap negeri ini. Demi menyebarkan semangat kemerdekaannya serta semangat untuk menghimpun sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia guna merealisasikan harapan suci itu, SI menggunakan media dalam bentuk selebaran-selebaran maupun media cetak sederhana lainnya.

Di saat detik-detik menjelang kemerdekaan, media muncul sebagai perpanjangan tangan semangat para proklamator kita. Ketika itu bangsa kita telah akrab dengan radio. Sebagaimana yang terekam dalam sejarah, saat semua rakyat Indonesia yang tidak dapat hadir langsung di Jalan Pegangsaan Timur, berduyun-duyun berbaris rapi di lapangan terbuka seraya mendengarkan dengan saksama detik-detik proklamasi tersebut meskipun hanya dengan sebuah radio kecil tua kala itu. Sekali lagi, media mampu menunjukkan performa perannya yang signifikan bagi bangsa ini. Lewat andil media, detik-detik proklamasi dapat tersebar meluas ke seluruh penjuru negeri.



Ternyata sejarah media tidak hanya berakhir di detik-detik proklamasi tetapi hingga hari ini media tetap mampu menunjukkan performa terbaiknya dalam menunjang kebangkitan bangsa. Peran media kini bertambah meningkat seiring terjadinya kemajuan di bidang teknologi. Jika dulu hanya sekadar selebaran, kini media cetak sudah dalam bentuk koran ataupun majalah-majalah dengan kemasan yang menarik. Jika dulu radio lokal menjadi andalan utama, maka kini media sudah dapat diakses bahkan lintas negara melalui jendela internet.

Oleh karena itu, kini kita bisa mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dengan cara yang cepat, efisien, dan praktis. Bahkan, kini sudah tidak ada lagi batas geografis yang memisahkan, yang ada kini istilah *dunia tanpa batas*.

Dalam wujud barunya, kini media dapat diartikan sebagai personal individu-individu yang memberikan informasi kepada orang lain. Mereka menggunakan fasilitas-fasilitas dunia maya yang kini makin digandrungi khalayak ramai. Adapun fasilitas yang umum digunakan antara lain *social network* (misalnya Facebook, Twitter, dan Plurk). Fasilitas-fasilitas tersebut memiliki prinsip penyampaian informasi yang diawali dari personal individu. Setelah isu terangkat, maka akan ada respons dari orang yang lainnya. Dengan begitu, isu yang diangkat dapat semakin luas menyebar ke kalangan masyarakat umum.

Adanya fasilitas media jejaring sosial semakin memudahkan distribusi informasi ke masyarakat. Jika dahulu kita harus membeli koran untuk mendapatkan informasi atau berjalan ke tempat kejadian secara langsung, kini masyarakat



dapat mengakses informasi langsung di genggaman tangannya. Itu tidak terlepas dari kemajuan teknologi di era digital sekarang.

Dengan meningkatnya performa media yang ditunjang dengan teknologi, menjadikan kita tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga kita dapat menyampaikan informasi atau iklan dengan mudah. Jika saja dahulu harus membayar mahal untuk sekali menyebarkan iklan, maka kini bisa dengan murah menyebarkan iklan. Begitu pula waktu yang dibutuhkan juga semakin efisien. Dengan aktif di jejaring sosial, kita bisa memperbarui (*up date*) sendiri berita atau iklan dari produk-produk yang dihasilkan. Tanpa mengeluarkan tenaga dan biaya yang besar, masyarakat bisa menghemat pengeluaran dengan optimal. Oleh karena itu, seharusnya harga jual suatu produk bisa relatif lebih murah dibandingkan sebelumnya. Dengan begitu masyarakat akan merasakan efeknya secara langsung.

Selain memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi dan meningkatkan efektivitas perekonomian, media jejaring sosial dapat berfungsi juga sebagai kontrol publik bagi roda pemerintahan. Media jejaring sosial menjadi sangat efektif dalam mengkritisi suatu kebijakan pemerintah. Terutama kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat marjinal. Dengan adanya media jejaring sosial ini, dapat memungkinkan terjadinya perubahan gerakan dari para aktivis. Jika dulu aktivis harus turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya, maka kini para aktivis dapat menggunakan media jejaring sosial tersebut untuk menyebarkan aspirasi mereka. Oleh karena itu, biaya dan tenaga yang dikeluarkan pun bisa lebih efisien dan tepat sasaran.



Ekses Media

Itulah peran media kontemporer yang terus-menerus mengawal kemajuan bangsa ini. Hanya saja, kita harus memahami bahwa media akan memberikan dua efek, yaitu positif dan negatif. Ibarat sebuah pedang, jika ia dipegang oleh orang yang buruk maka pedang itu dapat mengancam orang banyak. Namun jika pedang itu dikendalikan oleh orang baik, maka pedang itu akan memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain.

Media akan bernilai negatif jika digunakan untuk menyebarkan materi-materi pornografi, hal-hal yang menyangkut SARA, serta digunakan untuk hal-hal yang menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Media pun tidak akan bernilai lebih jika hanya digunakan untuk sekadar ajang bergosip atau sekadar membeo dari pendapat orang lain tanpa adanya *check and balancing*.

Kita mengharapkan media bisa menjadi suatu hal positif bagi kehidupan bernegara. Media mampu memberikan performa terbaiknya di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, bahkan pendidikan ilmu pengetahuan. Media akan sangat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat umum. Dalam hal ini kaum muda dituntut untuk bergerak lebih guna menyosialisasikan penggunaan media yang sehat. Dengan begitu terjadinya sinergisitas antara pemuda, pemerintah, dan media dalam memaknai Hari Kebangkitan Nasional secara hakiki. Pemaknaan yang tidak hanya kata tapi juga berbuah hasil yang bermanfaat bagi bangsa dan Negara Indonesia.[]



MEMBENAHİ MUSEUM, MEMBENAHİ INDONESIA

Muhammad Al-Mujabudda'wat

PERTENGAHAN Maret 2011 santer mengemuka berita terbengkalainya Pusat Dokumentasi Sastra Hans Bague Jassin (PDS HB Jassin) akibat yang kekurangan dana. Anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepanjang 2009-2011 turun setiap tahunnya. Pada 2011, museum yang berdiri sejak tahun 1976 itu hanya menerima anggaran Rp 50 juta setahun. Jumlah anggaran yang sangat kecil untuk mengelola pusat dokumentasi sastra terbesar di Indonesia. PDS HB Jassin menyimpan sekitar 50 ribu koleksi karya sastra, yang merupakan aset penting bagi negara yang terdiri atas dokumen langka dari masa kolonial hingga reformasi, serta sastra modern.

Kenyataan yang dialami oleh PDS HB Jassin adalah permasalahan klasik yang sebenarnya dialami pula oleh sebagian besar museum di Indonesia. Museum milik negara pada umumnya cenderung bersikap pasif. Maksudnya, pengelola lebih banyak mengandalkan anggaran pemerintah yang tentu saja terbatas pada kewajiban terhadap perawatan dan penyimpanan koleksi berupainggalan materi yang memiliki nilai budaya atau identitas bangsa sesuai dengan UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan alokasi dana pas-



pasan, pengelolaan museum pun ala kadarnya. Dampaknya, tidak ada inovasi penyajian museum bagi khalayak, terutama di dalam negeri. Tanpa adanya pembaruan, tidak heran bila banyak museum di negeri kita selalu tampak sepi pengunjung. Kesan membosankan sudah mengemuka. Lain halnya dengan museum-museum di luar negeri, yang menjadi sebuah kebanggaan dengan menampilkan kebudayaan dan sejarah bangsanya, menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara.

Mengapa museum-museum di luar negeri begitu dihargai dan menjadi kebanggaan? Karena di sana museum menjadi tempat rekreasi keluarga, tempat bermain, dan menjadi tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya budaya yang luar biasa, seperti PDS HB Jassin yang menjadi salah satu penyimpan koleksi sastra terlengkap di dunia. Sayangnya, kondisinya kini sungguh berbeda dengan museum-museum di luar negeri. Jakarta—yang memiliki 64 museum sehingga menyandang predikat provinsi dengan jumlah museum terbanyak—lebih terkenal bukan karena keberadaan museumnya, melainkan dikenal sebagai kota belanja dan kota metropolitan. Artinya, mal dan pusat-pusat hiburanlah yang lebih menarik sebagai destinasi utama keluarga.

Menurut International Council of Museums (ICOM) 2004, definisi dari museum adalah “institusi permanen dan nirlaba yang melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengonservasi, meriset, menginformasikan, dan memamerkan benda materi kepada masyarakat untuk kebutuhan studi penelitian, pen-



didikan, dan kesenangan.” Berdasarkan definisi ICOM ini, museum-museum di Indonesia kebanyakan belum memenuhi fungsi kesenangan dan penginformasian kepada masyarakat. Museum-museum di Indonesia yang selalu sepi pengunjung disebabkan karena museum terkesan membosankan, suram, tidak ada yang menarik, tidak menyenangkan, kotor, tidak terawat, atau bahkan tidak diketahui keberadaannya lokasinya.

Untuk menarik pengunjung, ada baiknya pihak pengelola museum menggunakan sudut pandang strategi pemasaran produk. Museum perlu mencari tahu kebutuhan pengunjung. Setelah mengetahui apa yang diinginkan oleh pengunjung, museum melakukan proses komunikasi intern untuk mempersiapkan dan menyediakan keinginan pengunjung sesuai dengan kategori pengunjungnya.

Menurut Eileen Hooper-Greenhill, pengunjung museum dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu pengunjung keluarga, pengunjung dari kelompok pendidikan, dan pengunjung dengan kebutuhan khusus. Museum adalah tempat yang paling ideal sebagai wadah *edutainment*. Museum berfungsi sebagai tempat untuk pembelajaran sekaligus tempat yang dapat membuat pengunjungnya terhibur. Untuk menyampaikan informasi dan misi edukasinya kepada masyarakat, museum harus mampu memberikan dan memperluas aksesnya kepada masyarakat dengan cara menerapkan penggunaan teknologi digital di dalam museum agar mempermudah pengunjung dalam mengakses informasi. Perluasan akses harus dapat menjangkau semua lapisan masyarakat termasuk pengunjung dengan kebutuhan khusus, yaitu pengunjung dengan cacat fisik yang selama ini masih terabaikan. Beberapa



museum di Indonesia telah menerapkan konsep *edutainment* dan wisata museum dengan dekorasi yang menarik, contohnya Museum Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia, dan Museum Polri.

Agar dapat mengaplikasikan berbagai ide dan inovasi baru ke dalam museum, kita perlu kembali ke permasalahan klasik yang dihadapi oleh sebagian besar oleh museum milik negara: anggaran sebatas untuk menyimpan, memelihara, dan memamerkan. Padahal, saat yang sama, paradigma masyarakat terhadap museum-museum di Indonesia harus mulai dipahami, yakni bahwa mereka ingin memperoleh kepuasan tersendiri setelah berkunjung ke museum. Untuk itulah pengelola museum harus bersikap aktif; tidak hanya menjadi sebuah lembaga di bawah dinas pemerintah dengan kondisi yang terkesan kaku.

Museum juga perlu menjadi lembaga mandiri yang memiliki sistem manajerial otonom, baik di bidang teknis maupun non-teknis. Museum perlu menerapkan strategi manajemen usaha keuangan seperti lembaga profit marketing yang profesional dan mandiri. Manajemen museum harus menyusun proses perencanaan pemasaran, strategi pemasaran yang terpola, taktik pemasaran yang terpadu, alokasi anggaran yang terkendali, tujuan pemasaran yang tepat guna melalui keberadaan pengunjung dan pencarian dana (*fund raising*).

Semua usaha di atas harus didukung oleh rekrutmen sumber daya manusia yang berkompetensi di bidangnya. Misalnya merekrut sarjana ekonomi untuk mengelola pendanaan, dan sarjana arkeologi untuk menerapkan museologi ke



dalam museum. Hal pertama dalam menyikapi permasalahan seperti dalam kasus PDS HB Jassin adalah mencari sumber pendanaan mandiri, seperti yang dijabarkan sebelumnya. Reputasi sumber daya koleksi PDS HB Jassin yang langka memiliki potensi nilai jual tinggi untuk mencari sponsor, dengan tetap menjaga sikap netral, tanpa ikatan suatu aliran politik tertentu. Di sisi lain, walaupun museum merupakan institusi nirlaba, bukan berarti kegiatan yang bersifat profit tidak bisa dilakukan, sejauh kegiatan itu demi keberlangsungan dan kemajuan museum.

Setelah kebutuhan dana telah terpenuhi, ide dan inovasi apa pun bisa diwujudkan. Dengan begitu, museum-museum di Indonesia yang menyimpan kekayaan sejarah, budaya, dan identitas bangsa, bukan mustahil tumbuh menjadi lembaga besar yang menjadi andalan daya tarik utama wisata yang mendunia, seperti Musée du Louvre di Paris dan Museo Nacional del Prado di Madrid. []



PERUBAHAN ALA 'GREEN CONCEPT'

Purnawati Hustina Rachman

BUMI, rumah kita tercinta, diberkahi dengan sistem penunjang kehidupan yang sangat baik sehingga dapat memperbarui dirinya sendiri; sangat besar sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari miliaran orang. Tetapi, berabad-abad sudah kita mengambil apa yang diberikan oleh Bumi, berpikir bahwa kapasitasnya tak terbatas. Seiring waktu berjalan dan populasi meningkat pesat, Bumi mengungkapkan rasa terganggunya. Kecuali kita berhenti menyalahgunakan sistem penunjang hidup kita yang utama, mereka ini akan hancur. Kita harus menjaga mereka, atau membayar dendanya.

Selama berabad abad, manusia telah memompakan partikel dan gas ke atmosfer, mengotori udara bersih yang dulu pernah kita punya. Sungai dipenuhi oleh sampah, menghancurkan ekosistem. Kebiasaan konsumtif egois manusia seperti penggunaan AC, deforestasi, dan energi. Seluruhnya berujung kepada masalah penting yang kita hadapi sekarang: pemanasan global.

Kebanyakan peneliti setuju bahwa polusi dan gangguan lingkungan lainnya terus meningkat, hasilnya adalah kerusakan yang tidak dapat dikembalikan terhadap siklus ekologi dan keseimbangan alam yang merupakan tempat



bergantungnya seluruh kehidupan. Para peneliti memperingatkan bahwa perubahan dasar dan mungkin drastis dalam perilaku manusia dibutuhkan untuk menghindari krisis lingkungan. (Zimmerman, 2008).

Green Concept

Jadi, apa yang dapat kita lakukan dengan tangan kita untuk menolong bumi ini? Tak terhitung. Kreativitas dan keinginan untuk membuat perbedaan adalah upaya yang tidak berhenti untuk melakukan sesuatu untuk rumah kita ini. Langkah kecil tapi meyakinkan dapat dilakukan untuk menjamin bahwa kehidupan di Bumi menjadi lebih baik, tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk lingkungan tempat kita tinggal.

Sebagai contoh, ada sekelompok mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang berinisiatif untuk mengumpulkan harapan dan mimpi mereka terhadap lingkungan menjadi komunitas *Go Green*. Green Concept adalah sebutan bagi mereka, sebuah komunitas dari pemuda dengan ambisi besar untuk mengubah dunia. Relawan penuh ketulusan ini tidak mengharap apa pun kecuali lingkungan yang bersih dari polusi dan limbah.

Berbagai aktivitas telah dilakukan oleh kelompok pemuda ini untuk mengurangi efek pemanasan global. Aktivitas yang beragam mulai dari menggali lubang biopori di rumah dosen IPB hingga merayakan Hari Pohon dunia dengan memberikan bibit kepada masyarakat lokal.



Aksi nyata seperti mengambil sampah dari jalanan sebagai kampanye membuang sampah pada tempatnya dan kampanye antiplastik juga diadakan oleh Green Concept. Dukungan dari berbagai teman, lingkungan, dosen bahkan Rektor IPB memberikan Green Concept motivasi terus-menerus untuk menjaga aktivitas ini tetap berlanjut dan memberi kontribusi terhadap lingkungan.

Satu hal yang membuat mereka bersatu adalah misi mereka untuk mengubah planet ini menjadi tempat yang lebih baik untuk dihuni. Selain itu, menciptakan lingkungan yang jauh dari efek pemanasan global, dan memberikan senyum sederhana bagi generasi muda di bawah mereka: untuk mereka yang kurang beruntung untuk merasakan efek dari dunia sekarang.

Mereka percaya bahwa setiap tindakan kecil mampu memberikan perubahan. Jadi, siapa bilang pemuda tidak dapat melakukan banyak hal? Mereka mampu. Pemuda pembuat perubahan di dunia.[]



MEMBANGUN DESA BERBASIS PEMBERDAYAAN WARGA

Ary Santoso

BERBAGAI upaya pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah, baik di Pusat maupun di berbagai daerah dengan sistem otonominya. Di antaranya adalah dengan memajukan sektor pariwisata. Satu bentuk programnya adalah menghadirkan desa-desa wisata, sesuai dengan potensi dan keunikan yang dimiliki masing-masing.

Upaya pembangunan yang ditujukan untuk mengembangkan desa tidak terlepas dari kentalnya kearifan lokal masyarakat di desa wisata itu. Kearifan lokal tersebut bisa dijadikan faktor penunjang pengembangan program tersebut. Saat bersamaan, masyarakat setempat menaruh harapan besar adanya korelasi positif antara pembangunan dan peningkatan taraf hidupnya. Sejatinya, kearifan lokal sebagai faktor penunjang dan harapan masyarakat sangat mungkin terwujud dengan adanya *empowerment* yang baik dan pembangunan yang berorientasi untuk kesejahteraan warga.

Jika program pemberdayaan masyarakat semacam itu mengalami salah kelola, amat mudah hadir konflik sosial di tengah warga. Sudah banyak contoh yang membuktikan tentang dampak dari salah kelolanya pemerintah yang berujung pada semakin hancurnya kondisi sosial ekonomi masyarakat



setempat. Penyebabnya sebenarnya bukan terletak pada kapasitas pejabat pemerintah serta *stakeholder* terkait dalam mengelola program pembangunan yang ada, melainkan lebih terletak pada orientasi membangun yang belum ditujukan untuk menjadikan masyarakat semakin sejahtera. Dalam hal ini, tidak tercipta komunikasi yang baik antara pemilik modal, masyarakat, pemerintah daerah setempat, serta aparat keamanan yang *notabene* sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Imbas akhirnya, rakyat kecil pula yang menjadi korban.

Seiring berjalannya waktu, dengan adanya berbagai pengalaman yang dialami sendiri langsung, sebagian masyarakat mulai berani menunjukkan pandangan berbeda kepada pemerintah soal pembangunan di daerahnya. Masyarakat tidak menginginkan kegagalan kembali berulang sehingga memengaruhi kesejahteraan mereka nantinya.

Inisiatif warga tersebut sewajarnya terjadi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Di lain pihak, pemerintah adalah pemimpin, dan kita paham bahwa betapa beratnya tanggung jawab seorang pemimpin atas amanah yang diberikan rakyat di pundaknya. Belajar dari kisah Umar bin Khaththab yang selalu mendahului hak masyarakatnya daripada hak diri dan keluarganya. Beliau selalu meninjau rakyat dari rumah ke rumah tanpa diketahui oleh rakyatnya. Selain itu, sosok Umar juga mengajari kita untuk menjadi pemimpin sederhana; sosok pemimpin yang mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahannya dengan berani. Karakter pemimpin seperti inilah yang patut kita jadikan contoh.



Selain karakter yang kuat dan baik dari para pemerintah (pemimpin), dibutuhkan peran serta masyarakat dalam mendukung serta mempercepat upaya pembangunan. Sayangnya, yang terjadi di tengah warga belum ideal. Ketika warga ingin mengembangkan desa wisata, ternyata kondisi sosial dan pendidikan masyarakat setempat belum menunjang upaya pembangunan dari pemerintah. Sebagian besar penduduknya berstatus sebagai pengangguran, masyarakat banyak yang tidak bisa baca dan tulis. Karakter yang terbangun sejak kecil pun banyak yang lebih siap menjadi peminta ketimbang pemberi. Tenaga yang mereka bisa andalkan untuk menunjang kehidupannya baru sebatas fisik (otot), dan bukan akal. Potret semacam ini sudah menjadi gambaran umum di banyak masyarakat desa kita.

Senyampang atas fakta ketidakidealan tersebut, kita semua tidak bisa lari dari kenyataan. Menjadi tanggung jawab bersama kita untuk menyalakan lilin harapan, membantu warga lebih berdaya, tak terkecuali dengan menyebarkan amar makruf dan mencegah kemungkaran dalam pembangunan. Seiring itu, adanya pendampingan dan kontrol sosial dari LSM, aktivis mahasiswa dan pihak-pihak yang peduli, akan menjaga kestabilan kondisi sosial masyarakat yang hendak giat membangun. Adanya peran pemerintah bersama banyak pihak untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan secara tulus dan berkala tidak lain agar terbentuk masyarakat yang memiliki karakter mandiri, berpikir maju, dan memiliki profesionalitas kerja yang andal.

Jadi, inilah ranah aktivisme kita, selaku kaum muda, untuk menjaga bumi pertiwi ini, menjaga asa membangun warga di desa sebagai bagian dari belajar merawat Indonesia.[]





**Berdikari bersama
Sosial Wirausaha**

INDUSTRI DAN PENGUATAN KARAKTER BANGSA

Maman Abdurrahman

PERKEMBANGAN kemajuan negara-negara di dunia dalam berbagai bidang, terlebih di sektor industri telah mendorong sebuah era baru perekonomian dan hubungan antarnegara di dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Inggris kala itu, mendorong sebuah penemuan yang dilakukan oleh Abraham Darby yang untuk kali pertama berhasil menggunakan batu bara untuk melelehkan besi. Juga penemuan mesin uap oleh James Watt yang kemudian mempengaruhi penemuan-penemuan lainnya dan dikenal dengan istilah Revolusi Industri.

Revolusi Industri membawa akibat yang sangat luas dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah timbul dan berkembangnya kapitalisme modern. Kapitalisme adalah susunan ekonomi yang berpusat pada keberuntungan perseorangan dengan mana uang memegang peranan yang sangat penting. Di dalam kapitalisme modern ini, si kapitalis merupakan produsen, pedagang sekaligus distributor. Sebagai produsen, ia membutuhkan bahan mentah untuk kebutuhan industri; sebagai pedagang dan distributor, ia membutuhkan pasar. Untuk menjamin kebutuhan-kebutuhan itu ia mempengaruhi politik di negaranya agar mendapat



“tanah-tanah jajahan” yang dapat digunakan sebagai sumber pengambilan bahan mentah dan pasar barang industri.

Jika disimak lebih jauh, disadari atau tidak, posisi Indonesia dalam era perindustrian dan hubungan antarnegara di dunia (masih) menjadi sumber bahan mentah industri yang murah dan pasar barang industri yang potensial. Dengan kata lain, kita (masih) terjajah dengan kapitalisme modern.

Kapitalisme modern mengajarkan paham liberalisme yang melahirkan semangat individualisme. Dalam kehidupan ekonomi liberalisme merevitalisasi diri menjadi lebih imperalistik dan sejalan dengan gencarnya globalisasi ekonomi.

Bagi Indonesia, liberalisme berikut sistem ekonomi pasar bebasnya yang dibawa serta oleh globalisasi jelas bertentangan dengan karakter bangsa. Dalam liberalisme posisi rakyat direduksi menjadi sekadar *marginal residual*, sementara kepentingan individu diposisikan sebagai *sentral substansial*. Hal ini bertentangan dengan demokrasi Indonesia yang berdasarkan paham kerakyatan yang menempatkan asas bersama dan menjadikan “bhinneka” (pluralistik) akan menjadi “tunggal ika”. Ibarat bilangan pecahan, Pancasila dan UUD 1945 adalah *common denominator* (penyebut) yang akan merangkai pecahan yang ada menjadi sebuah kesatuan. Karenanya rakyatlah yang harusnya ditempatkan sebagai *central substantial* dan individu sebagai *marginal residual*.

Atas dasar karakter bangsa yang dimiliki (yaitu semangat Bhinneka Tunggal Ika) yang disatukan dengan falsafah dasar bangsa Indonesia (yaitu Pancasila) dan terejawantahkan dalam UUD 1945, maka penguatan karakter diri menjadi satu hal yang sangat penting. Bagaimana jati diri sebuah bangsa,



kecintaan yang mendalam terhadap Nusantara Raya mampu melahirkan daya saing bangsa yang mumpuni hingga mampu berdikari, menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan penguatan sektor industri dalam negeri.

Penguatan industri dalam negeri tidak hanya didasari semangat bisnis atau keuntungan pragmatisme, tapi lebih dari itu semangat untuk menjadi bangsa yang maju dan berkarakter, mencapai kesejahteraan bersama atas harkat, derajat, dan martabat sebagai sebuah bangsa. Hal ini pernah dilakukan Jepang melalui Restorasi Meiji hingga menjelma menjadi negara industri terbesar di dunia. Bagaimana dengan Indonesia melalui Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika?

Semoga![]



MEMAJUKAN INDUSTRI STRATEGIS KITA

Dini Khorinnisa

INDUSTRI STRATEGIS di Indonesia nampaknya belum benar-benar memiliki hakikatnya sebagai industri yang dianggap penting di negeri ini. Kita dapat melihat bagaimana industri-industri strategis di bidang dirgantara dan maritim misalnya masih sangat lemah karena faktor teknologi, sumber daya, serta anggaran. Pemerintah masih lebih memilih membuka arus impor sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan industri strategis dibandingkan dengan mengusahakan pembangunan industri strategis dalam negeri.

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengubah paradigma industri strategis. Industri strategis jangan hanya dipandang untuk memperkuat pertahanan nasional. Jika ini yang lakukan maka anggaran yang akan dikeluarkan nantinya hanya akan mengandalkan anggaran Kementerian Pertahanan yang keseluruhannya saja hanya mencapai 3.86% per tahun dari total APBN tahun 2011 atau sebesar Rp 47 Triliun. Padahal, anggaran sebesar ini masih harus dialokasikan ke berbagai pos-pos pengeluaran pertahanan lainnya.

Pemerintah semestinya memiliki pandangan bahwa industri strategis akan bermanfaat tidak hanya untuk pertahan-



an namun juga bagi pengembangan ekonomi dan teknologi nasional. Dalam hal ini, pemerintah harus bisa menguatkan industri strategis nasional dengan misalnya memfokuskan usaha riset di bidang ini kepada lembaga-lembaga riset nasional serta universitas, untuk kemudian pengembangannya diberikan kepada perusahaan. Jika hal ini bisa dilakukan, maka pengembangan industri strategis bisa diambil dari alokasi kementerian lainnya misalnya Kementerian Perindustrian serta Kementerian Riset dan Teknologi.

Dengan strategi seperti ini, kita tidak akan terbawa arus globalisasi yang membuat Indonesia hanya membeli hasil kerja negara lain. Dengan strategi ini pula kita telah berhasil mengintegrasikan perusahaan dan lembaga riset serta universitas untuk dapat berintegrasi dalam pengembangan industri strategis. Belum lagi manfaat lainnya semisal penyerapan tenaga kerja dalam negeri untuk merealisasikan apa yang telah dihasilkan oleh lembaga riset serta universitas. Dengan demikian, sudah saatnya kita mengubah paradigma manfaat dari industri nasional, yakni yang tidak hanya untuk pertahanan nasional tapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi rakyat pada umumnya sebagaimana sektor-sektor industri lainnya.

Strategi seperti ini tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Semuanya ini harus diawali oleh kemauan politik pemerintah untuk bertekad secara sungguh-sungguh mengembangkan industri strategis nasional. Pemerintah harus optimis bahwa memang Indonesia memiliki sumber daya alam dan manusia yang mumpuni untuk dikelola dengan baik.



Tidak ada yang menyangkal kekayaan sumber alam Indonesia dan begitu pun dengan sumber daya manusia. Pada dasarnya kita berkemampuan sama dengan negara-negara maju lain. Hanya saja, kita masih belum mendapati pemerataan kualitas pembangunan manusia Indonesia. Tengoklah para tunas muda bangsa yang berhasil menjuarai berbagai lomba atau olimpiade di bidang sains dan teknologi tingkat dunia, mengalahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang. Potensi dan sumber daya para pemuda tersebut telah berhasil dikelola dan dibimbing menuju sebuah hasil yang membanggakan.

Raihan tersebut semakin menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki harapan cerah untuk bisa maju dan mandiri. Termasuk dalam mengembangkan industri strategis. Ya, asalkan pengambil kebijakan memiliki strategi yang tepat untuk mencapai tujuannya.[]



BUDAYA CINTA PRODUK DALAM NEGERI

Yogi Achmad Fajar

MEMBANGUN perekonomian sebuah bangsa, idealnya tidak hanya dengan *economic grand policy* yang berorientasi pada ekspor semata, tetapi juga pada pasar domestik. Meningkatkan dan memperkuat pasar domestik adalah sebuah pilihan tepat di tengah kondisi perekonomian negeri saat ini. Pasalnya, bila orientasi perekonomian hanya mengacu kepada ekspor semata imbas akan didapat saat krisis ekonomi global terjadi. Konsekuensinya jelas, permintaan dari negara-negara tujuan ekspor akan merosot tajam. Dalam situasi seperti inilah pasar domestik mengambil peran sebagai penyelamat perekonomian dalam negeri.

Namun, saat yang sama, kini kita dihadapkan dengan tantangan dalam menggeliatkan pasar domestik. Tidak lain adalah adanya kerja sama perjanjian perdagangan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Sayangnya, implementasi ACFTA ternyata membuat produk asal China membanjiri pasar domestik. Kondisi ini tentu saja membuat pelaku usaha dalam negeri harus bekerja keras. Di tengah menjangar pasar domestik mereka memiliki pesaing. Ironisnya, pesaing berasal dari negara berkekuatan ekonomi besar dunia.

Adanya ACFTA Sejatinya semakin memotivasi pelaku usaha lokal untuk fokus mengembangkan ekonomi pasar



domestik. Caranya adalah dengan meningkatkan kualitas produk dan daya saing untuk melayani kebutuhan masyarakat Indonesia yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa.

Di lain pihak, upaya lain yang bisa dilakukan dari pihak konsumen untuk menggeliatkan pasar domestik adalah dengan mencintai produk buatan dan/atau asal negeri sendiri. Berawal dengan membudayakan menggunakan produk dalam negeri berarti kita menaruh kepercayaan terhadap kualitas buatan sendiri.

Tentu upaya ini tidak akan maksimal tanpa ada dukungan dari pemerintah sendiri. Pemerintahlah yang justru harus menjadi garda terdepan dan memberikan contoh bagi warganya. Langkah paling nyata di antaranya mencanangkan kebijakan penggunaan produk buatan Indonesia. Seperti yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mencanangkan Penggunaan Sepatu Buatan Indonesia di daerah tersebut. Melalui kebijakan yang dikeluarkan Gubernur, pegawai negeri sipil (PNS) di Jawa Barat diwajibkan memakai sepatu buatan dalam negeri setiap hari.

Menggeliatkan pasar domestik harus disadari tidak bisa berjalan dengan satu pihak. Diperlukan upaya-upaya riil dan sejalan dari pelaku usaha selaku produsen, masyarakat Indonesia selaku konsumen, dan tentu saja pemerintah selaku pemangku kebijakan. Dengan demikian, produk dalam negeri menjadi primadona di negeri sendiri bisa terwujud.[]



KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA, DAN DAYA SAING BANGSA

Nur Saudah Al Arifa D.

SUNGGUH menarik ketika kita membahas tentang peran pemuda, khususnya peran mahasiswa dalam rangka mengatasi krisis multidimensi bangsa. Pemuda memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan suatu bangsa. Kebangkitan suatu peradaban manusia di mana pun tempatnya dan kapan pun waktunya tidak dapat terlepas dari peran pemuda di dalamnya.

Peran yang Terabaikan

Secara garis besar, mahasiswa sebagai bagian dari pemuda memiliki tiga peran utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiga peran tersebut antara lain mahasiswa bertindak sebagai intelektual akademisi, calon pemimpin masa depan, dan agen perubahan. Sebagai mahasiswa, kita telah diberikan tiga mandat penting dalam membangun bangsa ini, tetapi sayangnya mandat tersebut jarang sekali terimplemen-tasikan dalam kehidupan nyata. Dan ironisnya, masih banyak mahasiswa yang melupakan peran moral tersebut. Atau yang umum adalah banyak di antara mahasiswa hanya condong pada salah satu peran saja. Sebagai contoh, hanya memikirkan intelektual akademis namun apatis terhadap kondisi



sekitar, atau sebaliknya mahasiswa terlalu bersemangat menjadi aktivis dan agen perubahan namun mengesampingkan peran utamanya sebagai kaum intelektual akademis.

Bukanlah suatu kebetulan jika Presiden Amerika Serikat sekarang, Barrack Obama, dalam pidatonya saat berkampanye menyerukan: “Change, we can believe in.” Jika negara sebesar Amerika Serikat saja percaya bahwa kondisi yang sekarang masih belum baik dan perubahan adalah satu-satunya cara untuk mencapai kondisi yang lebih baik, maka bukankah bangsa Indonesia juga seharusnya menyerukan hal yang sama?

Salah satu hal yang dapat kita pelajari dari proses pemilihan presiden Amerika Serikat ialah harapan akan terjadinya perubahan. Harapan itu diletakkan pada calon pemimpin dari kalangan muda, dengan mahasiswa termasuk di dalamnya.

Memang tidak bisa dimungkiri bahwa salah satu pola pikir yang selama ini tertanam kuat dalam kehidupan mahasiswa pada umumnya ialah setelah lulus kuliah mempunyai pekerjaan yang memberikan gaji yang tinggi sehingga bisa hidup dengan layak. Pola pikir semacam ini bukan berarti seratus persen salah, tetapi pola pikir yang sempit ini menyebabkan mahasiswa-mahasiswa sekarang ini kurang memiliki pengaruh yang signifikan dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mengapa? Karena pola pikir ini telah membawa kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, dan lebih parahnya, pola pikir ini telah mematikan banyak potensi positif dalam diri kita sebagai mahasiswa. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan mahasiswa



sebagai agen perubahan untuk meningkatkan daya saing bangsa adalah pengembangan wirausaha mahasiswa.

Wirausaha Mahasiswa

Dalam *Retire Young Retire Rich*, Robert T. Kiyosaki menyatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan orang kaya bukan terletak pada banyaknya modal awal yang ia miliki, tetapi dari realitasnya (cara berpikirnya) yang berbeda dengan orang miskin.

Untuk membuka mata hati kita sebagai mahasiswa berikut ini saya kutipkan tuliskan kutipan sebagian data menarik dari buku *Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian* karya Valentino Dinsi, yang patut kita perhatikan dan renungkan:

- ♦ “Saat ini jumlah penganggur sudah mencapai 45,2 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.650.000 orang penganggur terdidik lulusan perguruan tinggi.”
- ♦ “Dari jumlah penganggur terbuka, 65,71% boleh dikatakan penganggur terdidik yang berpendidikan.”

Dari data di atas kita dapat melihat bahwa selaku kaum terpelajar mahasiswa seharusnya terpanggil untuk mengatasi masalah pengangguran. Bukan justru malah menambah angka pengangguran. Oleh karena itu, kita harus mengubah pola pikir kita yang lama menjadi pola pikir baru yang berfokus pada kemandirian bangsa, yaitu pola pikir tentang prinsip kewirausahaan, karena wirausaha merupakan cara terbaik untuk memperbaiki dan memecahkan permasalahan-permasalahan di sektor ekonomi.



Wirausaha bisa menjadi sektor utama perubahan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Institusi pendidikan yang dalam perannya membentuk mahasiswa yang pintar secara kognitif, juga dituntut untuk bisa mengarahkan mahasiswa menjadi seorang *entrepreneur*. Sentuhan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa akan membuat industri kreatif menjadi lebih menarik.

Mahasiswa yang kreatif adalah mahasiswa yang senantiasa memiliki daya cipta terhadap sesuatu. Ia selalu memiliki gagasan atau ide-ide baru yang menarik. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjadi mahasiswa yang kreatif. Salah satunya adalah selalu memiliki gagasan atau ide-ide baru setiap hari. Seorang mahasiswa harus selalu berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang baru (inovatif), apa pun itu sepanjang kreativitasnya berada dalam ranah etis normatif. Selain itu, mahasiswa juga harus jeli menangkap peluang yang ada di sekitarnya agar dapat mengembangkan keterampilan (*soft skill*) yang dimilikinya. Mahasiswa yang kreatif merupakan aset yang sangat penting bagi institusi terkait dengan terbukanya peluang untuk berpartisipasi dalam program mahasiswa wirausaha. Namun, itu saja belum cukup jika institusi tidak mampu menampung kreativitas tersebut melalui sebuah sistem yang terintegrasi dengan proses pembelajaran dan *stakeholder*.

Tumbuhnya kewirausahaan di masyarakat akan mendorong kemajuan bangsa karena salah satu ciri negara maju dan mandiri adalah tumbuh dan berkembangnya kreativitas masyarakat di berbagai bidang usaha. Kebutuhan akan jiwa *entrepreneur* saat ini sangatlah dibutuhkan seiring dengan dinamika zaman.



Afzalurrahman (2000) dalam *Muhammad as a Trader* memberikan ilustrasi bahwa Nabi Muhammad mulai belajar *entrepreneur* saat usia 7 tahun. Pada usia 17 tahun beliau mandiri dan pada saat berusia 25 tahun menjadi orang sukses. Kesuksesan beliau ini ditandai dengan saat beliau menikah mahar yang diberikan kepada Khadijah adalah 40 ekor unta yang warnanya kemerah-merahan—kendaraan orang Arab yang sangat prestise pada masa itu. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad juga memberikan dorongan kepada umatnya, termasuk kita, agar mau menjadi *entrepreneur* melalui sabdanya, “Berwirausahalah kalian semua karena Allah membuka sepuluh pintu rezeki, sembilan di antaranya datang dari berwirausaha.”

Dalam perspektif yang lebih luas, kewirausahaan merupakan salah satu komponen penting dalam membawa bangsa kita keluar dari krisis keuangan seperti sekarang ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu membangun industri kreatif dalam negeri sebagai salah satu alternatif dalam menciptakan lapangan kerja. Semakin banyak industri kreatif yang berkembang artinya semakin banyak pula Produk Domestik Bruto yang akan dihasilkan. Dengan demikian, maka devisa negara kita bertambah dan ketergantungan kita akan luar negeri juga akan berkurang dan daya saing bangsa pun akan terangkat.

Mengubah Orientasi

Lalu bagaimana cara mengembangkan jiwa kewirausahaan di Indonesia? Sebagai salah satu negara maju, masyarakat Jepang memiliki suatu budaya khas untuk mengembangkan



jiwa kewirausahaan bagi generasi mudanya. Sejak usia dini, anak-anak kecil telah didik untuk mandiri. Setelah lulus dari SMA dan masuk bangku kuliah, hampir sebagian besar para mahasiswa tersebut tidak meminta biaya kepada orangtua mereka. Mereka mengandalkan kerja paruh waktu untuk membiayai uang kuliah dan kehidupan mereka sehari-hari. Tidak mengherankan jika saat mereka telah dewasa, mereka telah menjadi pribadi yang mandiri dan cerdas. Dengan kemandirian yang telah mereka latih dari kecil, mereka mampu menciptakan inovasi-inovasi sehingga industri Jepang berkembang pesat, sekalipun negara itu memiliki banyak sekali keterbatasan dalam sumber daya alam.

Mungkinkah cara tersebut bisa diberlakukan di Indonesia yang *notabene* kaya sumber daya alam? Mungkin hal tersebut masih terdengar berlebihan bagi masyarakat Indonesia jika dilakukan sekarang ini. Tetapi bukan berarti kita sebagai mahasiswa hanya bisa berpangku tangan melihat negara lain terus maju sementara negara kita justru tambah terpuruk. Masih ada banyak cara untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan, sama seperti masyarakat Jepang yang melakukannya dengan cara yang khas.

Secara garis besar, program tersebut dapat kita diistilahkan dengan pengembangan budaya kewirausahaan di lingkungan sekitar kampus. Namun, dalam lingkup yang lebih luas lagi, program wirausaha mahasiswa sebaiknya tidak hanya terkotak-kotak di dalam universitas masing-masing, tetapi dapat diperluas dengan membentuk sebuah Himpunan Mahasiswa Peduli Kewirausahaan di beberapa universitas. Dengan dibentuknya himpunan mahasiswa, maka gerakan



kewirausahaan di berbagai daerah dapat berjalan bersamaan dan massal sehingga akan tumbuh banyak pengusaha-pengusaha muda di berbagai daerah.

Pengusaha nasional dan pendiri Universitas Sahid (Usahid), Prof Sukamdani Sahid Gitosardjono dalam sebuah kuliah umum pernah menyatakan bahwa salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing adalah dengan meningkatkan kewirausahaan, baik sisi kualitas maupun kuantitasnya. Berdasarkan hasil penelitian seorang ilmuwan Amerika Serikat, David McClelland, suatu negara dapat dikatakan makmur minimal harus memiliki jumlah *entrepreneur* atau wirausahawan sebanyak dua persen dari jumlah populasi penduduknya. Hasil penelitian menunjukkan, AS pada tahun 2007 memiliki 11,5 persen wirausahawan, kemudian Singapura 7,2 persen. Sementara Indonesia pada 2007 diperkirakan hanya mencapai 400.000 orang atau hanya 0,18 persen dari yang seharusnya 4,4 juta wirausahawan. Kenyataan ini tentunya menjadi PR kita bersama karena bekerja dan berusaha, termasuk berwirausaha, boleh dikatakan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia sebagai *khalifah fil-ardh*, pemakmur Bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik.

Berdasar kondisi tersebut, sebagai mahasiswa, kita terdapat untuk menjadi berkah bagi bangsa ini. Kehadiran kita seharusnya menjadi solusi atas permasalahan yang ada, bukan justru apatis bahkan menjadi beban bagi bangsa ini. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban para mahasiswa di seluruh daerah untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memaksimalkan berbagai sumber daya lokal yang ada di sekitar kita untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa



yang maju, makmur dan bisa menjadi berkat bagi bangsa lainnya.

Mahasiswa saat ini harus mampu mengubah mindset hidupnya yang umumnya berorientasi menjadi job seeker menjadi job creator. Mahasiswa harus sadar kalau pengusaha adalah yang akan mengendalikan arah bangsa di masa yang akan datang untuk membangun daya saing bangsa Indonesia.[]



MENGGAGAS ASOSIASI PENGUSAHA MUDA

Purnawati Hustina Rachman

JIKA Anda menemukan diri tengah berdiri saat jam sibuk di Kota Bogor, Anda akan tercengang dengan selimut hijau bergerak berwarna hijau dan biru. Angkot adalah sebutannya, transportasi umum yang paling mudah ditemukan di Bogor. Kemacetan karena kendaraan ini sudah tidak asing lagi. Jika beruntung, Anda akan dikunjungi oleh sekelompok anak kecil yang bernyanyi dan mengulurkan tangannya saat lagu selesai, berharap untuk sekadar uang receh. Mungkin pula Anda akan cukup beruntung untuk berpapasan dengan seseorang yang mengalami kegilaan psikologis, berkeliaran di sekitar kota tanpa harapan hidup.

Dinamika Demografi

Jumlah angkot yang dilaporkan oleh Kantor Sistem Administrasi Satu Atap Kota Bogor mencapai 5383 unit (data pada 2009). Jika ditambahkan dengan angkot yang berasal dari provinsi, angka ini mencapai kurang lebih 9000 unit. Ini belum keberadaan kendaraan pribadi. Dengan kepadatan penduduk 38.661/km², Bogor, yang dikenal sebagai Kota Hujan, mengalami banjir kendaraan yang memberi kontribusi terhadap polusi udara dan menyebabkan naiknya temperatur kota.



Pemerintah daerah setempat memang sudah berupaya untuk mengatasi masalah kepadatan ini dengan patroli jalan-an dan menggunakan pembagian jam kerja trayek angkot. Sayangnya, kebijakan semacam itu kurang tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Urbanisasi dan pengangguran merupakan masalah umum perkotaan. Sebagaimana populasi meningkat, perpindahan dari daerah pedesaan dan kompetisi lapangan kerja juga terus meningkat. Ini menyisakan angka pengangguran. Dampak permasalahan penduduk yang dihadapi Kota Bogor membuat generasi muda terimbas. Pengaruh orangtua dan lingkungan yang negatif mendorong mereka untuk mencari keuntungan sendiri melalui berbagai cara, baik sebagai pengemis, pengamen, ataupun supir angkot (kebanyakan dari para pengemudi angkot ini adalah pemuda berumur 18-30 tahun). Risiko menjalani aktivitas ini tidak mereka hiraukan lantaran mereka menikmatinya sebagai pekerjaan rutin dan tidak ada lagi pilihan.

Sikap menganggap remeh persoalan kependudukan mengakibatkan pengambilan kebijakan satu arah dan menghilangkan pandangan holistik saat menghadapi permasalahan ini. Di sisi lain, masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah lokal, masyarakat, dan pemuda terdidik merupakan penghalang bagi mereka yang berkeinginan untuk membenahi sistem yang buruk.

Asosiasi Pengusaha Muda

Sebagai saksi dari kehidupan kota di Bogor, juga sebagai korban krisis spasial dan mahasiswa yang masih memiliki



idealisme yang tinggi untuk hidup damai, saya saat ini sedang membutuhkan perencanaan masyarakat yang komprehensif. Perencanaan dengan penduduk kotanya dapat membayangkan masa depan dan harapan yang mampu direalisasikan. Sebagai bagian dari kaum muda dengan tenaga terbatas, yang bisa menjadi solusi adalah dengan bekerja berdampingan dengan pemerintah lokal. Mengajak mereka untuk mengurangi pengangguran, salah satu dari akar permasalahan ini, juga dengan mendirikan Asosiasi Pengusaha Muda.

Asosiasi ini dijalankan oleh pemuda dan merupakan rencana ideal untuk memutar pola pikir pemuda dalam menghadapi pengangguran dari pengemis menjadi pengusaha muda. Latar belakang dari program ini adalah menanamkan teori yang menguntungkan keberadaan orang-orang, sekaligus sebagai langkah efektif dibandingkan dengan mengembangkan pola pikir “diberi tahu” terhadap subjek. Program ini akan menjadi rumah bagi anak jalanan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan baru melalui rangsangan dari pemuda terdidik yang dapat menciptakan rantai dari sistem yang memotivasi.

Dalam program ini para pemuda pengangguran akan dilatih oleh orang-orang yang terdidik dan dilengkapi dengan segala kebutuhan untuk meningkatkan kreativitas mereka. Hasil kreativitas itu ditargetkan menjadi produk yang berwujud ataupun tidak berwujud yang mampu dijual dan meningkatkan pemasukan ekonomi bagi mereka. Hasil dari program ini adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dijalankan oleh pemuda, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kota Bogor dan mengukir semangat wirausaha pada setiap jiwa pemuda.



Bersamaan dengan bantuan dari pemerintah lokal yang membantu melalui pemenuhan kebutuhan dana dan mengumpulkan para pengangguran dan anak jalanan, diharapkan melalui payung Asosiasi Pengusaha Muda, forum komunikasi kondusif dapat dibentuk di antara penduduk, pemerintah lokal dan pemuda. Sehingga, tercipta solusi konkret untuk mengatasi masalah kependudukan di masa datang yang akan dihadapi Bogor. Asosiasi ini akan mampu untuk memperluas jendela kesatuan dari berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, dan partisipasi pemuda terhadap lingkungan.

Dengan demikian, lima tahun dari sekarang, ketika Anda menemukan diri di dalam jam padat di Kota Bogor, warna hijau yang akan tampak adalah warna hijau rumput dan pepohonan yang dulu ditempati oleh ratusan angkot. Perumahan yang lebih lengang tanpa keberadaan pengemis dan anak jalanan yang menyanyikan lagu mereka. Dan jika Anda beruntung, Anda mungkin akan berpapasan dengan saya bersama-sama banyak pemuda lainnya di depan bangunan dengan tulisan “Asosiasi Pengusaha Muda”. Insya Allah.[]



MENJADI PEMAIN UTAMA EKONOMI

Akifan Hanggraito

KONON alasan bangsa penjajah datang ke negeri kita ini ratusan tahun silam adalah karena kekayaan alam yang melimpah dari tanah nusantara: lahan berhambur humus di setiap jengkalnya, laut yang tenang dengan segala biota alamnya, hutan eksotis tempat tinggal fauna dan flora langka, serta minyak yang bahkan dapat ditemukan saat orang sedang menggali sumur. Indonesia telah telanjur tenar dengan segala kekayaan alamnya yang digembar-gemborkan dalam banyak literatur sejarah.

Pertanyaannya, apakah semua kekayaan yang merebut hati orang-orang dunia seberang itu dinikmati atau—setidaknya—sempat dinikmati secara menyeluruh oleh rakyat di negeri ini? Apakah kekayaan itu pernah dirasakan oleh rakyat kecil, yang miskin dan telantar namun pemilik sah negeri ini?

Pemerintah terus mengklaim bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Pemerintah juga kerap menyatakan telah berhasil mengurangi kemiskinan menjadi 31,02 juta jiwa sampai akhir 2010. Dunia bahkan memberi pengakuan dengan memasukkan Indonesia ke dalam G-20 (kelompok 20 pemeran ekonomi utama dunia), walaupun



GDP (Gross Domestic Products) Indonesia belum sampai masuk pada 20 besar dunia.

Tak pelak, banyak tokoh yang mengkritik data yang keluar di masyarakat ini. Salah satu yang masih hangat di benak kita adalah pengungkapan 18 kebohongan pemerintah oleh para tokoh agama. Beberapa fakta yang disorot tentang belum baiknya kesejahteraan (yang ditunjukkan dari parameter ekonomi) di negeri ini antara lain penduduk yang layak menerima beras untuk rakyat miskin (Raskin), yang pada 2010 saja mencapai 70 juta orang. Selain itu, penduduk yang berhak menerima layanan kesehatan bagi orang miskin (Jamkesmas), mencapai 76,4 juta jiwa. Secuil fakta ini memberikan gambaran besar tentang bagaimana tergerusnya kegambang-an realita yang ada di masyarakat, digantikan dengan data-data semu yang nir-representatif.

Solusi Ideal

Di tengah segala cengkeraman dan himpitan masalah yang melanda bangsa ini, perlu ada suatu penyegaran dari segala aspek, bagi dari segi kualitas hidup masyarakat (SDM) juga dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan pemberdayaan ekonomi. Banyak pemecahan dan manuver-manuver yang dilakukan oleh pemerintah, dari segi mendorong terjadinya perdagangan bebas (AFTA, ACFTA) sampai strategi perekonomian berbasis wilayah. Tapi, manakah sebenarnya yang bisa mengakomodasi kepentingan banyak pihak sambil di lain sisi turut membangun dan membantu rakyat di negeri ini?



Muncul kemudian suatu gagasan yang memadukan antara *Voluntary Sector* yang bersifat suka rela, *Public Sector* yang menyangkut kepentingan publik bersama, dan *Private Sector* yang merupakan unsur pribadi atau individual yang bersangkutan dengan unsur kepentingan profit. Mengapa tiga unsur ini dilirik? Jawabannya sangat logis, di tengah begitu banyaknya kesenjangan yang terjadi, perlu diusulkan suatu sarana yang bisa mencapai tujuan bersama, dengan pengorbanan bersama, tapi tetap memiliki nilai profit atau keuntungan, sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi semua. Pihak yang terkait akan merasakan keuntungan ganda, selain karena profit dapat dihasilkan, Sumber Daya Manusia juga dapat dikembangkan dan dapat menjadi suatu entitas ekonomi mandiri yang sanggup melawan derasnya himpitan masalah di sekitar. Para ahli menyebut sistem ini dengan *social entrepreneurship*.

Cara seperti ini bukan cara lama, Dr. Muhammad Yunus peraih nobel perdamaian 2006 telah mempraktikkannya. Dr. Muhammad Yunus mendirikan Grameen Bank pada tahun 1976 yang memberi pinjaman pada kaum miskin di Bangladesh. Untuk menjamin pembayaran utang, Grameen Bank menggunakan sistem “kelompok solidaritas”. Kelompok-kelompok ini mengajukan permohonan pinjaman bersama-sama, dan setiap anggotanya berfungsi sebagai penjamin anggota lainnya, sehingga mereka dapat berkembang bersama-sama. Apa yang dikembangkan oleh Yunus, dengan pemberdayaan masyarakat di segmen kurang mampu secara finansial, tidak hanya menghasilkan kesejahteraan sosial masyarakat tetapi ternyata juga mendatangkan sebuah keuntungan secara finansial.



Sistem yang diterapkan Muhammad Yunus memiliki satu kata kunci keunggulan dalam pembangunan ekonomi mikro, yaitu 'bangkit bersama-sama'. Dengan adanya kesadaran berama akan perbaikan taraf hidup, yang dibarengi dengan dukungan dari pemerintah dan antusiasme masyarakat sekitar, kebangkitan ekonomi akan terjadi.

Tidak mudah memang untuk mewujudkan hal semacam itu. Sebelum berbicara social entrepreneur, mari lihat fakta tentang entrepreneur yang lebih umum dahulu. Entrepreneur yang ada di Indonesia (yang diharapkan pemerintah bisa membuat sebanyak mungkin lapangan pekerjaan) hanya berjumlah 0,18 % dari total penduduk. Demikian data dari Ir. Ciputra, salah satu wirausahawan sukses di Indonesia. Padahal, seperti dikatakan oleh sosiolog David McClelland, suatu negara akan maju apabila setidaknya 2 % dari total penduduk negara tersebut adalah wirausahawan. Hal ini menjadi tugas dan tantangan bagi pemerintah dan segenap lapisan masyarakat yang ingin membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik.

Poin Kebangkitan

Bicara kekuatan *social entrepreneur* dan *social entrepreneurship*, Indonesia memang masih jauh tertinggal. Negara yang tergolong maju adalah Inggris. British Council menaksir sedikitnya ada 62.000 *social Enterprises* yang menyumbang £24 miliar bagi perekonomian Inggris. Di negeri itu, bahkan ada *Social Enterprise Day* yang dirayakan setiap 19 November.

Poin kebangkitan yang bisa digarap dari potensi yang ada di tanah air adalah dengan memanfaatkan kalangan ko-



rporasi, terutama Kapital (finansial, intelektual) yang diarahkan untuk mencetak wirausaha. BUMN, misalnya, punya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang bila dilakukan serius akan dapat menciptakan *social enterprise*, juga *long tail of entrepreneur*. Serius di sini berarti melakukan pendampingan, juga investasi waktu dan keahlian, bukan sekadar menyumbang uang asal terpenuhi kewajiban. Di samping itu, perlu sebuah langkah proaktif dalam melihat problematika sosial yang terjadi. Kegiatan-kegiatan mencetak wirausahaan muda baik lewat kompetisi maupun CSR-CSR perusahaan juga harus lebih digemborkan lagi, agar banyak yang semakin tertarik dan banyak pula yang semakin mendalami dunia *enterprise* dan *social enterprise* ini.

Pemerintah dalam hal ini bisa bermain di koridor hukum. Pemerintah bisa memfasilitasi lewat kebijakan pajak dan akses informasi serta bantuan langsung bagi pelaku wirausaha. Pemerintah juga bisa menitikberatkan setiap tujuan wirausaha yang dibantunya ke arah pemberdayaan masyarakat sekitar. Sehingga, siapa pun yang maju, harus membawa kemajuan pula bagi sekelilingnya.

Akhirnya, dengan dukungan dari segala pihak, ketergantungan positif terhadap bakal pertumbuhan ekonomi lewat *social entrepreneurship* bisa menjadi solusi yang tepat bagi sejumlah permasalahan yang kini banyak menerpa bangsa ini. 'Bangkit Bersama', bukan hanya menjadi slogan semata, dibarengi dengan semangat pemberdayaan dan motivasi yang tajam dalam meraup keuntungan, kebangkitan bersama bisa menjadi pemain penting dalam gejolak perekonomian di Indonesia.[]



MENJADI WIRUSAHAWAN SOSIAL

Dini Khoirinnisa Arifin

DISKUSI-DISKUSI mengenai *social entrepreneur* atau wirausaha sosial memang sedang sangat marak akhir-akhir ini. Sebagai wacana yang relatif baru berkembang, akan terdapat sejumlah pendapat yang tidak seragam tentang apa itu kewirausahaan sosial dan siapa yang disebut sebagai wirausahawan sosial.

Pendapat atau rumusan yang ada cenderung menggambarkan suatu jenis wirausaha sosial yang unggul beserta karakteristik peran dan kegiatannya. *Ashoka Fellows*, yang didirikan oleh Bill Drayton tahun 1980, menyebutkan salah satu karakteristik wirausaha sosial sebagai orang yang tidak puas hanya memberi “ikan” atau mengajarkan cara “memancing ikan”. Ia tidak akan diam hingga “industri perikanan” pun berubah.

Wirausaha sosial sering kali pula dikaitkan dengan tema-tema seperti *community development* atau pemberdayaan masyarakat karena memang prinsip dari kewirausahaan sosial itu menurut saya yang terpenting adalah mengubah kondisi masyarakat yang memiliki suatu masalah dengan cara-cara yang inovatif. Dalam mewujudkan prinsip ini, seorang wirausaha sosial sehebat apa pun dia tidak akan bisa melaku-



kannya sendiri. Ia harus membuat masyarakat tersebut terlibat aktif dalam usaha menuju *equilibrium* baru.

Selain bertujuan mengubah *equilibrium* dengan menggunakan cara-cara yang inovatif, seorang *social entrepreneur* juga penting untuk mau menjadi seorang yang transdisiplin bukan hanya multidisiplin. Hal ini dikarenakan seorang *social entrepreneur* harus dapat mengubah masyarakat yang memiliki masalah bermacam-macam dan berbeda di setiap wilayah dan waktunya. Hal tersebut tentu membutuhkan pengetahuan luas yang harus dimiliki oleh wirausahawan sosial atau dengan kata lain multidisiplin. Namun ternyata, bukan hanya harus menguasai beberapa disiplin ilmu, namun juga transdisiplin yaitu memiliki keinginan dan mampu untuk belajar disiplin ilmu lain yang mungkin bisa jadi berseberangan atau sedikit sekali korelasinya dengan kompetensi inti yang dimiliki oleh seorang wirausahawan sosial.

Social entrepreneur ternyata berbeda dengan *social activist* atau *social service provider*. *Social activist* adalah orang yang bergerak untuk melakukan advokasi-advokasi yang dibutuhkan masyarakat karena adanya masyarakat lemah yang membutuhkan bantuan atau pembelaan di bidang tertentu. Contoh di Indonesia adalah kelompok pembela almarhum Munir.

Sementara itu, *social service provider* adalah seorang yang mengurus dan bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk dapat membantu dan memberikan apa yang masyarakat butuhkan. Masyarakat yang disasar biasanya kelas menengah ke bawah, seperti anak-anak yang hidup di jalanan, pengemis, dan gelandangan.



Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah cukup banyak lembaga-lembaga sejenis *social service provider*, baik yang sifatnya swadaya dari masyarakat maupun dari pemerintah sebagai usaha untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial ini. Pada dasarnya, baik *social entrepreneur*, *social activist*, maupun *social service provider* sama-sama dibutuhkan oleh masyarakat. Ketiganya mempunyai signifikansi tersendiri, namun *social entrepreneur* dibutuhkan untuk dapat mengubah kondisi masyarakat agar dapat menjadi lebih berdaya dan sejahtera di kemudian hari.

Pelaku Sukses

Sudah banyak sekali orang di Indonesia yang sudah dapat kita sebut sebagai seorang *social entrepreneur*. Misalnya, ada Kiswanti yang bukan seorang berpendidikan tinggi namun bisa mencerdaskan masyarakat di sekitarnya dengan perpustakaan kelilingnya. Ada pula seorang cerdas di bidang IT bernama Onno W. Purbo yang berhasil membuat berbagai inovasi di bidang teknologi untuk kemudian berkontribusi bagi pengembangan dan kemajuan masyarakat.

Banyak dari seorang *social entrepreneur* yang pada awalnya bukanlah siapa-siapa. Bukan pejabat atau orang yang sebelumnya sudah dikenal oleh masyarakat. Namun kemudian mereka muncul menjadi penolong penting bagi masyarakat di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan kita?

Saya sebagai individu yang mewakili peran mahasiswa tentu sangatlah ingin berkontribusi bagi masyarakat, salah satunya dengan menjadi *social entrepreneur*. Bahkan, sebenarnya dengan status sebagai mahasiswa memudahkan seseorang



untuk dapat masuk ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, mahasiswa dengan idealismenya juga dianggap mampu dan dapat bekerja keras untuk mencapai tujuannya.

Namun terkadang, mahasiswa yang *notabene* masih berada dalam usia muda sering kali memiliki bentrokan keinginan antara ingin memberdayakan masyarakat atau ingin fokus merintis kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan material. Namun, hati nurani akan membawa mahasiswa untuk mengabdikan pada masyarakat karena menurut saya itulah makna pendidikan yang selama ini dikejar.

Pendidikan yang kita peroleh jangan sampai hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, namun semaksimal mungkin harus bisa bermanfaat bagi orang lain terutama masyarakat di sekitarnya. Kalimat bijak menyebutkan, "Apa yang ditanam itu pula yang dituai." Ketika seorang wirausaha sosial mampu membuat masyarakat menjadi berdaya dan lebih sejahtera maka begitu pun dengan seorang *social entrepreneur*, selalu akan ada jalan saat kebutuhan materinya dapat terpenuhi.

Masih amat banyak masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai permasalahan pelik dan kebutuhan-kebutuhan untuk dapat lebih hidup sejahtera sehingga lahan bagi seorang *social entrepreneur* masih sangatlah luas. Tunggu apalagi, mari menjadi *social entrepreneur*![]



WIRAUSAHA SEBAGAI EKSPRESI NASIONALISME

Monica Utari

MENJADI seorang pengusaha atau *entrepreneur* bagi sebagian orang mungkin terdengar sedikit aneh dan terlalu berisiko. Mereka berpikir bahwa pengusaha adalah pekerjaan yang tidak tahu kapan untung dan ruginya dan hanya orang-orang yang memiliki modal yang besar saja yang bisa menjadi pengusaha sukses.

Apakah itu terbukti? Tentu tidak. Banyak sekali contoh yang dapat kita temui di Indonesia, seorang pengusaha sukses yang lahir bukan karena modal besar atau pun hanya melanjutkan usaha yang diwariskan turun-temurun dari orangtua mereka. Sebut saja Hendy Setiono, mungkin nama tersebut sedikit kurang akrab di telinga kita. Namun, pernahkah Anda mendengar nama Baba Rafi? Pikiran kita pun akan segera terasosiasikan dengan sebuah gerai kebab yang jumlahnya sudah lebih dari 750 yang tersebar di penjuru Indonesia bahkan sudah merambah ke Malaysia dan Thailand.

Hendy memulai usahanya saat ia masih berkuliah di ITS Surabaya. Saat itu ia adalah mahasiswa biasa yang tidak memiliki modal besar untuk membuka usaha. Bermodalkan jaringan dan ide kreatif ia mulai merintis usaha kebab tersebut. Tantangan yang datang pun silih berganti. Ia pernah ma-



kan dengan hasil profitnya hari itu yang ternyata jumlahnya kurang untuk membayar makanan di warung *seafood*. Lantas apakah ia putus asa? Tidak. Itulah semangat seorang pengusaha muda yang sekarang kita kenal usahanya dengan Gerai Kebab Baba Rafi.

Berbicara tentang ide kreatif dan inovatif dari salah satu sosok *entrepreneur* muda Indonesia, Baba Rafi, maka pastinya kita akan kagum dan berharap bisa sesukses Hendy. Ada petikan menarik dari Hendy soal kiprah bisnisnya: “Janganlah kalian melihat keadaan saya sekarang tapi lihatlah saya 8 tahun yang lalu, saya sama seperti kalian. Mahasiswa biasa yang karena keadaan ekonomi yang menghimpit, saya dituntut menjadi pribadi kreatif. Kreatif, Inovatif dan berani mengambil risiko. Maka Anda pun bisa seperti saya.”

Sekarang mari kita tambahkan kata *social* sebelum kata *entrepreneur* sehingga akan menjadi *social entrepreneur*. Dua buah kata yang lebih mengagumkan lagi karena seorang *social entrepreneur* bukan hanya orang yang kreatif dan inovatif tetapi juga orang dengan sensitivitas sosial yang tinggi. Sebagai contoh adalah pengusaha muda Goris Mustaqqim yang mengembangkan kota Garut hingga perekonomiannya meningkat.

Goris Mustaqqim adalah lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Ia memilih mengembangkan kota kelahirannya. Lantas apakah yang melatar belakangi pilihan tersebut? Bukankah lebih menjanjikan lulus dari institut teknik terbaik di negeri ini lalu bekerja di perusahaan internasional dan mendapatkan gaji dengan mata uang dollar daripada berpikir tentang pengembangan kota kelahirannya? Jawaban



yang sederhana: ada cinta di hati Goris untuk masyarakat sekitarnya. Di sini kita akhirnya bersinggungan dengan topik nasionalisme.

Banyak orang mengartikan nasionalisme sebagai sebuah rasa cinta terhadap negara ini. Lantas rasa cinta yang seperti apa? Makin hari definisi tersebut semakin menjadi tak terukur. Cinta haruslah dibuktikan dengan perbuatan. Lalu jika nasionalisme berarti mencintai negara ini, maka siapakah objeknya? Negara? Siapakah Negara? Karena sesungguhnya cinta terhadap negara ini berarti mencintai alamnya, menjaga kelestariannya. Mencintai orang yang tinggal di dalamnya, memikirkan nasib anak cucunya.

Langkah sederhana yang dilakukan Goris, mengantarkan kita pada sebuah definisi sederhana terkait cinta terhadap negeri. Mulai dari memberdayakan entitas yang paling dekat dengan kita, masyarakat sekitar kita. Mencoba membuka lapangan kerja, memaksimalkan potensi daerah yang dipadu dengan bumbu kreativitas dan inovasi. Siapa pun ternyata bisa melakukannya asalkan dua komponen sederhana ini terpenuhi, yaitu *willing* (niat) dan *able* (mampu).

Sukses Bisnis

Kemampuan mengembangkan bisnis dan membuat diferensiasi produk menjadi kunci kesuksesan sebuah bisnis. Jika kedua hal ini sudah ada pada diri seseorang, maka suatu hal dapat terjadi yang mana dalam hal ini adalah menjalankan usaha. *Willing* disini merupakan sesuatu yang biasanya timbul dikarenakan desakan dari luar atau memang keinginan dari dalam diri. Baba Rafi merupakan contoh *will* yang



timbul akibat desakan dari luar, yaitu keadaan ekonomi yang menuntut ia untuk berpikir kreatif dan mencari uang. Sementara itu, *able* di sini didapatkan dari proses pembelajaran yang terus-menerus.

Memang benar, pengusaha itu mengubah sampah menjadi harta. Mengubah hal yang terkadang dilupakan oleh manusia, yang dianggap tidak bermanfaat, menjadi sesuatu yang memiliki makna seperti yang dilakukan oleh Gorris dan *social entrepreneur* muda lainnya. Selain itu, berwirausaha menjadi hal yang penting karena perkembangan zaman sekarang menuntut orang untuk bisa mandiri, tidak bergantung kepada perusahaan tempat ia bekerja yang mungkin bisa melakukan PHK sewaktu-waktu.

Tidak ada yang salah menjadi seorang profesional yang bekerja di perusahaan multinasional. Hanya saja, di zaman sekarang hal tersebut begitu rentan. Semakin banyak lulusan-lulusan dengan kompetensi yang baik, bahkan generasi muda Indonesia harus bersaing dengan orang asing untuk membangun bangsanya. Selain itu, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi spesifikasinya dan semakin tidak kompetitif. Sebab, di saat deskripsi tugasnya sedikit saja maka tugas tersebut akan menjadi tidak sesuai dengan kompetensinya.

Untuk itu, sebagai kaum muda, kita harus benar-benar memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Menjamurnya ajang-ajang kewirausahaan muda dan banyaknya donor yang prospektif untuk membiayai program pengembangan kewirausahaan seharusnya menjadi sarana pembelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk belajar memulai usaha



berbasis kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat. Hal ini sebagai bukti nyata kecintaan terhadap bangsa melalui pengembangan daerah.

Selagi belum mempunyai tanggungan, selagi masih muda, banyak waktu untuk perbaikan diri maka jangan pernah ragu untuk berwirausaha. Jangan terlalu lama membuat *Business Plan* tetapi tidak segera dilaksanakan karena yang terpenting adalah *ACTION*.[]







**Mengabdikan
Kompetensi**

MEMBANGUN BASIS KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Suci Latifah

INDONESIA adalah negeri zamrud khatulistiwa yang terdiri dari ribuan gugusan kepulauan yang indah membentang. Tak kurang dari 17.000 gugusan kepulauan dengan kekayaan biodiversitas nomor dua di dunia menggenapkan negeri ini. Negeri yang siap untuk dibangun dan diambil manfaat sebesar-besarnya hanya untuk kesejahteraan anak negeri ini. Tetapi, negeri ini masih perlu banyak belajar bagaimana memanfaatkan kekayaannya itu. Pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,6% per tahun merupakan ancaman. Ancaman jika negeri ini tidak mampu menjamin ketahanan pangan bagi lebih dari 230 juta penduduknya.

Sungguh luar biasa Allah memberikan karunia pada negeri ini, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dikutip dari buku *Bedah Terapi Pertanian Nasional* karya Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, seorang pengamat asal Belanda, Hans Westernberg, mengemukakan keyakinan bahwa “Indonesia dapat menjadi negara kaya (lebih kaya daripada Amerika Serikat), bila saja Indonesia menangani budi daya tanaman pangan secara besar-besaran, sungguh-sungguh dan terencana.”

Westernberg melanjutkan pendapatnya: sumber daya alam Indonesia masih melimpah dan masih tersedia lahan



yang cukup luas. Masih ada 30,4 juta ha hutan cadangan, 6,3 juta ha rawa-rawa, 8,1 juta ha tanah yang belum dimanfaatkan, 790 juta ha laut yang merupakan potensi yang besar dan tidak dimiliki negara lain. Sungguh luar biasa, ditambah kekayaan alam abiotik seperti sinar matahari yang melebihi *solar radiation*, suhu yang tidak terlalu panas, letak Indonesia di luar zona angin topan, dan iklim tropis terbaik untuk pertumbuhan tanaman.

Ironi Negeri Makmur

Kekayaan yang disebutkan oleh Hans Westernberg menegaskan bahwa tidak mungkin Indonesia menjadi negara yang miskin dan serba kekurangan bahkan sampai mengimpor bahan pangan.

Siapa pun dapat memberikan penilaian bahwa Indonesia mustahil menjadi negara miskin tanpa harus dipaparkan bukti-bukti di atas. Namun kenyataan berkata lain. Pemerintah Indonesia masih harus memberikan dana kompensasi kepada sekitar 16 juta rumah tangga miskin. Tentunya hal ini sangat berkaitan erat pembangunan pertanian masih belum berimbang sebagai sektor terdepan.

Berangkat dari peluang dan ancaman tersebut pemerintah melakukan banyak evaluasi serta menyusun berbagai strategi untuk perbaikan. Salah satu hal yang menjadi agenda besar ialah ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah masalah yang kompleks multisektoral. Di dalamnya terangkum banyak pihak untuk saling menyesuaikan rencana strategi dan rencana kerja untuk mencapai tujuan ketahanan pangan Indonesia 2025. Dalam Peraturan Pemerintah tentang



Ketahanan Pangan Nomor 68 Tahun 2002 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dari pengertian ini, perihal ketahanan pangan bukan hanya tentang bagaimana memproduksi pangan melainkan juga bagaimana pangan yang di produksi sampai dan cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Fokus kerja pada bidang pertanian kini bukan lagi pekerjaan negara dengan basis pertanian saja. Bahkan negara dengan basis industri dan teknologi juga harus mengembangkan pertanian. Jerman contohnya. Pada prakata buku *Geografi Pedesaan* yang disusun atas kerja sama Yayasan Obor Indonesia dengan Menteri Urusan Bahan Pangan Jerman, Dr. Weiser mengatakan, “tugas utama kita adalah pengadaan bahan pangan yang berlimpah ruah untuk pertumbuhan penduduk dunia. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka pendidikan pertanian harus dibenahi.”

Weiser mengatakan hal tersebut sejak tahun 1986 ketika populasi penduduk dunia masih sekitar 4,5 miliar jiwa, sedangkan kini dalam kurun waktu 25 tahun populasi penduduk dunia bertambah menjadi sekitar 6 miliar jiwa. Pertambahan penduduk menjadi ancaman besar jika pertanian di dunia, dan khususnya di Indonesia, tidak dikelola secara benar.

Bangsa Indonesia memang masih perlu teknik ATM kepada bangsa Jepang. ATM berarti amati, tiru dan modifikasi. Masyarakat dunia melihat Jepang sebagai salah satu negara



yang harus diperhitungkan di kancah dunia. Mari kita lihat sejarah Indonesia dan Jepang. Saat Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, Jepang justru mendapat musibah besar. Mereka kalah perang, diblokade, serta dijatuhi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menelan kerugian teramat besar. Pada saat Indonesia memiliki peluang untuk menjadi 'macam Asia' karena kekayaannya, yang terjadi justru kita terlena dengan kekayaan itu. Hasilnya? Kini kita tertinggal jauh di belakang Jepang. Jepang malah bangkit sebagai negara modern yang unggul di bidang teknologi.

Ketika kebangkitan teknologi telah menjadi sektor unggulan di Jepang, seorang wartawan Jepang mengingatkan bangsanya. Wartawan tersebut berkata, "Hai orang Jepang, sadarlah, jika pecah perang dan Jepang diblokade, apakah kalian akan makan televisi dan radio?" Kenyataan hari ini, tidak ada yang memungkiri bahwa selain teknologi, pertanian Jepang juga maju. Bangsa Indonesia amat mungkin bisa seperti Jepang, bahkan bisa lebih dari Jepang, di saat segenap elemen bangsa bersatu membangun pertanian.

Otonomi Daerah dan Pangan

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI (Siswanto Sunarno, 2006).

Ditinjau dari sudut pandang ketahanan pangan, adanya otonomi daerah seharusnya dapat menjadi basis yang kuat



untuk mewujudkan negara Indonesia yang tahan pangan. Salah satu program utama pemerintah dalam hal ini ialah program penganeekaragaman pangan. Penganeekaragaman pangan ini sangat erat berkaitan dengan potensi khas suatu daerah. Bahasa lain yang dipopulerkan adalah pangan fungsional.

Upaya ketahanan pangan daerah berbasis potensi lokal adalah salah satu solusi logis. Berdasarkan pengertian otonomi daerah, setiap daerah dapat berkembang dan mengembangkan diri seluas-luasnya berdasarkan ciri khas masing-masing. Dengan otonomi ini diharapkan setiap daerah dapat menjamin ketahanan pangannya masing-masing melalui pemanfaatan potensi pangan lokal setiap wilayah.

Program penganeekaragaman pangan sesungguhnya telah diupayakan oleh pemerintah sejak tahun 1974 melalui Inpres Nomor 14 Tahun 1974 yang diperbarui menjadi Inpres Nomor 20 Tahun 1979, diperbarui kembali menjadi Inpres Nomor 11 tahun 1980 tentang Perbaikan Menu Makan Rakyat. Instruksi Presiden ini kemudian diperkuat menjadi Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Diversifikasi Pangan. Sebenarnya adanya perbaikan peraturan ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk mendiversifikasi pangan. Sayangnya, pangan rakyat belum juga beragam. Nilai PPH (pola pangan harapan) nasional sempat meningkat di tahun 2007 sebesar 82,8 namun kembali menurun menjadi 75,7 di tahun 2009. Berdasarkan evaluasi, periode 2005-2009 pertumbuhan PPH nasional sebesar -0,88%. Jadi, terjadi ketidaksesuaian antara komitmen dan kenyataan di lapangan.



Hal itu juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang masih condong ke beras. Perhatian terhadap riset pertanian masih lebih banyak mengedepankan beras sebagai topik utama. Tentunya ini menjadi tumpang tindih dengan komitmen untuk mendiversifikasi pangan rakyat jika riset mengenai bahan pangan lain seperti umbi-umbian dan jagung belum turut di prioritaskan.

Setiap daerah pasti memiliki target PPH yang mendekati sempurna. Namun, hal tersebut juga harus diiringi dengan beberapa perbaikan yang sederhana yang cukup urgen, yakni *pertama* tersedianya SDM yang komitmen dan kompeten di bidang ketahanan pangan. *Kedua*, menyegarkan sistem birokrasi sehingga memudahkan koordinasi multisektor. *Ketiga*, menyegarkan sistem kepegawaian untuk memunculkan kreativitas pegawai negeri. *Keempat*, fokus kerja yang terjadwal dengan baik. *Kelima*, *input*, proses, *output* dan *outcome* program dievaluasi secara berkelanjutan. *Keenam*, fokus diversifikasi pangan untuk menunjang keberlanjutan pangan wilayah.

Dengan usaha yang ulet dan serius seluruh pihak terkait, tujuan utama penganekaragaman pangan—yakni perbaikan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian alam—dapat terwujud suatu hari nanti yang ditandai meningkatnya Human Development Indeks Indonesia. Berangkat dari ketahanan pangan yang mapan dan SDM pembangun negeri yang berkualitas, Indonesia akan siap bersaing di kancah internasional menghadapi tantangan global.[]



Daftar pustaka

- Amal, Ichlasul dan Armaidly Armawi.1998. *Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional*.Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- KPPOD. 2009. “Rekapitulasi jumlah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia (Juni 2009).” http://kppod.org/datapdf/daerah/rekap_daerah_indonesia.pdf [14 September 2011]
- Nuhung, Iskandar Andi. 2006. *Bedah Terapi Pertanian Nasional; Peran Strategis dan Revitalisasi*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan.
- Sastraatmadja, Entang. 2006. *Untukmu Dewan Ketahanan Pangan*. Bandung: Masyarakat Geografi Indonesia.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutendi, Adrian. 2009. *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yayasan Obor Indonesia. 1986. *Geografi Pedesaan; Masalah Pengembangan Pangan*. Jakarta: PT Karya Unipres.
- Yunita, Ken. 2006. “45% Desa di Indonesia Masuk Kategori Desa Tertinggal.” <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/09/tgl/12/time/163933/idnews/673876/idkanal/10> [14 September 2011]



KEAMANAN DAN KETAHANAN PANGAN ASAL HEWAN

Artina Prastiwi

SALAH SATU sumber protein hewani yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah daging. Selain bernilai gizi tinggi, daging juga dapat menjadi media penyebaran penyakit dan bakteri. Kesehatan masyarakat lebih ditekankan pada pemeriksaan dan pengawasan ternak serta peralatan pengolahan dan distribusi produksi ternak (daging). Saat ini penjual daging masih menjual daging inferior, tidak ada capnya atau justru dicampur formalin. Hal ini tentu sangat merugikan konsumen dan menimbulkan perdagangan daging yang tidak sehat. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pengawasan serta pemeriksaan daging.

Daging adalah bagian hewan yang disembelih (sapi, kerbau, kambing, domba) yang dapat dimakan dan berasal dari otot rangka atau yang terdapat di lidah, diafragma, jantung dan oesophagus dengan atau tidak mengandung lemak. Daging merupakan bahan pangan yang penting dalam memenuhi kebutuhan gizi. Menurut Soeparno (1992) daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua hasil produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya.



Berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor 413/KPTS/TN.310/7/1992 yang dimaksud daging adalah bagian-bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara selain pendinginan. Menurut SNI 01-6159-1999 daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih serta lazim dan layak dimakan manusia. Sedangkan karkas adalah seluruh, setengah atau seperempat bagian dari hewan potong sehat yang disembelih setelah pemisahan kepala, kaki sampai karpus dan tarsus serta ekor, pengulitan, serta setelah pengeluaran isi rongga perut dan dada.

Menurut Direktorat Jenderal Peternakan, daging adalah bagian-bagian dari hewan potong yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia (kecuali dengan pendinginan). Karkas adalah bagian dari hewan potong yang disembelih setelah kepala dan kaki dipisahkan, dikuliti, serta isi rongga perut dan dada dikeluarkan. Pada babi pengerokan bulu serta setelah pengeluaran isi rongga perut dan dada.

Penjaminan Kualitas Daging

Kesehatan daging adalah segala usaha untuk mendapatkan daging yang sehat dan bersih, serta mempertahankan kondisi tersebut mulai dari hewan sampai ke konsumen. Komposisi daging adalah protein 18%, nonprotein 1,5%, lemak 3%, glikogen 1%, mineral 1,5%, air 75,5%. Warna daging dipengaruhi oleh adanya zat warna daging, yaitu oksimyo-globin, globin, metmyoglobin, myoglobin. Bagian-bagian daging yang berkualitas tinggi mempunyai syarat-syarat, yaitu serabutnya halus, jumlah lemak sedang, serabut berjalan searah sehingga bidang irisan rata.



Higiene daging adalah usaha-usaha untuk memperoleh daging dan hasil daging yang bersih, sehat, dan aman untuk dimakan serta mempertahankan kondisi tersebut sejak dari sumbernya sampai pada konsumen. Tujuan higiene daging adalah mencegah penularan penyakit menular dari hewan ke manusia, menyediakan bahan makanan yang sehat, baik, dan aman bagi manusia, pengurangan kerugian daging dan hasil-hasil produknya.

Adapun pengawasan daging bertujuan untuk melindungi konsumen dari penyakit yang disebabkan oleh makan daging yang tidak sehat, mencegah konsumen membeli daging yang bermutu inferior dan mencegah pemalsuan daging. Sedangkan tujuan dari pemeriksaan daging adalah melindungi masyarakat dari penyakit daging yang disebabkan oleh daging yang tidak sehat, mencegah pemalsuan daging, mencegah konsumen membeli daging yang inferior, dan melindungi ternak dari penyakit.

Pelaksanaan pengawasan daging meliputi pengawasan terhadap daging sapi, daging kambing atau domba, daging babi, dan unggas yang beredar di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota yang dilakukan di tempat-tempat pemotongan atau RPH (Rumah Potong Hewan). Pemeriksaannya meliputi dua tahap. Apabila daging telah memenuhi syarat-syarat dalam dua tahap ini, maka daging tersebut dapat dikonsumsi. *Pertama*, pemeriksaan sebelum dipotong (*ante mortem*); meliputi keadaan hewan, temperatur tubuh hewan, keadaan lubang alami, gejala abnormal (seperti pincang, diare, dan kekurusan). *Kedua*, pemeriksaan setelah dipotong (*post mortem*); meliputi pemeriksaan organ dalam, yang biasanya menjadi tempat predileksi penyakit atau parasit.



Pengawasan daging juga dilakukan di tempat peredaran, seperti penyimpanan atau penampungan, dan penajaaan. Caranya dengan mengambil sampel daging untuk pengujian kualitas di laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kegiatan pengawasan daging dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas provinsi dan kabupaten atau mota.

Tujuan dilakukannya tindakan-tindakan pemeriksaan dan pengawasan higiene daging adalah melindungi konsumen dari penyakit akibat daging yang tidak sehat, mencegah pemalsuan daging, mencegah konsumen membeli daging yang inferior, dan melindungi ternak dari penyakit. Sasaran pengawasan higiene daging adalah agar terjamin dan tersedia daging yang memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) yang beredar di masyarakat.

Isu Krusial

Keamanan pangan merupakan persyaratan utama yang semakin penting di era perdagangan bebas. Masalah pentingnya keamanan pangan juga telah tercantum dalam deklarasi gizi dunia dalam konferensi gizi internasional pada tanggal 11 Desember 1992, yaitu “kesempatan untuk mendapatkan pangan yang bergizi dan aman adalah hak setiap orang” (ICD/SEAMEO TROPMED RCCN 1999). Pangan yang aman, bermutu, bergizi, berada dan tersedia cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makan, berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.



Setiap negara membutuhkan program keamanan pangan yang efektif untuk melindungi kesehatan bangsa dan berpartisipasi dalam produk perdagangan pangan internasional. Menurut The Codex Alimentarius (FAO/ WHO 1997), keamanan pangan didefinisikan sebagai jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya bagi konsumen saat disiapkan dan atau dikonsumsi sesuai dengan tujuan penggunaannya. Perlindungan konsumen dan pencegahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh makanan (*foodborne illness*) adalah dua elemen penting dalam suatu program keamanan pangan, dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri pangan (produsen), dan konsumen.

Pangan asal hewan memiliki potensi mengandung bahaya biologis, kimia, dan/atau fisik yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Pangan asal hewan seperti daging, susu, dan telur serta hasil olahannya umumnya bersifat mudah rusak (*perishable*) dan memiliki potensi mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik, yang dikenal sebagai *potentially hazardous foods* (PHF).

Menurut WHO (2005), sekitar 75% penyakit-penyakit baru yang menyerang manusia dalam dua dasawarsa terakhir disebabkan oleh patogen-patogen yang berasal dari hewan atau produk hewan. Dengan demikian, pangan asal hewan lebih berpotensi berbahaya dibandingkan pangan nabati karena dapat menyebabkan *zoonosis* pada konsumen. Oleh sebab itu, aspek keamanan pangan asal hewan perlu mendapat perhatian khusus.

Kebijakan pemerintah dalam penyediaan pangan asal hewan di Indonesia didasarkan atas pangan yang aman, se-



hat, utuh, dan halal. Hal tersebut sejalan dengan keamanan (*safety*) dan kelayakan (*suitability*) pangan untuk dikonsumsi manusia yang ditetapkan oleh Codex Alimentarius. Aman berarti tidak mengandung penyakit dan residu, serta unsur lain yang dapat menyebabkan penyakit dan mengganggu kesehatan manusia. Sehat berarti mengandung zat-zat yang berguna dan seimbang bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Utuh berarti tidak dicampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau dipalsukan dengan bagian dari hewan lain. Halal berarti disembelih dan ditangani sesuai dengan syariat agama Islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk: (a) pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*; (b) penjaminan keamanan; (c) penjaminan higiene dan sanitasi; (d) pengembangan kedokteran perbandingan; (e) penanganan bencana. Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, meliputi pengawasan dan pemeriksaan bahan makanan asal hewan dan ikan, serta bahan asal hewan.

Berdasarkan pasal 58 UU tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya melaksanakan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan. Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan saat peredaran setelah pengawetan.



Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan dilakukan terhadap produk hewan yang diproduksi atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Produk hewan yang diproduksi dan dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal. Produk hewan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh negara pengimpor. Pelaksanaan dan pengawasan ketat dari pemerintah akan mendukung program ketahanan pangan dan menekan keresahan masyarakat terhadap pangan asal hewan.

Pengawasan RPH

Berdasarkan SNI 01-6159-1999, Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat.

RPH menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 555/Kpts/TN.240/9/1986, merupakan sarana pelayanan masyarakat dalam menyediakan daging aman, sehat, utuh, dan halal yang mempunyai fungsi sebagai tempat dilaksanakannya pemotongan hewan yang benar, sebagai tempat dilaksanakannya pemeriksaan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*) dan sesudah dipotong (*post mortem*). Hal ini untuk mencegah penularan penyakit dari hewan ke manusia, seba-



gai tempat mendeteksi dan memonitor penyakit hewan yang ditemukan pada saat pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem*. Selain itu, untuk mencegah dan memberantas penyakit hewan menular di daerah asal hewan, melaksanakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan retribusi pemotongan dan retribusi yang lain.

Pemeriksaan *ante mortem* dilakukan sebelum hewan dipotong untuk membedakan hewan yang berpenyakit menular dan sehat. Pemeriksaan ini dilakukan dekat sebelum hewan dipotong. Jika hewan setelah diperiksa tidak segera dipotong hingga melampaui 24 jam, maka hewan itu harus diperiksa lagi. Pemeriksaan ini meliputi keadaan umum hewan, lubang-lubang tubuh hewan, pernafasan hewan, temperatur tubuh hewan, selaput-selaput lendir mulut dan hidung, serta tanda-tanda adanya suntikan hormon. Pemeriksaan ini dilakukan sewaktu hewan dalam keadaan berdiri dan berjalan, berbelok ke kanan dan kiri. Keseluruhan pemeriksaan harus berjalan cepat agar aliran hewan dari kandang ke ruang pemotongan tidak terhambat. Pemeriksaan yang dilakukan di RPH Jagalan dengan cara mengambil sampel sapi adalah kurang tepat karena tidak terlalu detail dalam pemeriksaan sapi.

Kandang peristirahatan merupakan instalasi penting yang harus dimiliki RPH. Setelah sampai RPH, hewan potong harus diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum dipotong, untuk mendapatkan daging yang tidak mudah busuk. Hewan dipuaskan; hanya diberi minum. Keadaan ini bermanfaat bagi pengeluaran isi perut. Di samping itu, menurut pene-



litan Sylvania Agricultural Experimen Station, hewan yang dipuasakan 24-48 jam sebelum dipotong menunjukkan karkas lebih tahan lama, pengeluaran darah melimpah, lebih mudah dikuliti, warna karkas lebih terang, dan jika perut penuh maka mudah pecah bila terbanting atau tertusuk. Selain itu, kandang peristirahatan juga dapat dimanfaatkan untuk pemeriksaan *ante mortem* karena pemeriksaan dapat dilakukan dengan maksimal dan apabila ditemukan kejanggalan dapat segera diambil keputusan sebelum hewan dipotong.

Hewan yang dinyatakan baik pada pemeriksaan *ante mortem* diizinkan untuk dipotong tanpa syarat. Adapun hewan yang terdiagnosis menderita penyakit, maka harus segera diambil keputusan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413 tahun 1992. Pemeriksaan ini dilakukan oleh seorang dokter hewan atau keurmater.

Pemeriksaan *post mortem* dilakukan oleh petugas berwenang, dalam hal ini adalah dokter hewan atau keurmater di bawah pengawasan dokter hewan. Pemeriksaan dilakukan segera setelah pemotongan hewan. Pemeriksaan ini tidak sepenuhnya dilakukan di RPH Jagalan karena banyaknya hewan yang dipotong dan kurangnya tenaga pemeriksa. Sehingga, pemeriksaan hanya dilakukan apabila petugas mencurigai adanya abnormalitas saat pemeriksaan *ante mortem*. Pemeriksaan *post mortem* seharusnya dilakukan dengan melihat, meraba, dan menyayat organ untuk melihat adanya kelainan organ yang mengindikasikan adanya penyakit tertentu.

Pemeriksaan *post mortem* meliputi pemeriksaan terhadap keadaan semua bagian organ, meliputi warna, bau, konsistensi mengalami perubahan atau tidak. Beberapa kasus yang



sering ditemukan di RPH pada saat pemeriksaan *post mortem* antara lain adalah *fasciolasis*. Penyakit ini disebabkan oleh cacing dari golongan trematoda yaitu *fasciola gigantica*.

Pada pemeriksaan *post mortem* biasanya hepar akan menunjukkan adanya warna seperti kapur yang apabila disayat akan ditemukan cacing dewasa. Bagian hepar yang mengalami fasciolasis haru dipisahkan atau diapkir, sedangkan dagingnya tetap boleh dikonsumsi. Hal ini yang perlu menjadi perhatian agar masyarakat benar-benar mendapatkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.[]



ANEMIA, DAN BISKUIT SEHAT DARI PANGAN LOKAL

Ratih Kumala Dewi

KEKURANGAN zat besi atau anemia di Indonesia bertahan sebagai masalah kesehatan yang cukup signifikan. Survei dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa prevalensi dari kekurangan zat besi adalah 44,48% pada anak-anak berumur 0-5 tahun. Laju pertumbuhan anemia mencapai 50-85% dilaporkan terdapat pada anak-anak berumur 12-23 bulan di daerah miskin dan pendatang. Oleh karena itu, malnutrisi pada anak-anak di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. World Food Programs (WFP) memperkirakan 13 juta anak-anak di Indonesia menderita malnutrisi pada enam bulan pertama di tahun 2008. Sejalan dengan data ini, dilaporkan bahwa sekitar 50 % bayi dan anak-anak memiliki berat badan di bawah rata-rata.

Penyebab utama anemia adalah ketidakcukupan ketersediaan biologis zat besi dari konsumsi sehari-hari pada anak untuk mendukung kecepatan pertumbuhan anak dan perkembangan otak. Anemia pada bayi dan anak-anak merupakan masalah serius, mengancam kesehatan anak dan mental serta mempengaruhi perkembangan mental, sosial, dan fisik. Anak yang terserang anemia sangat rentan terhadap infeksi yang juga menyebabkan kemunduran status gizinya.



Dapat diestimasikan bahwa kehilangan 1% status zat besinya menyebabkan kehilangan 1% produktivitas nasional.

Menghadapi fakta rawannya kekurangan zat besi tersebut, ditempuh tiga strategi penanganannya.

1. Distribusi suplemen zat besi;
2. Fortifikasi zat besi pada makanan pokok seperti tepung;
3. Pendekatan pada makanan dengan program edukasi gizi.

Biskuit Alternatif

Berdasarkan pengalaman di Asia Tenggara, pendekatan yang ketiga memiliki orientasi jangka panjang yang lebih memungkinkan dibandingkan strategi lainnya. Dalam konteks ini perlu dibuat konsep makanan berbasis ketersediaan zat besi khususnya bagi anak-anak. Biskuit bayi menjadi pilihan karena makanan tersebut sangat populer dan diterima dengan baik sebagai Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) di Indonesia.

Produksi biskuit di Indonesia sendiri mencapai 259,5 ribu ton pada tahun 2007, dan sebanyak 282,8 ribu ton pada tahun 2008 dan diramalkan akan terus meningkat setiap tahunnya. Sayangnya, biskuit sebagai makanan bayi itu sangat kritis karena lebih menonjolkan rasa manisnya. Hal ini tentu akan mengurangi keinginan bayi terhadap sayur-sayuran. Di sisi lain, bahan utama dalam produksi makanan bayi di Indonesia seperti biskuit ternyata masih mengandalkan bahan baku impor. Padahal, di Indonesia masih banyak bahan baku lain yang sangat potensial untuk dimanfaatkan.



Untuk itu, perlu diciptakan produk (biskuit) sehat yang menyediakan gizi seimbang dan dibutuhkan bagi pertumbuhan anak-anak khususnya bayi dan batita. Diharapkan produk ini mampu memenuhi ketersediaan zat besi dengan rasa sayur. Sebagai bahan utama dipilih tepung jawawut. Bahan utama ini merupakan bahan baku lokal Indonesia yang potensial namun belum luas pemanfaatannya: tepung kacang hijau, ikan teri kering, sayuran, dan tomat.

Millet atau yang lebih dikenal sebagai jawawut adalah sejenis sereal yang biasa dijadikan pakan untuk burung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jawawut ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai bahan baku makanan, khususnya makanan berkarbohidrat tinggi. Tepung jawawut memiliki gizi yang lengkap jika dibandingkan dengan tepung gandum, terutama pada ketersediaan asam amino dan antioksidannya. Bahan baku ini menyediakan energi, protein, vitamin, mineral, kaya akan vitamin B khususnya niacin, B6, folacin, dan vitamin E. Jawawut dapat menjadi sumber asam amino esensial yang dibutuhkan oleh manusia seperti isoleusin, leusin, fenilalanin, dan treonin. Ketersediaan asam amino memiliki peran dalam mengubah ferri dalam bentuk ferro sehingga zat besi lebih mudah untuk diserap.

Penambahan ikan teri kering memberikan jumlah yang tinggi kalsium dan zat besi. Jumlah garam yang tinggi pada bahan baku tersebut dapat mengganti fungsi penambahan garam pada pembuatan adonan. Kalsium dan zat besi berperan penting juga dalam pertumbuhan tulang dan gigi. Tepung kacang hijau memiliki kandungan protein yang tinggi, kaya



akan serat, zat besi, dan vitamin A. Tomat juga ditambahkan dalam adonan sebagai sumber vitamin C yang dapat menambah daya serap zat besi yang berasal dari bahan-bahan lain. *Palm oil stearin* juga ditambahkan sebagai sumber provitamin A. sementara telur yang ditambahkan selain sebagai pengikat adonan juga membantu fungsi dari *palm oil stearin* tersebut.

Dengan bahan-bahan tersebut, produk biskuit berbahan dasar pangan lokal ini tidak hanya kaya zat besi, tetapi juga kaya protein dan vitamin yang dapat mempercepat penyerapan zat besi itu sendiri. Zat besi yang berasal dari tumbuhan (dikenal sebagai zat besi *non-heme*) penyerapannya lebih rendah dibandingkan zat besi *heme* yang berasal dari hewan. Oleh karena itu, keberadaan antioksidan dan vitamin C yang berasal dari bahan baku lain dapat membantu banyak dalam penyerapannya kembali.

Dengan menggunakan metode Pearson, formulasi antara tepung jawawut, kacang hijau, ikan teri kering, puree sayuran, dan tomat menghasilkan produk akhir dengan memenuhi 1/3 nilai RDA (Recommended Daily Allowance). Produk akhir mengandung $Aw < 0.6$ dan dikemas dalam *polypropylene bag*. Produk ini dapat digunakan sebagai MP-ASI sehari-hari.

Produk biskuit ini dapat dimakan oleh bayi di bawah satu tahun dalam bentuk bubur dengan penambahan air. Untuk anak berusia satu tahun, memakan biskuit tersebut secara utuh dapat merangsang kemampuan mengunyah mereka sehingga saraf-sarafnya menjadi baik.

Kepedulian terhadap kesehatan anak merupakan poin terbesar dalam mengembangkan produk-produk pangan baru. Pangan adalah hak asasi manusia terbesar, dan melalui



pangan, masalah kesehatan bangsa ini—terutama pada anak-anak—dapat secara perlahan diselesaikan. Produk biskuit ini hanya satu dari sekian banyak solusi yang ditawarkan.[]



MENGELOLA PULAU KECIL TERLUAR DENGAN PENDEKATAN EKOLOGI

Lutfi Brilliant Wanda

INDONESIA merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah. Indonesia memiliki wilayah seluas 7,7 juta km², dengan luas daratannya hanya 1/3 dari luas lautan, memiliki garis pantai terpanjang ke-4 di dunia, yaitu + 95.181 km, serta memiliki + 17.480 pulau (Dekin, 2009).

Menurut Soebroto, dkk. (1983) yang dimaksud dengan kepulauan adalah kelompok pulau termasuk bagian dari pulau, perairan yang menghubungkannya, dan bangunan alamiah lainnya yang saling erat berhubungan sehingga pulau-pulau, perairan, dan bangunan alamiah lainnya itu membentuk satu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik secara intrinsik atau yang berdasarkan sejarah telah dipandang demikian. Sedangkan yang dimaksud dengan negara kepulauan adalah negara yang terdiri seluruhnya dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lainnya. Negara kepulauan dapat menarik garis dasar berdasarkan Garis Pangkal Lurus Kepulauan (*straight archipelagic base lines*) yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan karang-karang kering terluar. Seluruh perairan yang berada di dalam garis dasar disebut perairan kepulauan (*archipelagic waters*).



Konsep dasar wilayah negara kepulauan Indonesia telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1967. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suryadi 2003).

Diakunya konsep ini oleh dunia internasional seperti yang tercantum pada UNCLOS 1982, memberikan tanggung jawab besar bagi bangsa Indonesia dalam mengelola laut terutama: (1) bagi kepentingan nasional sebagai sumber perekonomian negara, (2) secara regional berbatasan dengan negara-negara tetangga yang juga memiliki kepentingan mengelola laut, dan (3) secara Internasional perairan Indonesia merupakan perairan vital yang dapat berpengaruh pada perdagangan, kepentingan pertahanan maupun keseimbangan ekosistem laut global.

Dalam mengelola laut sebagai wilayah ada dua hal pokok yang harus diselesaikan. *Pertama* secara eksternal, yaitu menata batas wilayah laut dengan negara-negara tetangga sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku. *Kedua*, secara internal, yaitu menata wilayah laut, khususnya batas-batas peruntukan wilayah laut sebagai suatu pengaturan pemanfaatan laut yang mengakomodasi semua kepentingan dengan tetap mengutamakan asas persatuan dan kesatuan bangsa.

Pulau-Pulau Kecil Terluar

Pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang dari 2.000



km² atau pulau yang memiliki lebar kurang dari 10 km beserta kesatuan ekosistem di sekitarnya yang terpisah dari pulau induk (Cicin, dkk., 1993), sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 yang dimaksud dengan pulau-pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Pulau-pulau kecil memiliki karakteristik biogeofisik yang khas (Departemen Kelautan Perikanan, 2006), yaitu:

- a. Terpisah dari habitat pulau induk (*mainland island*), sehingga bersifat insular;
- b. Sumber air tawar yang terbatas, di mana daerah tangkapan airnya relatif kecil;
- c. Peka dan rentan terhadap pengaruh eksternal baik alami maupun akibat kegiatan manusia, misalnya badai dan gelombang besar, serta pencemaran;
- d. Memiliki jenis endemik yang bernilai ekologis tinggi;
- e. Area perairannya lebih luas dari area daratannya dan relatif terisolasi dari daratan utamanya (benua atau pulau besar);
- f. Tidak memiliki *hinterland* yang jauh dari pantai.



Pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar tersebut dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI. Kedaulatan yang dimaksud adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu pulau-pulau terkecil dalam hukum konstitusi dan internasional yang konsep kedaulatannya terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografis, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yuridiksi hukum sendiri (DKP, 2008). Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 78/2005 bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan tujuan:

- a. Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa, serta menciptakan stabilitas kawasan;
- b. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan;
- c. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Dengan demikian, tujuan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar selain untuk menjaga pertahanan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional, juga diharapkan dapat mengatasi ancaman keamanan yang meliputi kejahatan transnasional (*transnational crime*), pencurian ikan (*illegal fishing*), pencurian kayu (*illegal logging*), perdagangan perempuan dan anak (*women and child trades*), imigran ilegal, dan peredaran narkoba. Tujuan lain pengelolaan pulau-pulau kecil terluar ada-



lah pengembangan kawasan konservasi. Kawasan konservasi atau kawasan perlindungan alam adalah kawasan dengan ciri tertentu baik di darat maupun perairan yang mempunyai fungsi sebagai perlindungan, sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis hewan dan tumbuhan serta pemanfaatan sumber daya hayatinya dan ekosistemnya (Suryadi, 2003).

Potensi pulau-pulau kecil di Indonesia diperkirakan mencapai 10.000 pulau dari sejumlah 17.508 pulau. Namun, pengelolaan pulau-pulau kecil ini lemah karena paradigma pembangunan yang bersifat sentralistik dan eksploitatif di masa Orde Baru. Kelemahan ini dapat dijabarkan, yaitu dominasi pemerintahan sentralistis yang membentuk kebijakan eksklusif, tidak berfungsinya koordinasi antarlembaga, kebijakan yang tidak holistik, tidak berjalannya penegakan hukum dan sistem peradilan, serta kemampuan sumber daya manusia tidak memadai.

Inilah yang menyebabkan sulitnya pulau-pulau kecil terluar di wilayah di perbatasan untuk dapat berkembang. Kesukaran atau ketidakmampuan untuk mencapai skala ekonomi (*economic of scala*) yang optimal dan menguntungkan dalam hal administrasi, usaha produksi, dan transportasi, sebagai faktor yang turut menghambat pembangunan hampir di semua pulau-pulau kecil di dunia (Suryadi, 2003).

Pulau kecil terluar dijadikan sebagai wilayah acuan dalam menentukan daerah perbatasan suatu negara. Kondisi umum daerah perbatasan dilihat dari aspek pancagatra yaitu:



1. Aspek Ideologi; kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke kawasan perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis, yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari rakyat Indonesia.
2. Aspek Politik; kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, terutama apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, maka hal ini pun selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa.
3. Aspek Ekonomi; kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. Maka, tidak jarang daerah perbatasan sebagai pintu masuk atau tempat transit pelaku kejahatan dan teroris.
4. Aspek Sosial Budaya; akibat globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, teknologi informasi, dan komunikasi, dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Abubakar 2006).



Kawasan Konservasi Perairan

Dalam perencanaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia, strategi dan kebijakan serta konservasi yang diambil didasarkan pada karakteristik pantai, sumber daya dan kebutuhan pemanfaatannya. Karena itu di dalam proses perencanaan pulau-pulau kecil tersebut, dimungkinkan pengambilan keputusan akan diarahkan pada kegiatan konservasi untuk generasi yang akan datang (Abubakar, 2006). Konservasi dapat didefinisikan sebagai perlindungan, pengawetan dan pemeliharaan atau dengan kata lain menjaga sesuatu dalam keadaan selamat atau aman. Jika diterapkan pada sumber daya perairan di pulau-pulau kecil terluar maka definisi untuk konservasi adalah pengawetan sumber daya yang ada di perairan pulau-pulau kecil tersebut tanpa mengurangi efisiensi dan dikelola secara terpadu (Kay, dkk., 1999).

Kawasan konservasi laut sering dianggap sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi konservasi keanekaragaman hayati. Namun, kawasan konservasi laut juga dapat memainkan peran penting di dalam pengelolaan perikanan dan pariwisata. Selama ini manfaat perikanan dan pariwisata dipandang sebagai hasil samping dari pelestarian keanekaragaman hayati, namun para ilmuwan dan manajer akhir-akhir ini mengubah cara pandang tersebut dengan memberikan penekanan pada manfaat kawasan konservasi laut di dalam pengelolaan manfaat. Misalnya, Program Kawasan Habitat Ikan Australia secara khusus menyatakan bahwa kawasan konservasi laut berfungsi untuk meningkatkan perikanan, sementara pelestarian keanekaragaman hayati dipandang hanya sebagai manfaat tambahan (Kay, dkk., 1999).



Kawasan konservasi laut memungkinkan dikembangkan langkah-langkah pengelolaan yang sesuai dengan kondisi setempat. Untuk itu, langkah-langkah pengelolaan tersebut berbeda dari yang selama ini dilaksanakan semisal kuota, peraturan tentang sarana tangkap dan izin bagi operator di bidang industri pariwisata, yang tidak bersifat khas daerah. Kawasan konservasi laut memungkinkan dilakukan pemanfaatan secara khusus untuk kawasan-kawasan tertentu dan melakukan pelarangan terhadap pemanfaatan serupa untuk wilayah-wilayah di sekitarnya. Misalnya, larangan penangkapan dapat dilakukan di wilayah-wilayah pemijahan, sementara itu penangkapan dengan alat tangkap sederhana (tradisional) masih dapat diizinkan untuk dilakukan di kawasan-kawasan di sekitar wilayah pemijahan tersebut. Izin kegiatan wisata selam dapat diberikan untuk hampir semua kawasan konservasi laut (Suryadi, 2003).

Pengelolaan secara efektif dari wilayah desa-desa pesisir yang jauh letaknya memerlukan manajemen infrastruktur yang sesuai dengan kondisi setempat, dan memerlukan staf manajemen yang mengenal laut di wilayahnya. Struktur manajemen yang tidak memiliki ciri khas setempat pada umumnya tidak memiliki kapasitas seperti ini, namun melalui kawasan konservasi laut kapasitas ini dapat dikembangkan bagi wilayah-wilayah pesisir yang sangat memerlukan perbaikan di bidang manajemen (Abubakar, 2006).

Permasalahan Pulau Kecil Terluar

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di lokasi sangat strategis—yakni di antara dua benua dan



dua samudra—Indonesia mempunyai perbatasan di wilayah laut dengan 10 negara. Sementara di wilayah darat hanya berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Perbatasan Indonesia yang paling ekstensif adalah batas maritim dengan 10 negara tetangga, yakni Australia, Timor Leste, Papua Nugini, Palau, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, dan India.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil terluar tercatat ada 92 pulau terluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ke-92 pulau tersebut tersebar di 18 provinsi dan berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu: Australia (27 pulau), Filipina (11 Pulau), India (6 pulau), Malaysia (17 pulau), Papua Nugini (1 Pulau), Republik Palau (7 pulau), Singapura (4 pulau), Thailand (1 pulau), Timor Leste (6 pulau), Vietnam (3 pulau), dan 9 pulau lainnya berbatasan dengan laut lepas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di seluruh wilayah Indonesia terdapat 183 titik dasar (masih termasuk Pulau Sipadan dan Ligitan) sebagai acuan dalam menentukan batas wilayah Negara Republik Indonesia. Dari 183 titik dasar tersebut 92 di antaranya terdapat di pulau-pulau kecil terluar (DKP, 2006). Pulau-pulau itu, diberitakan bahwa ada 12 pulau kecil yang berada pada status rawan sengketa. Adapun 12 pulau kecil tersebut sebagaimana yang dipaparkan dalam buku *Profil Pulau-pulau Kecil Terluar di Indonesia* yang disusun Departemen Kelautan dan Perikanan, adalah:



1. Pulau Rondo

Pulau terluar strategis di ujung barat Indonesia yang menjadi jalur pelayaran internasional, berbatasan dengan India. Kekayaan alam berupa perikanan dan terumbu karang, rawan pencurian ikan (*illegal fishing*).

2. Pulau Sekatung

Terletak di utara Kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan Vietnam. Tidak berpenghuni, sering digunakan sebagai persinggahan nelayan lokal dan asing, potensi berupa perikanan dan terumbu karang, rawan pencurian ikan.

3. Pulau Nipa

Pulau tidak berpenghuni yang berbatasan dengan Singapura. Di sekitar pulau ini dijadikan penambangan pasir. Akibatnya, terjadi abrasi yang mengancam tenggelamnya pulau.

4. Pulau Berhala

Berada di Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia, dan tidak berpenghuni. Memiliki kekayaan alam berupa kekayaan terumbu karang bawah laut dan hutan tropis. Rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif dari negara tetangga.

5. Pulau Marore

Salah satu pulau kecil di Laut Sulawesi dan berbatasan dengan Filipina. Merupakan kawasan khusus di perbatasan Filipina yang disebut *check point border crossing area*; rawan pencurian ikan.



6. Pulau Miangas

Salah satu gugus Kepulauan Nanusa yang berbatasan langsung dengan Filipina. Dilaporkan mata uang yang mereka gunakan adalah Peso dan bahasa sehari-hari mereka adalah Tagalog. Rawan terorisme dan penyelundupan.

7. Pulau Marampit

Salah satu pulau di Laut Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina. Rawan abrasi karena berhadapan dengan laut lepas, rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif dari negara tetangga.

8. Pulau Batek

Merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Menjadi tempat bertelur penyusu-penyu serta lokasi migrasi lumba-lumba. Rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif dari negara tetangga.

9. Pulau Dana

Terletak di sebelah selatan Pulau Rote yang merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan Australia. Letaknya strategis karena menjadi pintu masuk jalur pelayaran internasional (ALKI jalur 3). Rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif dari negara tetangga.

10. Pulau Fani

Pulau terluar yang berbatasan dengan Republik Palau. Penduduk lebih sering berinteraksi dengan negara tetangga, rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif dari negara tetangga.



11. Pulau Fanildo

Salah satu gugus Pulau Mapia. Pulau tidak berpenghuni yang berbatasan dengan Republik Palau. Rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif dari negara tetangga.

12. Pulau Bras

Terletak di ujung utara Pulau-pulau Mapia, berbatasan dengan Republik Palau. Potensial untuk wisata terumbu karang, mata pencarian nelayan membuat kopra. Rawan abrasi dan rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif dari negara tetangga.

Pulau-pulau kecil merupakan ujung tombak kedaulatan terluar negeri ini. Kondisi mereka yang menentukan seberapa besar perhatian pemerintah terhadap wilayah terluar. Tidak jarang pulau-pulau kecil terluar ini memiliki jarak yang lebih dekat dengan negara tetangga dibandingkan dengan Republik Indonesia, bahkan sebagian dari mereka berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kondisi ini membuat pemerintah terkait sulit untuk selalu mengawasinya, dan karena celah ini negara tetangga dapat dengan leluasa menggoyang kedaulatan NKRI. Mereka dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang mendatangkan devisa bagi mereka seperti pariwisata, rekreasi, sampai konservasi.

Melemahnya sampai hilangnya kedaulatan dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya secara ekonomi dan secara politik. Secara ekonomi pulau-pulau kecil dapat dikatakan hilang apabila pulau kecil tersebut dikelola oleh negara lain padahal secara hukum pulau kecil tersebut merupakan milik Indonesia. Secara ekonomi juga sebuah bangsa dapat



memenangi pengajuan klaim sebuah pulau kecil yang disengketakan oleh kedua negara atau lebih, seperti yang dilakukan oleh Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan.

Selain secara ekonomi dapat juga secara politik. Secara politik pulau-pulau kecil dapat dikatakan hilang apabila masyarakat di pulau-pulau kecil tersebut lebih mengakui negara lain dibandingkan Negaranya sendiri. Contoh kasus di pulau Miangas, secara hukum pulau tersebut milik Indonesia tetapi secara politik merupakan milik Filipina karena bahasa yang dipakai dalam percakapan sehari-hari adalah bahasa Tagalog, bukan bahasa Indonesia. Begitu juga dengan mata uang yang dipakai, masyarakat di pulau tersebut lebih banyak menggunakan mata uang Peso bukan Rupiah (Abubakar, 2006).

Belajar pada Kasus Sipadan-Ligitan

Kasus Sipadan dan Ligitan mulai muncul sejak 1969 ketika Tim Teknis Landas Kontinen Indonesia–Malaysia membicarakan batas dasar laut kedua negara. Kedua pulau Sipadan dan Ligitan tertera di Peta Malaysia sebagai bagian dari wilayah negara RI, padahal kedua pulau tersebut tidak tertera pada peta yang menjadi lampiran Perpu No. 4/1960 yang menjadi pedoman kerja Tim Teknis Indonesia.

Dengan temuan tersebut Indonesia merasa berkepentingan untuk mengukuhkan Sipadan dan Ligitan. Maka, dicarilah dasar hukum dan fakta historis serta bukti lain yang dapat mendukung kepemilikan dua pulau tersebut. Di saat yang sama Malaysia mengklaim bahwa dua pulau tersebut sebagai miliknya dengan mengemukakan sejumlah alasan, dalil



hukum, dan fakta. Kedua belah pihak untuk sementara sepakat mengatakan dua pulau tersebut dalam “status quo”. Pada tahun 1989, masalah Sipadan dan Ligitan baru dibicarakan kembali oleh Presiden Soeharto dan PM. Mahathir Muhamad.

Kasus ini terus berlanjut hingga putusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) tanggal 17 Desember 2002 memenangkan Malaysia atas sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Putusan ini harus dijadikan sebagai pembelajaran Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI. Disebutkan dari 17 orang juri yang bersidang hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Kekalahan Indonesia terhadap Malaysia dikarenakan oleh tiga hal, yaitu:

1. Malaysia secara terus-menerus berada di pulau tersebut (*continuous present*);
2. Penguasaan efektif pulau oleh Malaysia (*effective occupation*);
3. Perlindungan serta pelestarian ekologis yang dilakukan oleh Inggris yang waktu itu menjajah Malaysia (*effective conservation*).

Dengan demikian, putusan Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia sebagaimana yang telah dipaparkan di atas lebih kepada pengelolaan efektif. Efektivitas pada dasarnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan tetap berkelanjutan dengan bukti yang nyata di dalam suatu wilayah, dan bukan tindakan-tindakan yang bersifat spontanitas saja.

Salah satu kelemahan Indonesia pada kasus ini seperti yang disebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam *Media Indonesia* (2010) adalah Indonesia tidak memiliki *physi-*



cal occupation atau batas identifikasi secara fisik yang jelas berdasarkan prinsip *effectivity*. Berbeda dengan Inggris yang telah melakukan *control the collection of turtle eggs* (pajak pengumpulan telur penyu) di Pulau Sipadan dan Ligitan mulai tahun 1914 yang mengacu kepada *Turtle Preservation Ordinance* (Ordonansi Pelestarian Penyu) tahun 1917-1950, *the establishment of a bird sanctuary* (Perlindungan Satwa Burung) di Pulau Sipadan tahun 1933, dan *constructed light houses* (Pembangunan Mercusuar) awal tahun 1960.

Tindakan-tindakan hukum, baik administrasi maupun legislatif, yang dilakukan Inggris sebagai penjajah Malaysia adalah salah satu bukti hukum yang memenangkan Malaysia. Hal inilah yang tidak dilakukan Belanda yang notabene adalah penjajah Indonesia sebagai dasar klaimnya, apalagi Pulau Sipadan dan Ligitan bukanlah wilayah yang ditemukan pertama kali oleh Indonesia. Oleh karena itu, pembelajaran penting yang harus diambil dari putusan terhadap Pulau Sipadan-Ligitan adalah pentingnya penerapan sistem kawasan konservasi bagi wilayah terluar Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Membangun Kawasan Konservasi Perairan

Malaysia menggunakan pendekatan penguasaan efektif seperti pembangunan perlindungan satwa burung, pemungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu, pengoperasian mercusuar, untuk memanfaatkan kawasan Sipadan-Ligitan. Maka, dari sekarang Indonesia harus memiliki strategi khusus guna mempertahankan kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan Indonesia adalah dengan menerapkan dan mengembangkan sistem kon-



servasi pada pulau-pulau kecil terluar khususnya di wilayah perbatasan. Hal ini sangat memungkinkan untuk dilakukan, mengingat potensi pulau kecil yang ada sangat besar, seperti terumbu karang dan satwa yang dilindungi.

Penerapan sistem konservasi sebagai senjata untuk mempertahankan pulau-pulau kecil terluar memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem militer (*show of force*) dan ekonomi yang selama ini digunakan. Berikut ini perbandingan beberapa pendekatan penegakan kedaulatan NKRI di pulau-pulau kecil terluar:

	Militer	Ekonomi	Ekologi
Biaya	Tinggi	Tinggi	Rendah
Keterlibatan	Pemerintah (tentara)	Pengusaha, pemerintah	Masyarakat, pemerintah, pengusaha
Keberlanjutan	Sesaat/terbatas	Untung/rugi	Sustainable

Sistem militer (*show of force*) merupakan sistem yang selama ini dipercaya untuk menjaga pulau-pulau kecil terluar. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini membutuhkan anggaran yang tinggi karena banyak dan mahalnya alat utama sistem senjata (alutsista) yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, penegakan kedaulatan dengan sistem ini belum dapat terlaksana dengan baik karena keterbatasan anggaran. Atas dasar itu, sejumlah kalangan berpandangan kalau pertahanan laut Indonesia masih terbilang lemah. Kebanyakan dari pengamat pertahanan di tanah air itu selalu mengeluhkan kekurangan yang ada dan terus menyuarakan agar semua perlengkapan untuk pertahanan laut dipenuhi (Paonangan, 2010).



Selain itu, sistem militer ini sangat eksklusif, hanya melibatkan tentara dan pemerintah. Masyarakat hampir tidak dilibatkan sama sekali dalam operasionalnya, sehingga rasa kepemilikan masyarakat akan pulau yang dijaga sangat rendah. Dari segi keberlanjutan, sistem ini sangat terbatas, karena sangat bergantung kepada anggaran yang ada.

Sistem ekonomi dalam menjaga pulau kecil terluar dilakukan beberapa negara, dengan cara mendirikan *cottage* dan hotel untuk pariwisata. Namun, dari ketiga aspek yang dikaji, sistem ini juga kurang efektif. Dari segi biaya yang tinggi, aspek keterlibatan masyarakat yang kecil karena hanya mengandalkan pengusaha, dan dari aspek keberlanjutan yang sangat bergantung kepada untung atau rugi.

Sistem konservasi merupakan sistem yang paling efektif dibandingkan sistem lainnya. Dari segi biaya, sistem ini termasuk sistem yang murah, karena langsung memanfaatkan sumber daya yang ada di pulau tersebut. Bahkan sistem ini juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, yang karena lokasinya yang terpencil dan jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Karena melibatkan masyarakat secara langsung, secara otomatis keberlanjutan sistem ini sangat terjamin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 17/2008, kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkat-



kan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Sedangkan pulau terluar adalah pulau yang masuk ke dalam kedaulatan NKRI secara hukum meskipun berbatasan dengan wilayah asing. Konservasi dan pulau kecil terluar merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terkait dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Wilayah konservasi ini bukan hanya untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, tetapi juga memiliki banyak fungsi dan manfaat, salah satunya yaitu memberikan devisa bagi negara dengan menjadikannya lokasi rekreasi dan wisata. Era otonomi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola kawasan konservasi di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait pengaturan pengelolaan wilayah laut dan konservasi. Lebih lanjut, keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi diatur secara rinci oleh Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan. Konservasi yang dibangun dapat berupa konservasi tumbuhan, satwa liar, konservasi hewan langka hingga konservasi perairan.

Lembaga konservasi dapat dibangun dengan memberikan permohonan izin kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal, Bupati/Walikota setempat dan Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam setempat.



Permohonan Izin dilengkapi dengan lampiran dokumen yang terdiri dari Rekomendasi Bupati/Walikota setempat, Rekomendasi Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam setempat, Usulan Proyek/Proyek Proposal, Berita Acara Persiapan Teknis dari Balai KSDA setempat, Hasil Studi Lingkungan, Surat Izin Tempat Usaha, NPWP, Akta Pendirian Badan Usaha, dan Identitas pemohon.

Diperlukan lembaga konservasi yang bertujuan khusus untuk bergerak di bidang konservasi tumbuhan maupun hewan baik berbentuk lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan. Lembaga konservasi tersebut mempunyai fungsi utama, yaitu untuk pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Lembaga juga dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, sarana perlindungan dan pelestarian jenis, sarana rekreasi yang sehat, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Lembaga konservasi satwa dapat berbentuk Kebun Binatang, Taman Safari, Taman Satwa, Taman Satwa Khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus, Pusat Penyelamatan Satwa, Pusat Rehabilitasi Satwa, hingga Museum Zoologi. Dengan penerapan konsep konservasi terhadap pulau terluar, Indonesia sudah menjalankan penguasaan efektifnya. Hingga apabila suatu saat terjadi permasalahan yang identik seperti kasus Sipadan-Ligitan dapat dipastikan secara yuridiksi dan penguasaan Indonesia dapat memenangkannya.

Dasar Hukum Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Merancang konsep pengelolaan wilayah pulau luar terkecil sebagai wilayah perbatasan dilakukan secara ter-



padu, baik fisik maupun nonfisik (SDM), sesuai potensi sumber daya yang ada. Dalam konsep pengembangan wilayah perbatasan terpadu ini termasuk melibatkan sektor keamanan dan pertahanan. Dalam hal ini, posisi penduduk sebagai subek pembangunan yang aktif. Setiap pembangunan dari masing-masing sektor (Ipoleksosbud Hankam) harus dirancang untuk saling memberi manfaat.

Khusus dalam pengelolaan pulau kecil terluar, pemerintah telah menerbitkan Perpres 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Tujuan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar berdasarkan Perpres ini selain untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa, serta menciptakan stabilitas kawasan, melalui pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan serta memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Bidang-bidang yang dikelola dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar antara lain: (1) sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) infrastruktur dan perhubungan; (3) pembinaan wilayah; (4) pertahanan dan keamanan; (5) ekonomi, sosial, dan budaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan menyebutkan secara jelas bahwa konservasi sumber daya ikan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 3). Artinya, kegiatan konservasi dilakukan secara bersama-sama seluruh pihak, dari tingkat lokal hingga nasional. Dengan demikian, pengembangan kawasan konservasi perairan di pulau-pulau kecil, khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga, maka seyogianya haruslah menjadi perhatian



pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengikutsertakan masyarakat lokal, termasuk di dalamnya adalah tokoh masyarakat/adat, LSM, dan pegiat lingkungan lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 pasal 2 mengenai pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar, disebutkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menekankan bahwa diwajibkannya melakukan pengelolaan terhadap pulau kecil terluar tempat seluruh elemen baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ikut serta demi sebuah kedaulatan bangsa.

Selanjutnya, mengacu pada pasal 6 PP Nomor 62 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar yang dilakukan demi penegakan pertahanan dan keamanan adalah untuk akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara di laut, penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain, penempatan aparat TNI dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia, penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara, penempatan sarana bantu navigasi pelayaran hingga pengembangan potensi maritim lainnya. Penekanan besar pada pemanfaatan pulau kecil terluar memiliki fungsi antara lain untuk proses penyelesaian batas wilayah negara di laut.

Pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar yang berada pada pasal 7 PP Nomor 62 Tahun 2010 dapat berupa bentuk usaha kelautan dan perikanan, ekowisata bahari, pendidikan dan penelitian, pertanian subsisten, penempatan sarana dan prasarana sosial ekonomi hingga industri jasa maritim. Kawasan konservasi pada pasal 9 PP Nomor 62 Tahun 2010



yang merupakan pemanfaatan pulau kecil terluar pada bidang pelestarian lingkungan terdiri atas kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi maritim, kawasan konservasi perairan dan sempadan pantai. Dengan terdapatnya pasal khusus mengenai pentingnya konservasi untuk mempertahankan kedaulatan ini, maka diperlukan gerakan bersama yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga masyarakat untuk mengembangkannya.

Kesimpulan

Konservasi dan pulau-pulau kecil terluar merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pemerintah memiliki kewajiban mendasar terhadap kedua hal tersebut untuk dikelola dengan baik. Kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang dimenangi oleh Malaysia atas dasar penguasaan efektif melalui konservasi penyu dan burung adalah contoh pentingnya peran konservasi dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Belajar dari hal tersebut, Indonesia dapat menerapkan sistem konservasi sebagai sarana untuk menjaga pulau-pulau kecil terluar.

Penerapan dan pengembangan sistem konservasi sangat efektif dan memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan sistem militer dan ekonomi yang digunakan untuk menjaga kedaulatan bangsa. Ditinjau dari segi biaya yang murah, keterlibatan masyarakat yang tinggi, dan *sustainable*.

Pengembangan kawasan konservasi perairan perlu mendapat dukungan dari semua pihak, mulai pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengikutsertakan masyarakat lokal, termasuk di dalamnya adalah tokoh masyarakat/adat,



LSM, dan pegiat lingkungan lainnya. Pengembangan model konservasi berbasis masyarakat dapat dijadikan metode untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Daftar Pustaka

- Abubakar, M. 2006. *Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan*. Jakarta: Kompas.
- Cicin-Sain B, Knecht RW. 1993. *Ocean and Coastal Management. Special Issue Integrated Coastal Management*. Vol 21. Delaware: Elsevier Applied Science.
- DEKIN. 2009. *Kebijakan Kelautan Indonesia*.
- Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). 2005. *Profil Pulau-pulau Kecil Terluar di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). 2008. *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Kay R and Alder J. 1999. *Coastal Planning and Management*. London: E & FN Spon, an imprint of Routledge.
- Paongan Y. 2010. "Babak Baru Pertahanan Laut." <http://indomaritimeinstitute.org/?p=474> [5 mei 2010].
- Suryadi, K, 2003. *Sistem Pendukung Keputusan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



PEMANFAATAN MIKROALGA SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF

Abdul Basir

DI DALAM Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006, pemerintah menyebutkan bahwa kebijakan energi nasional dilakukan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri.

Kebijakan yang diambil pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan utama dan kebijakan pendukung. Kebijakan utama meliputi penyediaan energi (jaminan ketersediaan pasokan energi dalam negeri, optimalisasi produksi energi, konservasi energi), pemanfaatan energi (efisiensi dan diversifikasi energi), penetapan kebijakan harga energi, serta pelestarian lingkungan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun kebijakan pendukung meliputi pengembangan infrastruktur, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan penelitian.

Kebutuhan energi memang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Kenyataan yang terjadi sekarang, berbagai sarana penunjang aktivitas manusia menghabiskan cukup banyak energi. Kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, pembangkit listrik serta berbagai fasilitas yang ada saat ini banyak menggunakan bahan bakar minyak yang cadangannya semakin menipis. Oleh karena itu, perlu dicari-



kan energi alternatif untuk menjamin tetap berjalannya berbagai aktivitas ini.

Dari peraturan yang disebutkan di atas bisa kita lihat bahwasanya pemerintah berusaha untuk menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Riset yang dilakukan sebagai upaya menemukan bahan bakar alternatif akan lebih aplikatif melalui program pemberdayaan masyarakat dan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak swasta.

Bahan Bakar Alternatif

Dalam Perpres Nomor 5 tahun 2006 disebutkan bahwa energi alternatif adalah energi yang diperoleh dari sumber tertentu pengganti bahan bakar minyak. Saat ini, berbagai riset telah menemukan bahan bakar terbarukan sebagai bahan bakar alternatif. Bahan bakar terbarukan yang dimaksud adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Energi alternatif yang saat ini marak dikembangkan berasal dari makhluk hidup sehingga sering disebut dengan *bioenergi*. Istilah bioetanol, biogas, biosolar mungkin sudah akrab di telinga kita. Inilah potensi yang dimiliki bangsa Indonesia.

Masyarakat mulai dari kalangan ekonomi menengah ke bawah sampai dengan kalangan pengusaha dapat memanfaatkan bioenergi untuk keperluannya sehari-hari. Biogas dapat digunakan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan produksi skala rumah tangga. Sedangkan untuk kalangan pengusaha di bidang industri, bioenergi dapat diper-



oleh dari bioetanol atau biodiesel yang diproduksi dengan skala massal.

Di sini peran mahasiswa sebagai kaum intelektual muda dituntut untuk tidak berhenti sampai tahap riset laboratorium saja. Akan tetapi, mereka juga ditantang untuk mampu mengaplikasikan ide besar menghasilkan bahan bakar alternatif sampai dengan tahap aplikasinya di lapangan. Sehingga, kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat bangsa Indonesia.

Mikroalga

Mikroalga adalah alga berukuran mikro yang biasa dijumpai di air tawar maupun air laut. Mikroalga merupakan spesies uniseluler yang dapat hidup soliter maupun berkoloni. Berdasarkan spesiesnya, ada berbagai macam bentuk dan ukuran. Mikroalga merupakan mikroorganisme fotosintetik yang memiliki kemampuan untuk menggunakan sinar matahari dan karbondioksida untuk menghasilkan biomassa serta menghasilkan sekitar 50% oksigen yang ada di atmosfer.

Beberapa spesies mikroalga yang potensial sebagai penghasil bioethanol dan biodiesel adalah *Prymnesium parvum*, *Chlorococum* sp, *Tetraselmis suecia*, *Anthrospira* sp, *Porphirydium* sp, *Chlorella* sp, dan lain sebagainya.

Penggunaan mikroalga sebagai bahan baku biofuel mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan tanaman pangan, di antaranya pertumbuhan yang cepat, produktivitas tinggi, dapat menggunakan air tawar maupun air laut, tidak berkompetisi dengan bahan pangan, konsumsi



air dalam jumlah sedikit serta menggunakan biaya produksi yang relatif rendah (Guerrero dalam Luthfi *et al.*, 2010).

Mikroalga memiliki kandungan karbohidrat dan lemak yang tinggi. Oleh karena itu, sangat potensial sebagai penghasil bioetanol dan biodiesel. Bioetanol dihasilkan melalui proses fermentasi karbohidrat hingga dihasilkan etanol. Sedangkan biodiesel dihasilkan melalui ekstraksi minyak dari mikroalga.

Peluang

Mikroalga memiliki potensi yang sangat besar sebagai penghasil bioenergi. Budi dayanya sangat mudah sehingga dapat dilakukan oleh siapa pun. Tinggal diperlukan keselarasan pemanfaatan mikroalga pada proses produksi bioetanol dan biodiesel. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *overlap* antara mikroalga untuk biodiesel dan bioetanol, serta menghasilkan suatu produk industri yang dihasilkan melalui sistem produksi bersih (*zero waste*).

Mahasiswa bisa memegang peranan penting untuk melakukan terobosan riset lebih jauh untuk menghasilkan bioenergi dari mikroalga yang lebih berkualitas. Berkualitas baik dalam metode ekstraksi maupun teknik pemilihan dan budi daya spesies mikroalga yang potensial. Semoga bangsa kita menjadi bangsa yang tidak merasakan dampak krisis energi dengan adanya energi alternatif terbarukan dari mikroalga.[]



MENCINTAI ALAM, MENCINTAI INDONESIA

Muhammad Al-Mujabudda'wat

ISTILAH 'pencinta alam' mungkin sama sekali tidak asing di telinga komunitas penggiat aktivitas *outdoor*. Saat ini istilah pencinta alam banyak digunakan oleh organisasi-organisasi penggiat alam bebas yang berdiri di tingkat akademisi maupun umum. Hampir di seluruh sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia memiliki organisasi maupun komunitas penggiat alam bebas. Istilah 'Sispala' (Siswa Pencinta Alam) untuk tingkat sekolah, dan 'Mapala' (Mahasiswa Pencinta Alam) untuk tingkat perguruan tinggi, sering digunakan sebagai penyebutan umum. 'Pencinta' dan 'alam' telah menjadi kosakata dwitunggal yang bahkan tercantum sebagai kosakata baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saat ini. Kosakata pencinta alam menjadi suatu istilah populer yang bahkan menjadi istilah *life style* bagi kalangan yang menggemari petualangan di alam bebas.

Istilah 'pencinta alam' pertama kali dikemukakan oleh Soe Hok Gie, seorang aktivis dan intelektual muda di tahun 1960-an. Gie, panggilan akrabnya, adalah seorang mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Ilmu Sejarah yang pada masa hidupnya sering kali menjadi motor penggerak terdepan dalam aksi-aksi demonstrasi mahasiswa. Ia juga dikenal banyak



menuangkan ide-ide dan kritik dalam tulisan. Tulisan-tulisan Gie hingga kini masih menjadi *role model* bagi kalangan pemuda, terutama bagi kalangan pencinta alam. Salah satu pemikiran Gie yang terkenal adalah “Patriotisme yang sehat tidak akan timbul dari slogan-slogan, indoktrinasi-indoktrinasi ataupun poster-poster. Patriotisme yang sehat dan cinta tanah air dapat tercapai dengan mengenal alam dan rakyat dari dekat.”

Berawal dari pemikiran itulah pada 1964, Gie menggagas berdirinya perkumpulan mahasiswa-mahasiswa yang gemar berpetualang dan mendaki gunung dalam wadah bernama Ikatan Mahasiswa Pencinta Alam (IMPALA), yang kemudian berganti nama menjadi Mapala Prajnaparamita dan pada 1970 berubah lagi menjadi Mapala UI.

Berdirinya IMPALA pada 1964 mendorong kemunculan berbagai organisasi dan komunitas serupa dengan mengutip nama ‘pencinta alam.’ Beberapa organisasi tidak menggunakan nama ‘pencinta alam’, antara lain Wanadri di Bandung dan Young Pioneers (YePe) di Malang, tetapi sama-sama bergiat di alam bebas. Sesuai dengan namanya, pencinta alam berarti mencintai alam dengan cara memelihara dan mengaguminya dengan berbagai jalan. Dalam filosofi Gie, mencintai alam berarti menjelajah kebesaran alam di Indonesia untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air dengan jalan mendaki gunung yang pada masa itu tidaklah populer. Apalagi mencintai alam dengan jalan mendaki gunung adalah konsep pencinta alam ortodoks.

Seiring berjalannya waktu, Mapala UI berkembang tidak hanya mendaki gunung. Ini didasari karena nama pencinta



alam yang memiliki konteks luas. Alam tidak sebatas gunung dan hutan, akan tetapi juga meliputi segala sesuatu dan tempat di Bumi ini. Dengan demikian, ruang lingkup pencinta alam pun menjadi luas sehingga organisasi pencinta alam memiliki banyak cara untuk mencintai alam. Saat bersamaan, Mapala UI memilih untuk terbuka pada suatu ide dan hal-hal baru. Bidang-bidang kegiatan *outdoor* yang berawal dari dunia Barat dijadikan sebagai bagian dari kegiatan yang tidak ‘melulu’ mendaki gunung namun juga menjadi jalan untuk mencintai alam.

Selain kegiatan di alam terbuka yang mengandalkan serba kemampuan dan keterampilan fisik, nilai-nilai khas Mapala itu hadir dalam kegiatan yang sedikit ‘pinggiran’ tapi penting, yakni pengabdian masyarakat dan lingkungan. Disebut penting karena dua kegiatan tersebut sesungguhnya menyatu dengan kehidupan kemahasiswaan, bahkan tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Pengabdian masyarakat di Mapala meliputi bakti sosial, penanggulangan bencana alam, dan SAR (*Search and Rescue*), sementara dalam ranah lingkungan biasanya bergerak di bidang pelestarian alam dan penelitian.

Sesungguhnya latar belakang yang menjiwai adalah mengenai posisi mahasiswa cinta alam dan pentingnya mendekatkan kemampuan akademis masing-masing anggota dengan keadaan sekitar. Mengikuti ucapan legendaris Gie di atas, “Cinta tanah air dalam arti sesungguhnya hanya bisa dilakukan jika kita melakukan kegiatan di alam dan dekat dengan masyarakat.” Senior Gie di Mapala, Ayatrohaedi, menulis lebih dalam lagi, “Alam tidak dapat ditaklukkan, tapi manusia



harus bisa menaklukkan dirinya sendiri.” Teman Gie di Mapala, Arianto Toegiyo, lugas menjelaskan, “Salah besar kalau menganggap Mapala UI hanya naik gunung saja.”

Rangkaian kegiatan ‘prestasi yang bukan naik gunung’ yang pernah dilakukan Mapala UI ternyata sangat banyak dan beragam. Kegiatan ekspedisi atau perjalanan pada kurun 1970 hingga 1980-an umumnya ada kegiatan bakti sosialnya. Dasarnya juga bukan gagah-gagahan atau sekadar mengikuti tren, tapi seperti penjelasan singkat Syahfiri Gaffar, “Kepedulian terhadap lingkungan fisik dan sosial itu memang sudah melekat di Mapala UI.” Ketika masih bernama Mapala Prajnaparamita, bentuk pengabdian masyarakat banyak dipengaruhi oleh konsep ‘dekat dengan masyarakat’ ala Gie. Wujudnya, interaksi langsung dengan penduduk sekitar, bahkan sampai tidur dan makan bersama.

Mengamalkan Ilmu

Kepedulian sosial mulai digarap serius pada ekspedisi Irian Jaya tahun 1972. Dari 14 anggota yang berangkat, setengahnya adalah tim pendukung yang mengurus mulai dari administrasi, pembagian dan peraturan logistik. Ketika tim pendaki berupaya keras mendaki di Pegunungan Sudirman, para pendukung yang terdiri atas mahasiswa Antropologi, Psikologi, dan Kedokteran Gigi itu bekerja mendata kondisi sosial masyarakat setempat, terutama di wilayah Ilaga, Dama, dan Beoga.

Pertengahan 1970-an ditandai pula dengan berkembangnya kegiatan peduli lingkungan di Mapala UI, karena didukung penuh oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia



(LIPI). Pola kerja sama ini saling menguntungkan. LIPI butuh tenaga lapangan, sedangkan Mapala butuh dukungan program yang berskala nasional. Posisi LIPI yang independen, bukan partisan partai langsung *tune in* dengan anggota Mapala.

Pada 1976, Mapala UI mengadakan penyuluhan kesehatan kepada penduduk Ilaga bersamaan dengan ekspedisi penguatan Puncak Soemantri di Pegunungan Sudirman. Pada tahun yang sama, Mapala kembali ke Papua untuk membantu tanggap bencana gempa yang terjadi di Kecamatan Kurima, Jayawijaya. Pada tahun yang sama penelitian Mapala melibatkan banyak anggota dalam survei antropologi dan arkeologi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, bekerja sama dengan Biro Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia.

Pada 1978, masih bersama LIPI, Mapala UI menggelar Diklat Lapangan Pelestarian Lingkungan Hidup yang diselenggarakan pada 1978 di Gunung Gede-Pangrango. Latihan penelitian bagi pencinta alam ini dilanjutkan pada 1979 di gunung Slamet (Jawa Tengah), dan pada 1980 di Kalimantan Selatan.

Pada ekspedisi Irian 1981, dirancang tidak hanya pendakian gunung saja. Ekspedisi ini tergolong kolosal karena banyaknya target yang ingin dicapai: *'direct'* dinding selatan Carstensz, mencari reruntuhan pesawat C-47 Dakota milik Belanda yang jatuh pada 1962, pengamatan sosial, pengobatan massal, juga pengukuran penyusutan lapisan salju di Pegunungan Sudirman. Pada ekspedisi Irian 1993 Mapala UI melakukan penelitian perubahan tekanan darah di kawasan tinggi.



Pada era 1980 dan 1990-an kegiatan pelestarian Mapala UI makin eksis setelah diresmikannya Divisi Lingkungan di Mapala UI pada 1985. Kegiatan bakti sosial dan lingkungan yang berskala besar dilakukan di Taman Nasional Ujung Kulon, Pulau Untung Jawa, dan kegiatan Ciliwung bersih. Pada era 1990-an hingga sekarang, kegiatan bakti sosial lebih banyak dilakukan bersamaan dengan kegiatan perjalanan panjang calon anggota Mapala UI, seperti perjalanan panjang ke Taman Nasional Bukit Barisan Jambi (1994), Sindoro Sumbing dan Argopuro (1996), Gunung Dempo (1998), Cibarenok sampai Pelabuhan Ratu (2001), Kawah Ijen (2004), Taman Nasional Meru Betiri (2008), dan Taman Nasional Kerinci Seblat (2012).

Selain isu pelestarian lingkungan hidup, Mapala UI sering pula menerima 'order' mencari orang hilang di gunung, terutama di sekitar Gunung Gede-Pangrango dan Gunung Salak. Untuk melatih kemampuan melaksanakan operasi SAR, termasuk mengevakuasi korban, Mapala sering mengadakan latihan gabungan dengan berbagai organisasi, di antaranya ORARI dan Basarnas.

Sama halnya dengan operasi SAR, kegiatan tanggap bencana telah dilakukan Mapala UI sejak 1970-an. Secara khusus dan terencana, Mapala UI membantu evakuasi penduduk dan membantu di kamp pengungsian, termasuk mengobati korban luka serta membantu di dapur umum pada bencana letusan Galunggung (1982). Begitu pula ketika banjir Jakarta pada 1996 dan 2002 melanda, dengan perahu karet, anggota Mapala sigap mengevakuasi penduduk yang rumahnya tergenang. Pada 2004, Mapala UI bersama UNICEF dan lemba-



ga-lembaga asing lainnya bekerja sama dalam Posko Aceh selama 2 tahun. Mapala UI menjadi organisasi yang menyajikan data lapangan dan peta tematik serta data GIS (*geographic information system*) yang digunakan oleh berbagai organisasi-organisasi bantuan dari berbagai negara. []



MENGELOLA SUNGAI JAKARTA

Nestiyanto Hadi

DAERAH Khusus Ibukota (DKI) Jakarta terletak di bagian barat laut Pulau Jawa dengan luas wilayah sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²) dan jumlah penduduk sebanyak 9.588.198 jiwa pada tahun 2010. Letak wilayah Jakarta berada di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter di atas permukaan laut (dpl). Terkait cuaca, Jakarta beriklim tropis dengan suhu udara yang panas dan kering. Suhu rata-rata tahunan berkisar antara 25°-38°C (77°-100°F) dengan mengalami puncak musim penghujan pada bulan Januari dan Februari dengan rata-rata curah hujan 350 milimeter dan suhu rata-rata 27 C.

Kota Jakarta dilintasi oleh 13 daerah aliran sungai besar dan beberapa sungai kecil. Sungai-sungai yang melalui Jakarta, antara lain Sungai Aluran, Kali Cantiga, Kali Gebjuran, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Malang, Sungai Moa, Kali Pesanggrahan, Sungai Tengah, Kali Semanan, Kali Angke, Kali Ciliwung, dan Kali Cipinang. Sungai-sungai tersebut mempunyai peruntukan yang berbeda-beda sesuai kualitas baku mutu air (Diana 2005: 14).

Pencemaran Sungai

Dalam memanfaatkan sumber daya alam sungai, kita dituntut untuk memenuhi tiga aspek secara terintegrasi meli-



puti aspek sosial budaya, aspek ekonomi, dan aspek kelestarian lingkungan.

Dalam aspek ekonomi, air yang melintasi sungai bila memenuhi syarat kebersihan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan baku air minum dan sejumlah keperluan lainnya, termasuk sarana transportasi perkotaan. Dalam aspek kelestarian lingkungan, sungai memiliki fungsi untuk mengalirkan air dari hulu hingga hilir (muara). Hal tersebut menunjukkan sungai berperan sebagai unsur dalam berlangsungnya siklus hidrologi dan sebagai unsur pada kelangsungan siklus erosi. Keduanya sangat mempengaruhi kesetimbangan ekosistem daerah aliran (DAS) sungai.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai memang sudah begitu jelas menjelaskan pengelolaan sungai yang baik. Namun, implementasi di lapangan tetaplah mengalami kesulitan. Hal tersebut dapat kita lihat dari terjadinya pencemaran berat pada DAS sungai. Dari pencemaran tersebut, sekitar 80% disebabkan oleh limbah domestik yang masuk ke sungai. Limbah domestik yang dibuang ke sungai berupa sampah, air deterjen sisa cucian, dan zat-zat organik atau anorganik sisa industri. Wajar saja jika tingkat pencemaran 13 sungai di Jakarta sudah melewati tingkat pencemaran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perilaku di atas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang memandang bahwa sungai merupakan tempat pembuangan sampah yang efektif. Sungai dianggap tempat pembuangan sampah berjalan yang siap menampung sampah dan mengalirkannya jauh ke muara. Masyarakat pun beranggapan bahwa dengan caranya itu permasalahan



penumpukan sampah dapat terselesaikan. Bahkan, tak sedikit warga yang membangun kamar mandi di sungai.

Memang sungguh ironi tingkah laku masyarakat kita, mereka sudah tidak lagi memandang sungai sebagai sumber daya alam yang mampu menunjang kehidupan baik manusia maupun makhluk hidup lain. Mereka juga tidak menyadari bahwa tingkah laku tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Seperti disimpulkan oleh banyak ahli, yang bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di wilayah Jakarta adalah adanya pendangkalan daerah aliran sungai karena terjadinya penumpukan sampah, sedimentasi materi organik maupun anorganik. Akibatnya, sungai tidak mampu lagi mengalirkan air yang melewatinya dan meluap atau banjir ke daerah sekitarnya.

Penyebab lain terjadinya banjir di Jakarta adalah karena adanya pembangunan yang tak terkendali di wilayah hilir, perencanaan tata kota yang tidak sesuai konsep pembangunan berkelanjutan, serta penurunan tanah akibat eksploitasi air oleh industri. Menurunnya resistensi DAS terhadap banjir akibat perubahan tata guna lahan dan pembabatan hutan secara liar (*illegal logging*).

Dari sekian banyak penyebab banjir yang terjadi di Jakarta, tulisan ini akan berfokus pada pencemaran limbah domestik (sampah).

Akuakultur dan Banjir

Alasan utama masyarakat membuang sampah ke sungai adalah karena masyarakat tidak bisa merasakan manfaat



keberadaan sungai bagi kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan pola pikir masyarakat Jakarta yang serba instan, sehingga masyarakat tidak memikirkan akibat jangka panjang dari efek membuang sampah ke sungai.

Melihat fenomena tersebut, banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengurangi bahkan menghentikan pembuangan sampah ke sungai. Di antaranya menggelar aksi pembersihan sampah di sepanjang sungai. Untuk mencegah sampah kembali dibuang di lokasi yang sama, pemerintah Jakarta menggandeng Satpol PP untuk melakukan penegakan hukumnya. Dasar hukum yang diterapkan adalah UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Nomor 1 Tahun 2001 tentang Larangan Pembuangan Sampah.

Namun apalah daya, masyarakat masih tetap membuang sampah ke sungai. Karena memang aksi tersebut tidak banyak memberikan manfaat atau keuntungan bagi masyarakat. Aksi tersebut terkesan hanya seremoni atau rutinitas berkala. Tanpa adanya sistem pengaturan yang memberdayakan potensi sungai maupun masyarakat sekitar.

Adapun solusi alternatif yang bisa diterapkan adalah dengan membuat kebijakan pengelolaan DAS berbasis ke-masyarakatan dengan teknik akuakultur. Teknik akuakultur ini sudah banyak dilakukan di negara maju dan sudah menunjukkan hasil yang memuaskan untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Secara terminologi, akuakultur adalah kegiatan budi daya di lingkungan yang terkontrol untuk mendapatkan keuntungan. Teknik akuakultur dapat dilakukan di daerah



hulu, tengah, hingga hilir dari sebuah sungai. Di daerah hulu sungai, teknik akuakultur dapat dilakukan dengan *chinampa*. Teknik akuakultur pada daerah tengah sungai umumnya menggunakan metode akuaponik. Sedangkan pada bagian hilir sungai, teknik akuakultur yang digunakan adalah metode tambak. Pengelolaan semua teknik ini bersifat terpadu dan terintegrasi.

Penerapan teknik akuakultur yang bisa dilakukan di sungai-sungai yang melalui Jakarta adalah dengan menggunakan metode akuaponik dan tambak. Hal tersebut dikarenakan sungai yang melintasi Jakarta merupakan bagian tengah dan hilir dari sungai.

Metode akuaponik menjadi metode yang paling optimal untuk meningkatkan potensi daerah aliran sungai dan memberdayakan masyarakat sekitar. Metode akuaponik merupakan sebuah alternatif yang memadukan antara menanam tanaman dan memelihara ikan dalam satu wadah. Proses tersebut menggambarkan proses timbal balik yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara tanaman dan ikan. Simbiosis mutualisme tersebut ditunjukkan dengan pemanfaatan unsur hara dari kotoran ikan oleh tanaman, yang apabila dibiarkan di dalam kolam akan menjadi racun bagi ikan. Lalu tanaman akan berfungsi sebagai filter vegetasi yang akan mengurai zat racun tersebut menjadi zat yang tidak berbahaya bagi ikan, dan suplai oksigen pada air yang digunakan untuk memelihara ikan.

Di sepanjang DAS di Jakarta, metode akuaponik dapat diterapkan. Akuaponik dapat dibuat di sepanjang daerah pinggir badan sungai karena akuaponik tidak membutuhkan



ruang yang luas. Penempatan akuaponik tersebut bisa berdasarkan rentang jarak ataupun berdasarkan kondisi lahan (restorasi lahan kritis). Oleh karena itu, penggunaan lahan bantaran sungai yang semula untuk permukiman kumuh kini harus diubah menjadi lahan potensial pertanian dan peternakan dengan metode akuaponik. Sebagai ganti rugi untuk masyarakat bantaran sungai yang dipindahkan, mereka diberdayakan untuk mengelola akuaponik di lahan tersebut. Sehingga, bisa saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat. Inilah hasil pemanfaatan sungai dari segi sosial-budaya dan ekonomi yang jelas akan diperoleh pemerintah.

Pemanfaatan sungai dari aspek kelestarian lingkungan juga dapat diperoleh pemerintah dengan menerapkan metode akuaponik. Hal tersebut dapat lihat dari penjelasan konsep metode akuaponik di atas. Selain itu, penggunaan air yang berasal dari badan sungai untuk akuaponik juga dapat kita kaitkan dengan hubungannya dalam hal pencegah banjir.

Air yang diperoleh dari badan sungai dapat dibersihkan melalui metode akuaponik. Air yang diperoleh dari badan sungai disaring dengan penyaring fisik secara sederhana, yaitu dengan sabut kelapa, batu kerikil, dan pasir. Selanjutnya, air yang telah disaring melalui penyaring fisik dimasukkan ke dalam pot-pot tanaman yang berada pada akuaponik. Tanaman yang dipilih adalah jenis-jenis yang dapat menyerap zat-zat beracun dari perairan. Di antaranya adalah jenis *Pistia* sp, *Echinodorus* sp, atau *Eichhornia crassipes*. Berdasarkan penelitian Widiyanto dan Susilo (1997), *Eichhornia crassipes* (eceng gondok) dalam waktu 24 jam mampu menyerap logam kadmium (Cd), merkuri (Hg), dan nikel (Ni).



Dengan cara tersebut, air yang akan digunakan untuk medium ikan pada akuaponik dapat terbebas dari zat beracun. Dengan semakin banyaknya pengelolaan akuaponik, maka akan semakin banyak juga sumber daya air bersih yang dibutuhkan. Oleh karena itu, masyarakat akan berlomba-lomba untuk menjaga kebersihan sungai tersebut. Bahkan masyarakat akan merasa kesal jika sungai tersebut mengalami pencemaran, karena akan menurunkan hasil pertanian dan peternakan akuaponik mereka. Dengan bersihnya DAS dari limbah pencemar, maka fungsi sungai dapat berjalan dengan baik. Dan berjalannya fungsi sungai dengan baik, maka terjadinya banjir di wilayah Jakarta dapat dicegah.

Itulah penerapan kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai yang terintegrasi. Pengelolaan sumber daya alam sungai yang memenuhi aspek sosial-budaya, aspek ekonomi, dan aspek kelestarian lingkungan. Pengelolaan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat secara harmonis dan berkelanjutan. Dengan begitulah, proses pengelolaan daerah aliran sungai dapat berlangsung terus-menerus sehingga dapat mencegah banjir Jakarta secara permanen.[]





**Memetik
Inspirasi Hidup**

MENGHORMATI PAHLAWAN

Nur Saudah Al Arifa D.

SESUNGGUHNYA pahlawan negara ini telah menunjukkan kehebatan dan kepahlawanan mereka sejak zaman dahulu. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya merupakan peristiwa penting karena mempertemukan rakyat Indonesia dan tentara Sekutu (yang diboncengi Belanda) dalam medan pertempuran.

Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Untuk mengenang peristiwa bersejarah itu, setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingatinya sebagai Hari Pahlawan.

Hari pahlawan bagi rakyat Indonesia adalah saat mengenang (kembali) jasa dan pengorbanan para pejuang kemerdekaan kita dari rongrongan musuh. Berkaca pada sejarah hidup orang-orang besar dan pahlawan, sudah semestinya kepahlawanan mereka itu menginspirasi kita untuk menjadi orang yang tangguh dan sukses dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Menolong atau melakukan sesuatu untuk orang lain, berkorban dalam melakukan suatu kebaikan merupakan salah satu sikap kepahlawanan.



Para pahlawan umumnya banyak mengorbankan sebagian besar hidupnya semata-mata untuk keselamatan negara. Sudah sewajarnya semua pengorbanan mereka itu membuat kita berintrospeksi bahwa di balik kedamaian dan keamanan negara yang kita rasakan ini terdapat segolongan orang-orang yang rela berkorban walaupun diri mereka dan keluarganya pernah menderita. Pengorbanan mereka yang sedemikian besar itu sudah selayaknya mendapat perhatian dan apresiasi yang tinggi dari semua lapisan masyarakat.

Kita memberikan penghormatan yang sedemikian besar kepada mereka (melalui Hari Pahlawan) karena beberapa hal berikut ini:

1. Mengenang jasa bakti mereka yang sangat mulia karena rela dan sanggup mengesampingkan segala kenikmatan hidup demi mempertahankan negara dan menjamin keutuhan agama serta kesejahteraan hidup kita.
2. Untuk menguatkan semangat dan memberi dukungan serta mendorong mereka agar terus berjuang dalam menjalankan tugas.
3. Untuk membuktikan bahwa kita senantiasa bersama mereka, baik dari segi semangat maupun doa dan harapan.

Bung Karno adalah satu di antara sejumlah tokoh-tokoh besar bangsa Indonesia yang paling menonjol (dan paling banyak) dalam mengangkat arti para pahlawan dalam perjuangan pembebasan bangsa. Ini tercermin dalam halaman bukunya *Di Bawah Bendera Revolusi*, dan juga dalam pidato-pidatonya. Bung Karno menjadikan Hari Pahlawan sebagai sarana untuk mengingatkan kepada seluruh bangsa (terutama



angkatan muda) bahwa sudah banyak pejuang-pejuang telah gugur, atau mengorbankan harta benda dan tenaga mereka, untuk mendirikan negara RI. Mereka rela berkorban, supaya kehidupan rakyat banyak bisa menjadi lebih baik daripada yang sudah-sudah. Mereka berjuang dalam tahun-tahun 20-an, dan selama revolusi kemerdekaan 45, untuk menjadikan negara ini milik bersama, guna menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Bukan hanya Angkat Senjata

Perjuangan para pahlawan kita mempertahankan agama, bangsa dan negara adalah satu jihad tersendiri dalam pandangan Islam. Perjuangan suci para pahlawan kita ini juga merupakan warisan perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mereka telah mengorbankan jiwa raga dan harta demi mempertahankan keyakinannya.

Dalam sejarah Islam terdapat para pahlawan yang penuh semangat, kuat dan tangguh. Di antaranya termasuklah Hamzah, Khalid bin Walid, Tariq bin Ziyad, Salahuddin al-Ayubi, dan lain-lain. Sementara dalam sejarah tanah air kita terdapat pula tokoh-tokoh seperti Jenderal Soedirman, Pangeran Diponegoro, Bung Karno, Bung Hatta dan sebagainya yang dianggap sebagai pahlawan bangsa karena menentang penjajahan kolonial di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, seberapa banyakkah pemuda Indonesia yang dapat mewarisi semangat kepahlawanan mereka dan berapa banyak yang rela mengorbankan hartanya demi kepentingan agama, bangsa, dan negara?



Orang yang berjuang secara langsung mengangkat senjata memelihara kesucian agama, membela bangsa dan kedaulatan negara memang lazim dianggap sebagai pahlawan. Namun, kepahlawanan sejatinya merupakan satu semangat juang yang tinggi dalam diri sehingga sanggup mengorbankan nyawa dan harta demi mencapai tujuan suci. Mereka yang mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk membela agama, bangsa, dan negara serta menyumbangkan pikiran berkontribusi bangsa dan negara juga bisa disebut sebagai pahlawan. Ini bermakna bahwa seseorang yang dikatakan bersemangat pahlawan itu tidak hanya dari kalangan militer saja. Oleh karena itu, penting kiranya untuk mendefinisikan ulang semangat kepahlawanan tidak lagi diartikan sebagai perang dan perlawanan senjata.

Mengisi Kemerdekaan

Sekarang ini, negeri kita Indonesia sedang terpuruk citranya di dunia. Negeri terpuruk dengan beragam persoalan bukanlah gagasan yang dicita-citakan oleh ratusan ribu (bahkan mungkin jutaan) para pahlawan kita. Sayangnya, bukannya melawan, makin bertambah barisan panjang dan berliku-liku untuk berbondong-bondong mengorbankan diri, mengikuti arus globalisasi asing yang lebih mementingkan materialistik dalam mengenang jasa pahlawan. Membuatkan patung, misalnya.

Padahal, para pejuang kemerdekaan kita berniat bertempur lantaran sebuah idealisme. Bukan mengejar nama dengan dibuatkan patung dan berstatus sebagai pahlawan. Tidak ada di antara para pejuang kemerdekaan kita yang jauh-jauh hari menyiapkan profil dirinya untuk dipahat sebagai patung.



Lalu bagaimanakah bentuk penghargaan yang dapat dilakukan bangsa Indonesia yang notabene adalah negara berpenduduk Muslim terbesar untuk mereka yang dianggap sebagai pahlawan? Tentu saja kita sebagai bangsa Indonesia harus mengambil nilai-nilai teladan yang baik dari mereka (para pahlawan) dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan diri kita, keluarga kita, lingkungan masyarakat, maupun negara.

Sekali lagi, menghargai pahlawan tidak harus berperang kontak secara fisik (setidaknya untuk saat ini). Namun, mengisi kemerdekaan dengan terus membangun dan mengembangkan sumber daya alam ditopang oleh sumber daya insani yang pintar, tangguh, dan berkemauan tinggi untuk belajar, maka itulah menurut saya sebaik-baik penghargaan kepada para pahlawan.[]



TUKIJO, SANG PELAWAN REZIM MODAL

M. Ridwan Affan

AJARAN semua orang sama di mata hukum mungkin hanya terdengar di ruang kelas tempat kuliah hukum, karena hukum yang sebenarnya tidak akan pernah bisa melahirkan keadilan. Hukum hanya bertaji bagi orang tak mempunya dan jadi alat bagi yang berkuasa.

Penangkapan sewenang-wenang terjadi lagi di negeri ini. Kali ini menimpa seorang petani berusia 46 tahun yang tinggal di Kulon Progo, Yogyakarta. Namanya Tukijo. Suaranya yang lantang menolak proyek pasir besi di Kulon Progo mengantarkannya tertelungkup dalam pengapnya ruang jeruji tahanan di kantor Polda DIY. Peristiwa ini kembali membuktikan bahwa hukum hanya berpihak pada penguasa dan tidak akan bisa adil bagi orang tak mempunya

Nasib petani Tukijo sungguh tragis. Seperti dituliskan oleh M. Syafi'ie dalam <http://pusham.uui.ac.id> ("Penangkapan Petani Tukijo Menciderai Hukum Dan Kemanusiaan"), penangkapan Tukijo pada 1 Mei 2011 terjadi ketika ia sedang bekerja bersama sang istri di ladang yang terletak di Dusun Gupit, Desa Karang Sewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Pada pukul 11.05 WIB, Tukijo bersama sang istri tengah beristirahat dari aktivitas berladang. Sang istri sedang



kembali ke rumah untuk mengambil makan siang pada siang itu. Tiba-tiba sebuah mobil melintas dari arah *pilot project* Pasir Besi menuju ladang Tukijo. Dari dalam mobil keluar tiga orang polisi yang mendatangi Tukijo dan mengatakan bahwa Kasat Intel Polres Kulon Progo yang sedang berada di mobil ingin bertemu dan bertanya kepada Tukijo.

Dengan rasa penasaran, Tukijo berjalan menuju mobil dengan didampingi ke tiga polisi yang menghampirinya. Tanpa banyak basa-basi, tiba-tiba Tukijo dibawa masuk ke dalam mobil dan kemudian melaju dengan kaca mobil yang ditutup rapat. Tukijo tidak mengerti apa salahnya dan apa maksud dirinya diangkut oleh mobil itu. Dalam ketidaktahuannya, setelah di dalam mobil Tukijo bertanya akan dibawa ke mana dirinya. Sang polisi yang membawanya, baru menunjukkan surat penangkapannya saat mobil tersebut telah jauh meninggalkan desanya.

Dalam sidang praperadilan, pihak kepolisian beralasan perihal penangkapan Tukijo yang ganjil itu. Adanya kerumunan massa di sekitar area pertanian tersebut menjadi alasan mengapa polisi bertindak seperti itu. Tentu saja alasan ini tidak logis. Betapa tidak, guna menangkap pelaku teror sekaliber Dr. Azhari polisi bisa gagah berani, sementara untuk menangkap petani miskin macam Tukijo polisi memilih menempuh cara pengecut. Dengan hanya memakai pakaian berladang dan tanpa alas kaki, Tukijo digelandang ke Polda DIY. Istrinya pun bahkan tidak diberi tahu perihal penangkapan tersebut.

Sebenarnya bukan kali ini saja Tukijo berurusan dengan polisi. Pertengahan tahun 2009 Tukijo pernah divonis 6 bulan



dengan masa percobaan 1 tahun karena dituduh melakukan pencemaran nama baik. Tukijo dihukum ketika menuntut transparansi hukum dari objek lahan besi.

Merebaknya kriminalisasi terhadap Tukijo sekeluarga dan intimidasi terhadap para petani penolak proyek pasir besi (tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai atau PPLP) Kulon Progo menjadi petanda bahwa penegakan hukum di Indonesia telah kehilangan orientasi kemanusiaan dan keadilannya. Perjuangan Tukijo dan rekan-rekannya di PPLP bukanlah suara yang kosong, tetapi representasi rakyat yang tertindas dan telah terampas hak-hak dasarnya, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki tanah, hak terbebas dari pengusiran secara paksa, hak untuk berpendapat, dan hak menjadi rakyat yang bermartabat. Sayangnya, hak-hak itu harus terbuang dan tidak berarti di tengah tulinya pemerintah (daerah dan pusat) dan aparat penegak hukum yang telah menanggalkan hati nuraninya.

Kepekaan hati pemerintah dan aparat penegak hukum telah terbeli oleh kuasa kekuatan modal dan investasi yang telah menghalalkan segala cara. Betapa tidak, di balik kriminalisasi terhadap Tukijo dan intimidasi hukum ataupun nonhukum terhadap para petani, tersimpan konspirasi kepentingan penguasa dan pemodal. Proyek pengeboran dan pengelolaan pasir besi telah menghadirkan pemodal PT Jogja Magasa Iron (JMI). Proyek investasi di Kulon Progo ini terbilang sangat besar.

Dalam pernyataannya, Gubernur DIY sendiri menegaskan keinginan kuatnya untuk menjalankan mega proyek pasir besi. Tukijo dan para petani lainnya bagaimanapun, tidak



boleh tidak, harus menerima pelaksanaan mega proyek itu. Apalagi, anak dan kerabat seorang tokoh terkemuka dan disegani di Yogyakarta telah duduk sebagai Komisaris JMI. Seruan Komnas HAM pada tahun 2008 bahwa proyek pasir besi sangat berpotensi melanggar HAM terkait dengan hak atas tanah, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi, hak atas petani, serta fakta pelanggaran HAM atas tutupnya informasi dampak pengeboran pasir besi di Kulon Progo, diabaikan dan sulit untuk diindahkan sampai hari ini. Proyek pasir besi akan terus berlangsung dan tidak menghiraukan suara tangis para korban.

Dalam teori hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Berka-ca dari kasus Tukijo, hukum seolah-olah hanya mementingkan sisi formal-legalistiknya saja, tanpa melihat kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat petani Kulon Progo.

Pengaruh kekuasaan ekonomi terhadap kehidupan manusia, menurut Karl Marx, sangatlah menentukan. Siapa pun yang menguasai sektor ekonomi, maka kekuasaan itu akan mendorong pada penguasaan manusia juga. Demikian juga dalam di dunia hukum dan penegakannya. Hukum tidak mungkin dilepaskan dari kuasa dan relasi-relasi ekonomi. Menurut Marx, hukum tidak lebih sebagai alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu, karena hukum pada dasarnya telah dikuasai oleh kelas pemilik modal (borjuis). Maka, keadilan dalam diri hukum merupakan suatu hal yang utopia. Keadilan dalam diri hukum menurut Marx hanyalah omong kosong. Faktanya, norma-norma hukum apalagi penegakannya pasti akan melayani kepentingan-kepentingan kelompok



yang bermodal. Hukum menjadi alat yang ampuh untuk menggerakkan secara paksa eksploitasi yang dilakukan oleh pemodal yang telah bekerjasama dengan para penguasa.

Berdasarkan perspektif Marx di atas, kita bisa membaca bahwa penangkapan Tukijo dan upaya intimidasi terhadap petani Kulon Progo lainnya, tidak lepas dari intervensi penguasa dan pemodal terhadap upaya penegakan hukum. Hukum menjadi alat pemodal untuk memaksakan kehendak kepentingan segelintir orang, dalam hal ini perusahaan yang dikelola oleh kerabat penguasa di Yogyakarta sendiri.

Lord Acton pernah berkata, *“Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely.”* Semakin besar kekuasaan maka semakin besar juga potensi menggunakan kekuasaan itu untuk memaksakan kepentingan pribadi dan mengorbankan kepentingan orang lain. Dalam kasus penangkapan Tukijo kita bisa berkaca bahwa hukum di negeri ini masih berpihak pada penguasa dan pemodal, bukan pada kebenaran.[]



MENCARI ULAMA PEJUANG INDONESIA

Wawan Dinawan

“**K**EMATIAN tetaplah kematian, meski di bunuh atau Koleh kanker. Sama saja. Tidak ada bedanya, mati disebabkan oleh sebuah Apache atau serangan jantung. Tapi saya memilih terbunuh oleh Apache.”

Demikianlah Ar-Rantisi bertutur soal kematian seorang pahlawan.

Sayyid Quthb sebelum digantung berkata, “Kau tahu mengapa aku berdiri di ujung tiang gantung dan menunggu mati? Aku berdiri di sini, di ujung umurku ini, bukan hanya saja mengucapkan dua kalimat syahadat ... justru karena (aku) telah melaksanakan syahadat semampuku.”

Perjalanan memininang bidadari membuat saya menangis, bagaimana seorang ulama yang bergerak dan terus bergerak demi masa depan Islam. Mereka dibunuh karena pendirian mereka atas Islam, mengalami konflik dengan pemerintah, keluar masuk penjara, serangan demi serangan datang bertubi-tubi, baik fisik maupun bukan. Banyak fitnah menghadang yang kadang telanjur dipercaya sebagai kebenaran. Sampai akhirnya mereka menjemput bidadari mereka di surga.

Ar-Rantisi di Palestina, Sayyid Quthb di Mesir, Omar Mukhtar di Libya, gugur di medan kepahlawanan masing-masing. Lantas bagaimana dengan di negara kita?



Tidak seperti mereka yang berjuang keras menghadapi pemerintah yang memusuhi Islam, bukan pula berjuang menghadapi Israel atas tanah Palestina, tidak pula atas penjajah di tanah sendiri. Perjuangan di Indonesia tidak demikian adanya. Tidak perlu angkat senjata, karena itu memang dilarang. Tapi yang diperlukan adalah melawan ketertinggalan, kemiskinan, keterpurukan, kebodohan. Tentu saja akidah diutamakan, hanya saja kemiskinan juga menyangkut masalah akidah. Bukankah ada petikan hikmah dari generasi terdahulu bahwa kefakiran lebih dekat kepada kekafiran? Maka, jangan sepelekan kemiskinan.

Suatu ketika saya mendatangi sebuah desa pesisir di wilayah Tangerang. Sepanjang jalan kami mendapati ibu-ibu yang mandi dan memandikan anaknya yang masih balita bersamaan dengan orang yang buang air, mencuci, dan bebek yang berenang. Luar biasa. Padahal, akses jalan begitu baik dan banyak truk yang lewat sana.

Lebih mengkhawatirkan lagi karena ternyata masjid di sana begitu mewah, dari tembok-tembok bata yang kuat. Padahal, warga di sana hanya memiliki rumah bertembokkan anyaman bambu, listrik yang “mencuri”, tidak ada kamar mandi pula. Lebih anehnya, ada rental *PlayStation*. Luar biasa. Di desa itu, meski tak jauh dari Ibukota, kesenjangan dan ketidaksejahteraan masih hadir di depan mata.

Persoalannya, masalah ini tanggung jawab siapa? Pemerintah? Ya, tapi tidak semuanya benar. Ini peran-peran kita juga, saudaraku seperjuangan dalam Islam. Mengapa saya katakan di atas tentang para ulama pejuang? Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan pelajaran mengaji, tapi juga mem-



butuhkan pendidikan mental dan solusi atas permasalahan sehari-harinya. Ada solusi yang dikerjakan bersama dengan mereka. Alangkah banyak ustadz yang mengadakan kajian di masjid, namun seberapa banyak ustadz yang berjalan bersama mereka?

Rasulullah adalah guru terbaik, namun ia tidak hanya mengajar di masjid, bahkan beliau turun pada pengemis Yahudi di pasar yang setiap hari menghinanya. Inilah pejuang. Tidak berdiam diri pada lingkungan yang ada di sekitarnya.

Secara pribadi, saya menginginkan sosok ulama yang ada bersama mereka dan saya ingin bersama ulama itu. Mengapa? Karena bagi saya, pemimpin terbaik adalah para ulama pada medan jihad, pada medan amal yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan kesungguhan dan keistiqamahan serta pengorbanan yang tinggi.

Mari sebisa mungkin berusaha menjadi mereka, menjadi pahlawan sesungguhnya. Walaupun kita belum sanggup, paling tidak kita bisa terus-menerus berada di barisan pendukung para pahlawan itu: ulama pejuang Indonesia.[]



BELAJAR DARI ISKANDAR MUDA

M. Adi Nugroho

TERCATATLAH pada kitab *Bustanus Salatin*, tahun 1605 adalah tahun krisis bagi Aceh. Kemarau yang berdampak kelaparan menjadi bencana besar terus menghantui jalan-jalan Aceh ketika itu. Jalan-jalan menjadi tempat matinya ber-puluh-puluh budak, penyakit kudis menyergap rakyat dan membuat jalaanan Aceh tempat yang buruk. Laporan-laporan penjelajah Eropa pada 1602, seperti yang dikutip dari buku *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)* menyebutkan, beras adalah hal langka dan mahal. Kondisi yang ketika memunculkan golongan yang dapat memainkan harga setinggi mungkin, dan di pihak lain terdapat golongan miskin. Selain itu, Aceh memiliki krisis pangan yang dikarenakan kondisi alam berupa rawa yang tidak mudah dijadikan sawah, kemudian gengsi penduduk menjadi petani.

Pada saat itulah muncul Sultan Iskandar Muda, masa kepemimpinannya pada tahun 1607-1636 menjadi era yang gilang gemilang. Krisis pangan yang terjadi pada masa sebelum pemerintahannya perlahan pulih. Sultan menerapkan dua strategi untuk mencapai pemulihan tersebut, yaitu berusaha agar Aceh unggul dibandingkan kerajaan lain dan menstabilkan pasokan pangan. Ahli sejarah asal Prancis, Denys Lombard, dalam disertasinya *Le Sultanat d'Atjeh au temps d'Iskandar Muda* menyebutkan bahwa pada masa itu Aceh



memiliki lumbung padi yang sangat kuat. Penyelesaian masalah pangan menjadi prioritas sebelum melakukan ekspedisi.

Pada masanya, peran orang kaya yang mengendalikan pasokan beras dikurangi. Beras mampu didatangkan dari daerah sekitar, seperti Pedir (Pidie) dan Daya (Aceh Jaya). Iskandar Muda juga menerapkan politik pertanian untuk mendorong kemajuan produksi pertanian. Budak-budak dikirim untuk menanam padi; pembagian beras dilakukan dengan pengawasan yang ketat agar tepat sasaran. Ketahanan pangan bagi Iskandar Muda perlu diperhatikan secara disiplin. Ia menekan peran-peran spekulan yang tidak hanya merongrong kekuasaannya, tapi juga menyengsarakan rakyat.

Sejarah Iskandar Muda adalah sejatinya contoh bagi pemerintah Indoensia saat ini dalam menjaga ketahanan pangan. Perlu ada keputusan politik yang tepat dan juga kewibawaan pemerintah agar terhindar dari krisis pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat mempertahankan kehidupannya sehingga menjadi hak asasi yang harus terpenuhi. Oleh karena itu, prioritas kebijakan pemerintah seharusnya berupa pembangunan pertanian.

Pada akhirnya, kebijakan ketahanan pangan nasional telah dirumuskan, termaktub dalam UU Pangan No. 7 tahun 1996 dan diperkuat dengan PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Kebijakan pun diselaraskan dengan isu global yang disepakati dalam Pertemuan Puncak Pangan Dunia tahun 2001, yaitu mencapai ketahanan pangan bagi setiap orang dan mengikis kelaparan di seluruh dunia. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penyediaan.



Tantangan lokal bangsa ini di abad ke-21 adalah ke-siapan untuk memenuhi tuntutan global. Persoalan pangan menjadi persoalan yang akan menggantikan persoalan energi pada perang-perang berikutnya. Dengan laju pertumbuhan penduduk 1,5% per tahun, dan populasi manusia mencapai 270,8 juta jiwa maka Indonesia menghadapi pemenuhan pangan yang harus diatasi. Konsumsi beras kita saat ini sebesar 130-140 kg per kapita per tahun. Memastikan ketersediaan pangan dan juga pendistribusian serta pembelian dengan harga yang pantas dari petani adalah kebijakan pemerintah yang sepatutnya diambil.

Politik Pertanian

Satu hal yang penting diperhatikan ketika Iskandar Muda mengalami masa yang sulit adalah politik pertanian. Politik pertanian yang Sultan lakukan adalah menjaga stabilitas ketersediaan pangan untuk Aceh. Lalu, keterjangkauan pangan menjadi hal yang diperhatikan Iskandar Muda dengan disiplin.

Bagaimanapun juga majunya sebuah bangsa bisa ditandai dengan majunya pertanian dan lebih spesifik adalah kemampuan menjaga pasokan pangan dalam negeri. Iskandar Muda telah mengajarkan kepada kita bahwa sebelum program ekspedisi atau penguasaan bangsa lain, ketersediaan pangan kerajaan adalah yang didahulukan. Di era modern ini, pemerintah sepatutnya tak lupa untuk memprioritaskan ketersediaan pangan dalam negeri.

Memang, secara umum Indonesia tidak memiliki masalah terhadap ketersediaan pangan. Indonesia mampu mem-



produksi 31 juta ton beras tiap tahunnya dan mengonsumsi sedikit di atas produksi tersebut. Data dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) pun menunjukkan seluruh produksi pangan penting selama tahun 2005-2009 mengalami pertumbuhan yang positif. Tapi, ketersediaan yang ada tidaklah menguntungkan petani. Pemerintah masih mengimpor beras dan tidak berusaha mengencangkan produksi pertanian dalam negeri. Di lain pihak, adanya permainan spekulasi dalam menentukan harga beras dari petani sungguh merugikan. Akibatnya, pemerintah tak mampu membeli secara keseluruhan hasil panen dari petani.

Dalam politik pangan, seharusnya para petani kita memiliki hak-hak khusus seperti yang ada di negara-negara maju. Hak-hak ini diperlukan untuk memperkuat ciri bangsa sebagai negeri agraris, antara lain menempatkan petani sebagai tulang punggung ketersediaan pangan dalam negeri. Menjadi sia-sia apabila pemerintah mampu mencapai target swasembada, tetapi petani dalam negeri mengalami kerugian dan hanya sekadar sapi perah. Itu pula yang diajarkan Iskandar Muda, yang memberdayakan rakyatnya untuk bertani dan tidak sekadar berharap dari berdagang. Tanah-tanah yang ada di Aceh diberdayakan untuk memenuhi ketersediaan.

Terlebih saat ini, dunia mengalami ketidakpastian iklim dan suasana global yang dinamis. Iklim yang tak menentu mempengaruhi jadwal tanam dan tak bisa diprediksi waktu panen. Maka tak heran apabila harga per kilogram cabe melampaui harga daging sapi. Sedangkan kebutuhan petani dalam menghidupi diri pun sulit karena terkena kebijakan ekonomi dari tarif dasar listrik sampai kenaikan BBM. Sepa-



tutnyalah dalam konsisi seperti ini pemerintah melindungi para petani.

Diversifikasi pengembangan produk pun harus dilakukan untuk menambah nilai kerja petani, selain juga untuk menjaga apabila satu tanaman mengalami gagal panen. Dalam konteks ini, Indonesia sebenarnya memiliki keanekaragaman yang perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Diversifikasi pangan dapat dilakukan dengan mengembangkan usaha tani yang memiliki keunggulan sebagai “*core of business*” dan juga mengembangkan usaha pelengkap untuk memperkecil kegagalan panen. Keunggulan yang diperkaya lewat diversifikasi akan semakin mapan apabila melihat aspek keunggulan dari setiap daerah.

Diversifikasi juga tidak hanya dari sisi produksi, melainkan juga sampai tingkat konsumsi. Iskandar Muda menjadikan gandum dan umbi-umbian sebagai bahan pokok ketika beras menjadi komoditas langka pada masa itu. Sejarah pun membuktikan, sebenarnya bangsa kita tidak murni mengonsumsi beras sejati. Di Candi Borobudur ditemukan relief pohon gandum yang menandakan gandum menjadi komoditas pada masa itu. Hanya sayangnya, saat ini gandum tak lagi ditemukan karena tanah datar yang dijadikan tempat bertumbuhnya banyak dialihfungsikan sebagai hunian ataupun lahan pertanian.

Ketersediaan pangan ini selanjutnya juga akan berdampak pada keterjangkauan pangan. Ketersediaan pangan yang kritis mengakibatkan keterjangkauan pangan pun akan semakin sulit. Sayangnya, ketersediaan pangan yang memadai pun belum menjamin keterjangkauan pangan menjadi



mudah. Inilah yang mengharuskan pemerintah menerapkan politik kebijakan untuk melindungi petani dan hasil produksinya agar tidak ada oknum yang bermain sebagai spekulasi ataupun menimbun.

Pemerintah memang memiliki program “Beras untuk Keluarga Miskin” atau yang populer dengan sebutan ‘raskin’. Sebanyak 20 kg beras per bulan dipasok pemerintah kepada 9 juta keluarga miskin. Sayangnya, yang terjadi kemudian adalah program tersebut membutuhkan biaya yang besar. Pada tahun 2004 saja pada awal mulanya program raskin menghabiskan 4,8 triliun rupiah. Di sisi lain, ketercapaian sasaran program ternyata masih jauh dari target. Rata-rata rumah tangga hanya memperoleh hanya 6-10 kg beras dan tidak sampai 20 kg yang ditargetkan pemerintah. Hal ini disebabkan karena beras dibagikan secara merata baik pada rumah tangga yang tidak miskin ataupun keluarga yang miskin.

Alhasil, dengan keadaan seperti sekarang, pemerintah tampaknya perlu menengok kebijakan politik pangan dari Iskandar Muda kala memimpin Aceh. Kedisiplinan menjadi hal penting dalam menjaga ketersediaan dan juga keterjangkauan pangan bagi rakyatnya. Tak sekadar membuat kebijakan, Iskandar Muda ikut turun tangan untuk memastikan pendistribusian pangan secara merata dan juga tepat sasaran. Para spekulasi yang mempermainkan harga pasar dan juga merugikan petani ditekan oleh Sultan. Sultan percaya bahwa ketahanan pangan bukanlah urusan sesaat tapi diperlukan konsistensi dalam penjagaan dan berkelanjutan. Iskandar Muda mengajarkan kita berabad lampau lamanya.[]



FILOSOFI SEBUTIR NASI

Yogi Achmad Fajar

SETIAP orangtua pasti memberikan nasihat dan pesan berharga untuk anak-anaknya. Ini tidak lain tanda kasih dan sayang kepada anak-anaknya agar bisa sukses, berguna bagi negara, dan menjadi anak yang saleh dan salehah. Petuah orangtua memang sangat memberikan pembelajaran untuk menghadapi kehidupan yang kompleks ini. Patut bersyukur bagi yang masih diberi petuah oleh orangtua.

Tak terkecuali dengan kedua orangtua saya. Orangtua saya tak pernah lelah mengeluarkan petuah-petuah berharga. Meski kadang, anak-anaknya tak mendengarkan dan meng-gubris.

Namun, tetap saja tak ada kata menyerah bagi mereka. Ibu saya khususnya. Ibu selalu memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya, terutama saya yang notabene anak bungsu.

Ada salah satu ucapan dan nasihat Ibu yang masih terngiang-ngiang dan benar-benar saya kerjakan sampai sekarang. Nasihat ini terlontar dari Ibu saat saya masih kecil. Nasihatnya kurang lebih seperti ini, "*Gie, mun emam sangu téh séépkeun dugi ka réméh-réméhna. Sing limit. Éta téh pibeung-hareun sareng anu ngaduakeun urang beunghar!*" ("Gie, kalau makan nasi habiskan hingga tidak ada sisa. Sampai habis. Itu membuat kaya dan yang mendoakan kita kaya!")



Sudah tak terhitung berapa kali nasihat itu disampaikan, sampai saya hafal. Pasalnya, saya terkadang tak selalu menghabiskan makanan yang saya makan.

Dasar anak kecil, saat itu saya hanya bisa mengangguk-angguk dan sempat merasa aneh atas nasihat tersebut, “Masa sebutir nasi bisa membuat kita jadi kaya?” gumam saya.

Kaya Makna

Tak serta-merta Ibu saya ketika itu mengeluarkan pernyataan tentang sebutir nasi tanpa ada makna dan filosofinya. Saya hanya bisa berkata, “Subhanallah, jadi ini maksud nasihat Ibu itu”, saat mengetahui apa makna di balik pesan Ibu selama ini. Saya tertegun.

Ternyata, Ibu memberikan pelajaran kepada saya untuk tak menyepelekan hal-hal yang kecil. Pasalnya, sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Hal kecil bila disepelekan bisa berimbas kurang baik bahkan fatal bagi hal besar. Hal yang kecil adalah fondasi fundamental dari hal-hal yang besar. Jika hal yang kecil saja tak disikapi dengan baik dan serius, bagaimana menyikapi hal yang besar?

Saya jadi teringat apa yang dikatakan Ibnul Qayyim dalam *Al-Fawa'id*, “Barang siapa yang hendak meninggikan bangunannya, maka hendaklah dia mengokohkan fondasinya dan memberikan perhatian penuh terhadapnya. Sesungguhnya kadar tinggi bangunan yang bisa dia bangun adalah sebanding dengan kekuatan fondasi yang dia buat. Amalan manusia adalah ibarat bangunan dan fondasinya adalah iman.”



Itu juga yang menjadi alasan Ibu mengakhiri nasihat tersebut dengan kalimat, “*Éta téh pibeunghareun sareng anu ngaduakeun urang beunghar.*” Orang kaya (baca: sukses) adalah orang yang tak pernah menyia-nyiakan kesempatan dan menyepelekan segala hal sampai hal yang terkecil.

Nasihat Ibu mengajarkan saya untuk lebih bersyukur atas rezeki yang Tuhan berikan. Masih banyak orang di sekeliling kita yang untuk mendapat sesuap nasi saja teramat kesulitan. Akan sangat mubazir dan kurang ajar bagi saya bila tak menghabiskan makanan.

Sungguh, Ibu telah banyak mengajari saya tentang arti hidup ini. Tidak hanya soal sebutir nasi, namun juga hal-hal lain dalam hidup. Peristiwa apa pun bisa memberikan pembelajaran berharga, termasuk saat makan sekalipun. Semua ini bisa menjadi cermin sikap kita dalam menghadapi rezeki terbesar Tuhan Yang Maha Pemurah: kehidupan.

Terima kasih Ibu![]



DEDIKASI EMAK

Purnawati Hustina Rachman

TANGANNYA yang keriput sudah tak sekuat dulu, senyumnya yang lemah sudah tak seceria dulu. Binar matanya tersembunyi di balik lapisan kulit sekitar matanya. Tetapi apa yang tersisa dari sosok lemah di depanku ini jauh lebih penting dari apa yang tampak: hati yang hangat.

Meskipun usianya telah mencapai 50 tahunan, Emak, panggilan yang biasa di tujukan oleh para tetangga, tidak pernah kehilangan semangat dalam memberi. Berjalan sekitar lima kilometer setiap hari menelusuri desanya untuk mereka yang membutuhkan bantuan sudah menjadi aktivitas hariannya. Untuk menjaga agar mereka tetap bekerja, untuk membawa mereka ke klinik terdekat setiap minggu untuk periksa (*check up*). Juga untuk menceritakan cerita pada mereka, untuk membuat mereka tertawa, membawa kebahagiaan ke dalam hidup mereka. Itulah bagaimana Emak hidup dan menjadi petugas kesehatan yang diperuntukkan bagi orang-orang tua.

Meskipun terhitung sebagai orang tua, ia menganggap dirinya lebih kuat dan ceria dibandingkan dengan para orang tua lainnya. Sebenarnya ia pernah menyimpan sebuah cerita kepedihan. Di masa lalu ia dipaksa menikah pada umur yang sangat muda dan ditinggalkan oleh suami dan anaknya bekerja. Menurutnya, kini saatnya ia menyibukkan diri dan mendapatkan kepuasan. Keuntungan ekonomi bukanlah apa



yang ia cari, apalagi pujian dari orang lain. Ia sepenuhnya hanya ingin menjadi berguna bagi orang lain.

Tidak sanggup untuk lulus sekolah dasar adalah hal yang kurang beruntung bagi Emak. Dengan kurangnya pengetahuan dan wawasan, ia kadang bermain sendirian di pojok ruangnya pada masa awal pernikahan ketika ia masih sangat muda. Sampai ketika suaminya pulang dari bekerja pekerjaan hariannya adalah membersihkan rumah dan bermain sendirian. Ketika ia cukup tua untuk melahirkan anak, ia sadar bahwa ia tidak ingin menjadi ibu yang bodoh. Ia ingin menjadi istri dan ibu yang baik bagi suami dan anaknya. Oleh karena itu, meskipun kurangnya fasilitas dan buku, ia berkeinginan untuk belajar dan menjadi lebih tangguh. Ia kemudian menanamkan hobi baru di dalam jiwa dan pikirannya: membaca.

Akhirnya, ia dapat membaca apa pun yang ada di rumah. Koran, majalah, bahkan buku berisi instruksi yang menyertai kemasan radio.

Usahnya yang positif untuk menggali ilmu telah membuat ia menjadi seorang wanita yang hebat di masa depan. Ia dapat menjahit, merajut, dan membuat pakaian. Ia membuat usaha kecil dan mengajak yang lain untuk menciptakan bisnis mereka sendiri. Ia dan suaminya mampu membiayai ketiga anak mereka untuk kuliah sampai sekarang.

Meskipun ia bukan orang terkaya ataupun orang terajin di desa, ia dihargai oleh seluruh orang di sekitarnya. Kemauannya yang besar dan hatinya yang penyayang telah memberi kehangatan pada desanya. Sekarang, meskipun sosoknya yang lemah dan keriput, ia dikenal sebagai “ibu desa” dan tetap menjadi orang yang ceria seperti saat ia muda dulu.[]



SEMUA MAMPU MERAWAT, TETAPI TIDAK SEMUA MAU

SEBUAH EPILOG

Sri Nurhidayah

GM Pendidikan Dompot Dhuafa

SETIAP ORANG mampu membangun, namun hanya sedikit yang mampu merawatnya. Kalimat ini tepat untuk melukiskan keadaan bangsa ini. Secara kasat mata, infrastruktur dibangun namun ketidakmampuan kita merawatnya membuatnya rusak dalam sekejap. Telepon umum dan bus surat adalah contoh kecilnya. Transportasi massa seperti kereta api, bus, atau fasilitas bandara yang sangat menyedihkan keadaannya adalah contoh lain.

Ketidakmampuan merawat amanah juga menjadi penyakit menular di semua lapisan masyarakat. Mencontek massal di sekolah, pornografi dan kekerasan di media massa, serta korupsi yang merajalela—korupsi materi maupun waktu. Maka, mengena sekali perkataan Taufik Ismail dalam *Malu Aku Jadi Orang Indonesia*:

*Langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak
Hukum tak tegak, doyong berderak-derak
Berjalan aku di Roxas Boulevard, Geylang Road, ebuh Tun
Razak,*



*Berjalan aku di Sixth Avenue, Maydan Tahrir dan Ginza
Berjalan aku di Dam, Champs Élysées dan Mesopotamia
Di sela khalayak aku berlindung di belakang hitam kacamata
Dan kubenamkan topi baret di kepala
Malu aku jadi orang Indonesia.*

Saat saya membaca buku *Belajar Merawat Indonesia*, saya melihat awan perubahan itu. Sungguh sebuah keberanian untuk memimpikan Indonesia Baru kembali muncul. Setiap kali bertemu dengan para pemuda ini, penerima Beasiswa Aktivistis Dompot Dhuafa, kegairahan dan semangat mereka menulari diri saya. Namun, saat saya membaca buku ini, hati saya menangis diam-diam. Allah Swt memberikan para anak muda penerima Beasiswa Aktivistis untuk Indonesia. Mereka yang memiliki kasih sayang dan cinta untuk bangsa ini.

Buku ini menggunakan kata yang sangat tepat: MERA-WAT. Kegiatan yang hanya bisa dilakukan dengan cinta, kasih sayang, dan komitmen penuh. Tidak mungkin merawat jika tidak memiliki cinta dan kasih sayang, serta kesediaan untuk menyisihkan waktu tanpa batas. Lihatlah saat seorang ibu merawat anaknya! Cinta dan kasih sayang tumpah tanpa kenal waktu. Satu lagi yang menakjubkan, kelelahan dan kemarahan akan hilang saat kita merawat.

Inilah pesan penting dari buku *Belajar Merawat Indonesia*. Sebuah proses yang harus dijalani bersama oleh seluruh komponen bangsa ini. Bersama-sama mensyukuri Indonesia dengan memberikan yang terbaik dari yang kita miliki. Bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk diri kita sendiri, anak-anak yang meminjamkan tanah air ini pada kita. Anak-anak



yang mengalir darah kita pada tubuh mereka. Semoga *Belajar Merawat Indonesia* dapat menjadi sebuah titik awal untuk semangat mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Cita-cita yang sudah lama kita lupakan.

Terima kasih... *Damn! I love Indonesia.*



TENTANG PENULIS



Abdul Basir. Mahasiswa Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan IPB. Ketua LDK Al Hurriyyah IPB 2011. Volunter pada Beasiswa Cendikia LAZ IPB.



Achmad Fahmi Basyaiban. Mahasiswa Sastra Asia Barat 2008, Fakultas Ilmu Budaya UGM. Presiden UKM Gama Cendekia UGM 2011, Ketua Asosiasi Mahasiswa Bahasa Arab Lintas Kampus (AMALIKA) 2011, Ketua Departemen Humas Ikatan Mahasiswa Sastra Asia Barat (IMABA) FIB UGM 2010. Pernah menjadi delegasi dalam forum ilmiah di dalam dan di luar negeri.



Akifan Hanggraito. Mahasiswa Fakultas Teknik Industri UGM. Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri FT UGM 2011. Volunter pada pemberdayaan masyarakat Dusun Kerjan, Desa Beji, Patuk Gunung Kidul Yogyakarta melalui pelatihan marketing dan kewirausahaan.





Andreas Sanjaya. Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UI. Anggota Majelis Wali Amanat dari unsur mahasiswa 2011; aktif dalam Nalacity Foundation. Menjadi delegasi dalam 12th Educational Forum AUN Thailand. Gagasannya tentang pengembangan ASEAN pernah dimuat di harian *Seputar Indonesia*.



Artina Prastiwi. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Volunter Maharani.



Ary Santoso. Mahasiswa Statistika Fakultas MIPA IPB 2007. Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB 2011. Ketua BEM FMIPA IPB 2010. Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate IPB 2009.



Atiudina. Mahasiswa Fakultas Psikologi UGM. Volunter pada Pendampingan masyarakat di *Shelter Merapi*.





Dewanti. Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan UI. Aktif di BEM FIK UI dan volunter pada Sekolah Peduli Anak FIK UI. Anggota Tim Kesehatan UI Mengabdi. Tulisannya pernah dimuat di *seputar-indonesia.com*



Dini Khoirinnisa Arifin. Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UI. Bendahara Umum Kelompok Studi Mahasiswa “Eka Prasetya” Universitas Indonesia 2011. Menjadi delegasi Indonesia dalam ajang internasional 3rd Annual Hult Global Case Challenge (Hult GCC) yang berlangsung di London, 22-24 Februari 2012 (meraih 4rd Best Solution on Global Housing Case Challenge). Tulisannya pernah dimuat di *Seputar Indonesia*.



Laras Susanti. Mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Peneliti pada Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM. Aktif menulis artikel di media-media nasional, khususnya persoalan korupsi; di antaranya pernah dimuat di *Kompas*, *Seputar Indonesia*, dan *Harian Jogja*.



Lutfi Brilliant Wanda. Mahasiswa Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan IPB. Ketua BEM Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan 2011. Menteri Kebijakan Kampus BEM KM IPB 2012. Penanggung Jawab Bina Desa Nelayan di Kronjo Tangerang Banten.





Maman Abdurrakhman. Mahasiswa Fakultas Teknik UI. Ketua BEM UI Periode 2011. Penanggung jawab School of Volunter dan UI Mengajar. *Gagasannya* yang tertulis bertebaran di media, di antaranya pernah dimuat di *Seputar Indonesia*, *Sinar Harapan*, dan *seputar-indonesia.com*



Monica Utari. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Menjadi delegasi Indonesia dalam ajang internasional 3rd Annual Hult Global Case Challenge (Hult GCC) yang berlangsung di London, 22-24 Februari 2012 (meraih 4rd Best Solution on Global Housing Case Challenge). Menjadi delegasi pada International Camp of Young Environmentalists Gabala, Azerbaijan (2011), Perwakilan UNESCO Youth Desk Network pada International TUNZA Children and Youth Conference on Environment (2011), dan delegasi pada International Congress on AIDS in Asia and The Pacific 2011 di Korea Utara.



M. Adi Nugroho. Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UI. Wakil Ketua BEM UI Periode 2011. Aktif mengirimkan artikel dan puisi ke berbagai media nasional; di antaranya pernah dimuat di *Seputar Indonesia*, *Jurnal Nasional*, dan *Okezone.com*.





M. Ridwan Affan. Mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Ketua Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM 2011. Volunter pada kegiatan advokasi kasus hukum di wilayah Yogyakarta.



Muhammad Al-Mujabudda'wat. Mahasiswa Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI 2008. Aktivistis Pencinta Alam Universitas Indonesia (Mapala UI). Aktif dalam spesialisasi SAR dan Tanggap Bencana.



Nestiyanto Hadi. Mahasiswa Fakultas MIPA. Sekretaris Jenderal SALAM UI 2011. Volunter Kersosda SALAM UI dan Kakak Asuh Beasiswa SALAM UI. Tulisannya tentang sampah di Situ UI pernah dimuat di *Media Indonesia*.



Nur Saudah Al Arifa D. Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian UGM 2011. Pendiri sekaligus Direktur Komunitas Gajah Mada Mengajar; Dewan Pakar Agritech Study Club; pendiri Halal Food Community. Aktif dalam Forum Indonesia Muda, Indonesia Young Changesmaker, Forum Pelatihan Pemimpin Bangsa dan Forum Pemuda Sukarelawan. Pernah meraih beberapa penghargaan, di antaranya: *Best Presentator* Simposium Gizi Nasional FK UGM; Juara 1 *Paper Challenge* Bidang MIPA Masyarakat Ilmuwan Teknolog Indonesia; Finalis Community Development Competition (CDC) ITB Fair di Bandung.





Purnawati Hustina Rachman. Mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia IPB. Mahasiswa Berprestasi IPB (Peringkat 1) dan Nasional (Peringkat 3) pada 2010. Menjadi delegasi pada Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition, Bangkok, Thailand.



Ratih Kumala Dewi. Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Sekretaris Menteri Pendidikan BEM KM IPB 2010-2011. Volunter pada IDEA (IPB's Dedication for Education). Pernah mengikuti Exchange Student Program ke Filipina. Tulisannya pernah dimuat di *Jurnal Bogor*.



Seztifa Miyasyiwi. Mahasiswa Fakultas MIPA IPB. Senior Residence Asrama IPB. Penanggung jawab dan Mentor Sekolah Prestasi & Club Ilmiah Asrama IPB. Pernah mengikuti Aceh Development International Conference, di Bangi, Malaysia.



Suci Latifah. Mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia IPB. Aktif dalam *Community Development Forum for Scientific Studies (FORCESS)* IPB. Peserta Indonesia English Language Study Programme 2011 di Arizona State University Amerika Serikat.





Wawan Dinawan. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Ketua Komisi I DPM KM IPB 2011. Tulisannya pernah dimuat di Suara-Islam Online.



Yogi Achmad Fajar. Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UGM. Koordinator/pemimpin redaksi portal berita BulaksumurUGM.com tahun 2011. Analisisnya tentang karakter bangsa pernah dimuat di *Republika*. Ketua *action plan* komunitas Sahabat Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan (SP2MP) UGM (2010). Pada 2009 menjadi bagian dari delegasi Indonesia dalam Youth Camp for Asia's Future di Seoul, Korea Selatan.



PROFIL BEASISWA AKTIVIS NUSANTARA (BAKTI NUSA) DOMPET DHUAFA

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu kunci untuk kebangkitan bagi sebuah bangsa dan salah satu elemen kebangkitan yang sangat berperan adalah para pemudanya. Karenanya pendidikan pemuda dan mahasiswa harus memperoleh perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa.

Beastudi Indonesia Dompert Dhuafa adalah salah satu Jejaring Pendidikan di Dompert Dhuafa yang berkhidmat pada peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan. Berbagai pengalaman dalam mengelola beasiswa investasi sumber daya manusia dan pemberdayaan, mengantarkannya untuk juga memperhatikan para pemuda khususnya aktivis mahasiswa yang penuh dengan semangat, idealisme dan potensi untuk perbaikan suatu bangsa. Padatnya aktivitas akademis dan non-akademis, ditambah dengan rongrongan untuk lebih realistis, membuat aktivis cenderung untuk tidak seimbang dan tergadai idealismenya. Padahal, idealisme itulah yang membuat mereka terus berjuang, berkontribusi dan menebar kebermafaatan bagi masyarakat.



Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berani, cerdas, aktif, dan punya integritas untuk melayani masyarakat, dan para aktivis mahasiswa memiliki semua modalnya. Selanjutnya tinggal bagaimana sistem dapat mendukungnya. Untuk itulah diperlukan sebuah program yang mampu mendukung dan menguatkan peran aktivis mahasiswa sebagai investasi untuk lahirnya pemimpin masa depan yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan masyarakat dan terus berupaya untuk berkontribusi menjadi solusi bagi kompleksnya problematika bangsa.

B. DEFINISI

Program ini bernama Beasiswa Aktivis Nusantara disingkat BAKTI NUSA. BAKTI NUSA adalah investasi sumber daya manusia yang mengelola biaya untuk pendidikan, pembinaan, dan pelatihan, serta pendampingan bagi aktivis mahasiswa.

C. TUJUAN

Program BAKTI NUSA bertujuan mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan sikap peserta program yang akan mengarahkannya menjadi sumber daya manusia yang berkarakter pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu berkontribusi dan berperan aktif di tengah masyarakat.

D. MISI

Adapun misi dari program BAKTI NUSA adalah:

1. Pengembangan diri peserta program yang berbasis karakter;



2. Membangun dan mengoptimalkan jaringan;
3. Mengoptimalkan peran penerima manfaat dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat;

E. BENTUK PROGRAM

Pelaksanaan program Beasiswa Aktivistis dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan yaitu:

1. Pemberian dana dukungan aktivitas;
2. Fasilitas pengembangan diri:
 - a. Training
 - ♦ **Character Building:** Pelatihan pembentukan karakter mahasiswa yang unggul dan kepemimpinan. Dilaksanakan setiap bulan.
 - ♦ **Training Value:** Pelatihan kerelawanan sosial yang dilaksanakan setiap bulan.
 - ♦ **Pelatihan Penulisan.** Pelatihan dan pendampingan penulisan yang dilaksanakan sepanjang pelaksanaan program
 - b. Coaching:
 - ♦ **Coaching Aktivistis:** Pelatihan dan pendampingan kepemimpinan praktis oleh fasilitator yang meliputi aspek agama, *leadership*, dan *managerial skill*, akademik, dan sosial. *Coaching* juga berperan sebagai sarana *sharing*, monitoring dan evaluasi bagi peserta program oleh fasilitator. *Coaching* dilaksanakan setiap pekan.
 - ♦ **Coaching Tokoh:** Kunjungan dan diskusi bersama tokoh nasional sebagai sarana mem-



perkaya wawasan dan gagasan bagi peserta program. Silaturahmi tokoh juga dilaksanakan sebagai sarana memperluas jaringan bagi peserta dan lembaga. Silaturahmi tokoh dilaksanakan setiap bulan.

c. Penugasan

Bentuk pembinaan yang lain dari Beasiswa Aktivis adalah penugasan, baik secara perorangan maupun kelompok. Penugasan dilakukan dalam bentuk:

- ♦ Penulisan artikel (bulanan);
- ♦ *Focus Group Discussion* (bulanan);
- ♦ *Event* bersama penerima beasiswa (triwulan);
- ♦ *Social Project* (Tahunan).

d. Magang

Peserta BAKTI NUSA yang telah memasuki tahun kedua diberikan kesempatan terlibat dalam aktivitas kemanusiaan yang dilakukan di Jejaring internal maupun Mitra Dompot Dhuafa di Indonesia maupun mancanegara.

e. Delegasi

Program BAKTI NUSA memberikan dukungan dan kesempatan kepada peserta BAKTI NUSA untuk mengikuti kegiatan delegasi baik nasional maupun internasional.

f. Support S-2

Dukungan dan fasilitasi bagi peserta BAKTI NUSA yang merencanakan melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2.



3. Fasilitator

Seluruh rangkaian program dikelola oleh seorang fasilitator pada setiap daerah program. Fasilitator bertindak sebagai manajemen program sekaligus pendamping bagi peserta. Fasilitator adalah aktivis/tokoh lembaga kemahasiswaan di PTN daerah program masing-masing.

F. PESERTA

Peserta program ini pada tahun pertama terdiri dari 24 aktivis mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Sedangkan pada tahun kedua, yaitu tahun 2012, peserta program berjumlah 72 aktivis mahasiswa yang berasal dari 3 kampus program tahun pertama ditambah 4 kampus program baru yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Sriwijaya (UNSRI).

F. KONTAK PERSON

Fachriadi Tanjung	081318386540
Nurhayati Rospitasari	081327554440

